

# ARSIP

Media Kearsipan Nasional

## MENYONGSONG KEARSIPAN MODERN DI IBU KOTA NEGARA BARU



### 1 JATI DIRI BANGSA: INDONESIA SENTRIS

- Manifestasi nilai-nilai kebangsaan dalam ruang kota
- Damau Pancasila
- Museum Perjuangan
- Plaza Bhinneka Tunggal Ika
- Sumbu Tri Praja (Kebudayaan, Uygulatif, Yudisial)
- Sumbu Kebangsaan

### 2 MERAYAKAN ALAM BERKELANJUTAN

- Kota Keselamatan / Archipelago / Kota di antara hutan dan lautan air
- Belajar dari ekosistem hutan hujan tropis
- Melindungi, Menerangi, Rekonstruksi Hutan
- Hutan sebagai sumber energi & ekonomi
- Design Master Plan Berkonsep Tinggi

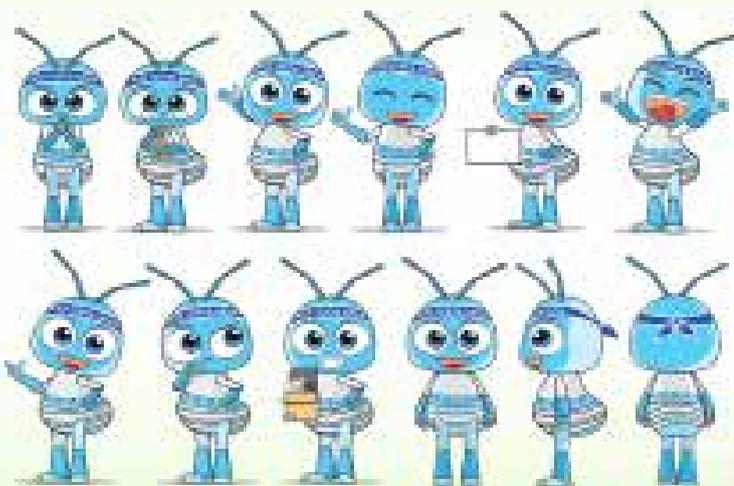
### 3 KOTA MASA DEPAN

- Teknologi Termutakhir untuk Sistem Perkotaan (AI, machine learning, command center)
- Kota smart dan intelligent berbasis modul kompak
- Perencanaan Kota Cerdas untuk Indonesia menuju Society 3.0
- Kota Berketahanan & adaptif terhadap tantangan

### 4 KOTA UNTUK DUNIA

- Guardian and Gateway to Heart of Borneo
- Global Leader dalam :
- Pusat Penelitian Hutan Tropis
- Pusat Konservasi Alam/lingkungan
- Penelitian Kelautan dan Ekosistem Pesisir
- Most Livable and innovative City

Hai Sahabat Arsip...  
Aku maskot "Tertib Arsip"  
Aku yang akan mengingatkan  
sahabat arsip untuk mengelola  
dan menjaga arsip dengan  
baik....



# DAFTAR ISI



## 5 MENYONGSONG KEARSIPAN MODERN DI IBU KOTA NEGARA BARU

ANRI telah menyiapkan berbagai kajian dan riset mendalam mengenai implikasi pemindahan IKN terhadap penyelenggaraan kearsipan. Setidaknya ada dua hal yang perlu disiapkan dalam transisi perpindahan IKN dalam konteks penyelenggaraan kearsipan, yakni pengelolaan arsip di IKN Lama (Jakarta) dan Pengelolaan Arsip di IKN Baru.

<b>DARI REDAKSI</b>	<b>4</b>
<b>KHAZANAH</b>	<b>16</b>
<b>DARI ANGGREK BULAN SAMPAI DAUN EMAS</b>	<b>21</b>
<b>KHAZANAH</b>	<b>21</b>
<b>DARI AMBOINA KE BATAVIA : KISAH VOC Mencari IBUKOTA</b>	<b>25</b>
<b>PRESERVASI</b>	<b>25</b>
<b>LARASKA, SALAH SATU KONTRIBUSI ANRI BAGI MASYARAKAT</b>	<b>31</b>
<b>MANCANEGARA</b>	<b>31</b>
<b>MEMETIK PENGALAMAN PEMINDAHAN ARSIP NEGERI PAMAN SAM</b>	<b>35</b>
<b>DAERAH</b>	<b>35</b>
<b>BANGKITNYA KEARSIPAN DI PROVINSI TERMUDA DI PULAU JAWA</b>	<b>35</b>



## 10 PARADIGM SHIFT: KONSEP PENGEMBANGAN KONSERVASI ARSIP DALAM Mendukung IBU KOTA NEGARA BARU

Perkembangan era informasi dewasa ini begitu pesat. Laju yang begitu cepat seiring tuntutan zaman dan keterbukaan informasi mau tidak mau mewajibkan kita untuk terus berlomba di dalamnya. Ditambah dengan adanya persaingan global dan antar negara semakin mewajibkan kita untuk siap turut serta dalam tantangan tersebut terutama memasuki era disrupsi informasi.

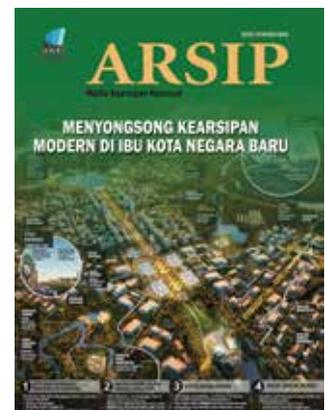
<b>TEKNOLOGI</b>	<b>38</b>
<b>MEMOTRET TOPOLOGI NETWORK PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK DI IKN BARU</b>	<b>41</b>
<b>HUKUM</b>	<b>41</b>
<b>KEARSIPAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA</b>	<b>44</b>
<b>VARIA</b>	<b>44</b>
<b>PEDULI SITUASI PANDEMI : LABORATORIUM ANRI BAGIKAN HAND SANITIZER UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>47</b>
<b>VARIA</b>	<b>47</b>
<b>LEMBAGA KEARSIPAN BERSIAP DIRI MENYELAMATKAN ARSIP PANDEMI COVID-19</b>	<b>50</b>
<b>VARIA</b>	<b>50</b>
<b>ARSIP DAN PERPUSTAKAAN SUMBER INFORMASI YANG MENGINSPIRASI</b>	<b>50</b>



## 14 KISAH PENANGKAPAN PANGERAN DIPONEGORO VERSI LAPORAN HENDRIK MERKUS DE KOCK

Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang ketika sedang mengunjungi Hendrik Merkus de Kock dalam rangka memenuhi undangan sang Gubernur Jenderal untuk melakukan perundingan damai di antara kedua belah pihak yang sedang berperang. Rangkaian penangkapan yang terekam dalam lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro yang dibuat oleh Raden Saleh, nampak jelas terlihat betapa masyarakat pribumi yang menyaksikan penangkapan tersebut sangat terpukul dan menyesali kecurangan yang dilakukan oleh para tentara Belanda.

<b>VARIA</b>	<b>55</b>
<b>TANTANGAN KEARSIPAN PADA ERA REVOLUSI 4.0</b>	<b>59</b>
<b>CERITA KITA</b>	<b>59</b>
<b>MISTERI TELAGAARUM</b>	<b>62</b>
<b>LIPUTAN</b>	<b>62</b>



### KETERANGAN COVER

Pemenang Pertama Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara dengan judul 'Nagara Rimba Nusa'  
Sumber : Kementerian PUPR  
<https://twitter.com/KemenPU>

**Pembina:**

Kepala ANRI,  
Sekretaris Utama,  
Deputi Bidang Konservasi Arsip,  
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,  
Deputi Bidang Informasi dan  
Pengembangan Sistem Kearsipan

**Penanggung Jawab:**

Widarno

**Pemimpin Redaksi:**

Suminarsih

**Wakil Pemimpin Redaksi:**

Isanto

**Dewan Redaksi:**

Azmi, Hilman Rosmana,  
M. Ihwan,  
Bambang Parjono Widodo,

**Redaktur Pelaksana:**

Susanti,  
Mudanto Pamungkas

**Editor:**

Dhani Sugiharto,  
Aria Maulana,  
Rayi Darmagara,  
R. Suryagung Sudibyo P,  
Intan Lidwina,  
Erieka Nurlidya,  
Tiara Kharisma

**Fotografer:**

Muhamad Dullah  
Lukman Nul Hakim

**Desain Grafis:**

Aswin Budiarto  
Wahyu Setyo Budi

**Sekretariat:**

Yuanita Utami,  
Krestiana Evelyn

.....  
Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Bagian Humas dan TU Pimpinan, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: [www.anri.go.id](http://www.anri.go.id), email: [humas@anri.go.id](mailto:humas@anri.go.id)

**P**residen Joko Widodo meminta izin untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Hal itu disampaikan pada acara Pidato Kenegaraan di Sidang MPR/DPR/DPD di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Ibukota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.

Pemindahan ibu kota negara ini dapat menjadi momentum perubahan paradigma penyelenggaraan kearsipan ke arah *platform* kearsipan yang lebih modern, memiliki interkoneksi pengelolaan arsip antar-instansi, serta dapat mengimplementasikan e-arsip secara komprehensif dan terintegrasi. Itu semua sebagai upaya dalam mewujudkan keberlangsungan pembangunan peradaban bangsa.

Pada tema kali ini majalah ARSIP mengangkat tema Menyongsong Kearsipan Modern di Ibu Kota Negara Baru. Kami sajikan pula Rubrik Khazanah, Rubrik Daerah, Rubrik Mancanegara, Rubrik Hukum, Rubrik Varia, Rubrik Cerita Kita dan Rubrik Liputan mengenai berita-berita kearsipan menjadi pelengkap pada edisi kali ini.

Akhirnya, semoga sajian informasi edisi kali ini, dapat memberikan manfaat bagi Sahabat Arsip. Sekiranya terdapat berbagai kekurangan, kami sangat berharap memperoleh saran dan kritik untuk perbaikan edisi selanjutnya.

Salam Redaksi





LAPORAN UTAMA

INSPIRASI KEPULAUAN NUSANTARA

BALIKAPAN BAY

# NEGARA RIMBA NUSA

## EXEMPLARY FOREST+ARCHIPELAGO CITY TRANSFORMASI PERADABAN BANGSA INDONESIA

ISTANA INDONESIA RAYA



NAAMINE COASTAL POND  
Riad dan perikanan  
Akuatasi Outer West  
Water

SEA PORT  
Jales dan laut keibu  
kota

ZONE  
CAR FREE  
Zona prioritas  
perdagangan

MUSEUM  
PERJUANGAN  
INDONESIA

# MENYONGSONG KEARSIPAN MODERN DI IBU KOTA NEGARA BARU

*"Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya", .*

Itulah salah satu kutipan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia. Hal itu disampaikan pada Sidang MPR/DPD di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Menurut Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers yang digelar pada 26 Agustus 2019 menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang melatarbelakangi pemindahan ibu kota negara di antaranya beban Pulau Jawa sudah terlalu berat dengan penduduk yang telah mencapai 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia.

Ditambah dengan posisi Jawa sebagai sumber ketahanan pangan.

"Beban ini akan semakin berat jika ibu kota pemerintahan pindahanya tetap di Pulau Jawa," ungkap Jokowi. Selain itu, Jokowi menambahkan bahwa pada saat ini beban Jakarta sebagai ibu kota sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, hingga pusat perdagangan dan jasa. Lokasi bandara dan pelabuhan terbesar di Indonesia juga berada di Jakarta.

Presiden pun telah mengumumkan bahwa ibu kota baru akan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Melalui serangkaian kajian selama tiga tahun terakhir, Presiden menetapkan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru.

"Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," ujarnya di Istana Negara pada Senin, 26 Agustus 2019.

Ada sejumlah alasan yang mendasari pemerintah untuk memutuskan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia. Kepala Negara, dalam keterangannya, kemudian menjelaskan alasan pemilihan provinsi tersebut.

"Satu, risiko bencana minimal baik



**Presiden Joko Widodo membacakan pidato pertamanya untuk masa jabatan kedua dalam sidang Paripurna MPR RI (20/10/2019)**

bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor,” ucapnya.

Selain dianggap minim risiko bencana, lokasi Kalimantan Timur yang berada di tengah-tengah Indonesia juga menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah. Hal itu menjadi alasan kedua pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru yang memang bertujuan untuk pemerataan ekonomi ke wilayah Indonesia Timur.

Adapun yang ketiga, Presiden mengatakan bahwa lokasi yang telah ditetapkan tersebut berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang.

“Yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda,” tuturnya.

Selain itu, infrastruktur yang relatif telah tersedia dan kepemilikan lahan pemerintah seluas kurang lebih 180 ribu hektare juga menjadi pertimbangan dipilihnya provinsi tersebut.

“Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Yang

kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare,” kata Presiden.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa proses pembangunan lokasi IKN baru terbagi menjadi tiga kluster proses persiapan dan pembangunan. Pertama, untuk desain kawasan dan tata ruang ibu kota baru ditargetkan selesai hingga pertengahan tahun 2020.

Kedua, untuk prasarana dasar seperti jalan, bendungan, instalasi pengolahan air, dan sanitasi akan dilakukan desainnya mulai sekarang, sampai pertengahan tahun 2020 akan dimulai pembangunannya fisiknya (*groundbreaking*) karena lokasinya sudah ada.

“Proses *design and build* sama seperti yang dilakukan saat merenovasi Gelora Bung Karno (GBK), sehingga dengan inovasi tersebut dapat dilakukan dengan cepat,” ungkap Menteri Basuki.

Ketiga, akan dilakukan pembangunan gedung-gedung pusat pemerintahan. Menurutnya,

pembangunan gedung pemerintahan butuh desain dan arsitektural yang sangat baik sehingga harus lebih hati-hati dalam merencananya.

Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini diperkirakan akan memakan waktu hingga empat tahun dengan biaya Rp 466 triliun dimana 19 persen akan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), itu pun terutama berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kemudian konstruksi pembangunan infrastruktur diperkirakan butuh waktu 3-4 tahun yakni untuk penyediaan jalan, air, waduk, sanitasi dan gedung-gedung. Sehingga target 2024 kita sudah dapat memulai pergerakan ke IKN baru.

“Anggaran APBN yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur merupakan anggaran *multiyears* sehingga tidak dialokasikan sekaligus dalam satu tahun APBN berjalan,” terang Menteri Basuki.

Menteri PUPR menambahkan, sesuai instruksi Presiden Jokowi maka dalam pembangunan IKN baru, Pemerintah akan mengacu pada prinsip-prinsip kelestarian lingkungan sesuai konsep *city in the forest*.

Hal itu disebabkan pembangunan IKN akan menjadi perhatian dunia karena IKN baru dibangun di Kalimantan yang merupakan paru-paru dunia. “Kita pastikan akan membangun *smart and forest city*. Kita tidak akan merusak heart of Borneo,” kata Menteri Basuki.

Basuki menambahkan bahwa

terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam mendesain dan membangun IKN baru. Pertama, IKN baru harus mencerminkan identitas bangsa yang diterjemahkan dalam urban design secara filosofis dari pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedua, IKN baru harus menunjukkan keberlanjutan kehidupan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Karena itu, konsep pembangunan IKN baru meminimalisir intervensi terhadap alam, mengintegrasikan ruang-ruang hijau serta biru dan mempertahankan keberadaan hutan Kalimantan atau *City in the Forest*.

Ketiga, IKN merupakan kota yang cerdas dan modern berstandar internasional. IKN baru menjadi kota yang *compact*, mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

“Dalam pembangunan IKN juga harus memperhatikan penataan bangunan dan lingkungan yang *compact* dan inklusif, moda transportasi publik yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas kerja, serta kolaborasi antara arsitektur modern dengan kearifan lokal,” jelas Menteri Basuki.

Kementerian PUPR juga telah menyelenggarakan sayembara desain Kawasan Ibu Kota Negara. Dewan Juri telah memutuskan bahwa desain bertema “Nagara Rimba Nusantara” sebagai juara 1 pemenang sayembara. Sedangkan juara ke-2 dengan desain bertema “*The Infinite City*”. Juara ke-3 yakni desain bertema “Kota Seribu Galur”. Dua finalis lainnya



Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR/ www.pu.go.id

**Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono**

mendapatkan gelar juara harapan I dan harapan II. Desain bertema “Zamrud Khatulistiwa” ditetapkan sebagai juara harapan I. Sedangkan harapan II adalah desain bertema “Benua Rakyat Nusantara”.

Terkait regulasi pemindahan IKN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) sedang menyusun payung hukum sebagai dasar pelaksanaan pemindahan IKN. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang direncanakan pada 2024 membutuhkan pendekatan *Omnibus Law* demi memastikan kesesuaian peraturan perundang-undangan. *Omnibus Law* adalah strategi penataan regulasi yang dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan beberapa regulasi atau pasal, baik pada level undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan menteri.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, berdasarkan hasil



www.bappenas.go.id

**Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa**

pemetaan Kementerian Dalam Negeri, setidaknya terdapat sekitar 43 peraturan perundang-undangan yang perlu direvisi atau dicabut terkait pemindahan IKN. Dari 43 regulasi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas memetakan empat belas undang-undang yang terkait dengan: (1) pengaturan kedudukan IKN; (2) batas dan wilayah; (3) bentuk dan susunan pemerintahan; (4) kawasan khusus pusat pemerintahan; (5) penataan ruang; serta (6) lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Hasil pemetaan tersebut akan kemudian dianalisis untuk melihat kemungkinan dilakukannya pendekatan *Omnibus Law*.

“Presiden sudah mengingatkan kita bahwa 2024 harus sudah dipindahkan zona pemerintahan sehingga perlu disiapkan regulasi hukumnya. Berkaitan dengan itu, salah satu terobosan yang kita lakukan ialah *Omnibus Law*. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang harus diubah, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan yang sudah

## LAPORAN UTAMA

berhasil diidentifikasi Bappenas terkait IKN ini ada 43 regulasi. Sebanyak 43 regulasi itu menyangkut pengaturan kedudukan IKN, batas dan wilayah, bentuk dan susunan pemerintahan, kawasan khusus pusat pemerintahan, penataan ruang lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana,” ujar Menteri Suharso dalam Lokakarya: “Penerapan *Omnibus Law* Untuk Mendukung Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Berbasis *Evidence Based Policy*” yang dilaksanakan di Jakarta, Jumat (29/11).

Menteri Suharso menyebutkan, pemindahan IKN bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan sehingga perlu mempersiapkan segala sesuatu yang terkait peraturan perundang-undangan, mengingat dampak pemindahan IKN bukan untuk jangka pendek namun jangka panjang. Penyampaian usulan rancangan undang-undang IKN sebagai prioritas kepada Kementerian Hukum dan HAM c.q Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah dilakukan pada November 2019. Pertemuan Panitia Antar Kementerian (PAK) Rancangan Perpres Badan Otorita Persiapan, Pemindahan, dan Pembangunan IKN pada November 2019, dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menteri Hukum dan HAM. Izin Prakarsa Rancangan Perpres Badan Otorita tersebut telah dikirimkan kepada Presiden RI melalui Sekretariat Negara.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan Komisi II DPR RI, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, M. Taufik menyampaikan harapannya agar dalam rancangan undang-undang pemindahan



Plt. Kepala ANRI, M. Taufik

IKN dapat memasukan pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan di IKN Baru. M. Taufik sangat mendukung pemindahan IKN dan memiliki sebuah mimpi besar dalam membangun keberlanjutan peradaban bangsa. “Kami memiliki *the big dream* yakni ingin membangun keberlangsungan peradaban bangsa melalui pembangunan Plaza Memori Kolektif Bangsa (PMKB) yang menyajikan arsip tentang memori kolektif dan jati diri bangsa”, ungkapnya.

Plaza Memori Kolektif Bangsa tersebut akan menjadi beranda depan bangsa dan negara Indonesia di mana masyarakat dapat memperoleh pemahaman tentang identitas dan sejarah peradaban Bangsa Indonesia secara langsung dari sumber informasi yang autentik dan terpercaya. “PMKB juga akan menjadi ruang interaktif antar-komponen bangsa dalam upaya menjadikan arsip sebagai bahan kontemplasi untuk menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. Pembangunan PMKB meliputi pembangunan *Presidential Archives*, *Parliamentary Archives*, *Judicial*

*Archives*, dan Ruang Komunitas Sosial Kearsipan”, papar Plt. Kepala ANRI, M. Taufik.

ANRI sendiri telah menyiapkan berbagai kajian dan riset mendalam mengenai implikasi pemindahan IKN terhadap penyelenggaraan kearsipan. Setidaknya ada dua hal yang perlu disiapkan dalam transisi perpindahan IKN dalam konteks penyelenggaraan kearsipan, yakni pengelolaan arsip di IKN Lama (Jakarta) dan Pengelolaan Arsip di IKN Baru.

Pertama, Pengelolaan Arsip di IKN Lama yakni di Jakarta. Menjelang perpindahan ke IKN baru, arsip instansi pemerintah akan ditangani secara khusus agar arsip tidak menjadi beban dan masalah di kelak kemudian hari. Situasi ideal yang diharapkan pada saat perpindahan IKN, yakni pertama bahwa arsip yang masih digunakan untuk pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari akan tersedia secara digital termasuk untuk arsip yang format dan medianya non-digital. Dalam hal ini perlu dilakukan digitalisasi terhadap arsip dimaksud.

Kedua, arsip instansi yang frekuensi penggunaannya telah menurun karena tidak lagi dipergunakan secara langsung dalam pelaksanaan tugas pemerintahan (“arsip inaktif”) juga akan tersedia secara digital. Digitalisasi akan dilakukan secara massal dengan volume arsip yang luar biasa besar.

Ketiga, arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan sudah diserahkan instansi ke ANRI. Keempat, arsip yang tidak lagi memiliki nilai guna harus sudah dimusnahkan. Terakhir, arsip instansi pemerintah yang harus tetap dipelihara secara konvensional dalam format dan media non-digital akan dikelola secara terpusat oleh ANRI di



**Konsep desain pembangunan gedung Arsip Nasional Republik Indonesia di Ibu Kota Negara Baru**

IKN lama. Arsip tersebut tidak perlu secara fisik dibawa ke IKN baru karena pertimbangan keselamatan arsip dan biaya pemindahan yang mahal. Akses terhadap arsip dimaksud dapat dilakukan secara digital oleh instansi penciptanya secara aman, tepat, dan cepat melalui sistem e-Arsip.

Kemudian untuk pengelolaan arsip di IKN baru. Pengelolaan arsip di IKN baru akan berlangsung secara digital dengan menggunakan *platform* baru e-Arsip yang dibangun dari keterhubungan pengelolaan arsip antar-instansi dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Oleh karenanya sistem akan memiliki pusat arsip digital (*digital records center*) dan repositori arsip statis digital (*digital archives*

*repository*) yang berisikan arsip dari seluruh instansi pemerintah.

Dengan arsitektur seperti itu akan dimungkinkan dilakukannya bagi pakai arsip antar-instansi bahkan penggunaan oleh masyarakat melalui sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional. Pengoperasian sistem e-Arsip akan dikendalikan oleh pusat kendali untuk menjamin sistem berjalan secara andal agar arsip yang dikelolanya terpercaya dan terjaga autentisitasnya.

Sedangkan untuk “arsip inaktif” yang harus diciptakan dan dipelihara secara konvensional dalam format dan media non-digital akan diterapkan sistem penyimpanan arsip secara terpusat oleh ANRI. Penerapan

sistem penyimpanan arsip inaktif secara terpusat oleh ANRI akan menekan kebutuhan sumber daya yang signifikan apabila dibandingkan dengan pendekatan penyimpanan arsip inaktif secara mandiri oleh masing-masing instansi.

Dengan demikian, pemindahan ibu kota negara ini dapat menjadi momentum perubahan paradigma penyelenggaraan kearsipan ke arah *platform* kearsipan yang lebih modern, memiliki interkoneksi pengelolaan arsip antar-instansi, serta dapat mengimplementasikan e-arsip secara komprehensif dan terintegrasi. Itu semua sebagai upaya dalam mewujudkan keberlangsungan pembangunan peradaban bangsa, Indonesia Raya! (is)

Bayu Tanoyo :

## PARADIGM SHIFT:

# KONSEP PENGEMBANGAN KONSERVASI ARSIP DALAM MENDUKUNG IBU KOTA NEGARA BARU

**P**erkembangan era informasi dewasa ini begitu pesat. Laju yang begitu cepat seiring tuntunan zaman dan keterbukaan informasi mau tidak mau mewajibkan kita untuk terus berlomba di dalamnya. Ditambah dengan adanya persaingan global dan antar negara semakin mewajibkan kita untuk siap turut serta dalam tantangan tersebut terutama memasuki era disrupsi informasi. Era disrupsi yang dimaksud adalah dalam konteks memanfaatkan sumber daya untuk mendukung aktivitas ke dalam daring (*online*).

Dewasa ini di Indonesia tengah beredar luas informasi bahwa akan adanya pembentukan Ibu kota Negara baru (selanjutnya disingkat IKN) sebagai jawaban atas permasalahan yang tengah larut dewasa ini, terutama pada masalah lingkungan dan over-populasi yang ada di Jakarta. Presiden Joko Widodo langsung memberikan pidato kenegaraannya dan memproklamkan ibu kota baru yang berada di Kalimantan tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Rencana pemindahan IKN ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 [Bappenas RI]. Penentuan wilayah tersebut tentu didasarkan dengan pertimbangan seperti kecilnya risiko bencana alam di wilayah tersebut, dekat dengan kota yang sudah berkembang (Balikpapan dan

Samarinda), infrastruktur yang relatif lengkap dan adanya 180 hektar tanah yang dikuasai oleh pemerintah. Beberapa negara di dunia telah mengaplikasikan mengenai konsep IKN.

Diharapkan dengan adanya IKN baru ini mampu menjadi *problem solving* yang mendera sejumlah Negara. Selain itu perlu adanya kesinambungan dan berkelanjutan guna meningkatkan SDM, kinerja dan taraf hidup masyarakat.

Tak pelak informasi tersebut memaksa instansi dan kementerian/ lembaga untuk ikut menyesuaikan atas kinerja yang ada di pemerintahan. Pemerintah pun akhirnya menelurkan suatu gagasan dan konsep IKN baru dengan nama “Nagara Rimba Nusa” Suatu konsep yang menggabungkan harmonisasi alam dengan modernisasi.

Salah satu kementerian yang terimbas akan adanya IKN baru adalah

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Lembaga ini berkecimpung pada permasalahan arsip dan dokumen negara. Pasalnya lembaga ini berada di wilayah pemerintahan pusat dan seiring berjalannya waktu maka lembaga ini perlu melakukan persiapan dalam mendukung IKN baru tersebut. Sejujurnya momentum IKN baru ini amat sangat positif terutama dalam cara berpikir dan memandang arsip (*paradigm shift*). Konteks arsip yang selama ini berkuat pada permasalahan fisik mampu digeser menjadi perspektif yang lebih berkembang. Tentunya cara berpikir ini wajib didukung oleh semua pihak terutama para *stakeholder* yang berwenang demi hasil yang optimal. Tidak hanya itu, program ini dititikberatkan pada komitmen yang kuat dan stabilitas program percepatan digitalisasi guna mendukung program tersebut. Pada pembahasan kali ini adalah perspektif konservasi, dimana konservasi

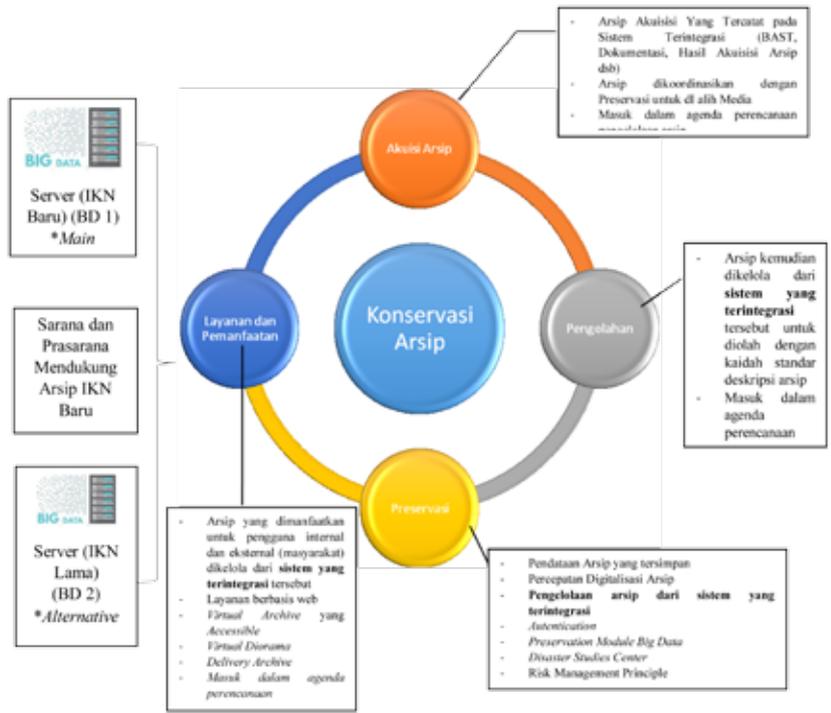
No.	Negara	Ibukota Negara Lama	Ibukota Negara Baru
1.	Amerika Serikat	Philadelphia, Baltimore, Lancaster, Princeton, Annapolis, Trenton, York dan New York.	Washington DC
2.	Brazil	Rio de Janeiro	Brasilia
3.	India	Kolkata	New Delhi
4.	Malaysia	Kuala Lumpur	Putrajaya
5.	Australia	Melbourne	Canberra

(dikumpulkan dari berbagai sumber, 2020)

Beberapa negara di dunia yang telah mengaplikasikan mengenai konsep IKN



(Gambar Konsep Ibu Kota Negara Baru-Nagara Rimba Nusantara, sumber : Kemen-PUPR)



(Gambar Konsep Desain Konservasi di era disrupsi informasi mendukung IKN Baru)

yang mendukung pemerintah 10-20 tahun yang akan datang. Konservasi arsip sebagai salah satu jantung dari keberadaan lembaga kearsipan perlu berbenah diri agar mampu menjawab tantangan di masa depan. Perspektif yang memandang bukan hanya sebagai tumpukan berkas dan sebagainya melainkan perspektif

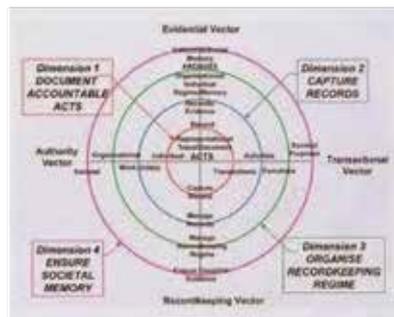
arsip sebagai sumber informasi yang bernilai. Penekanannya lebih kepada materi dan konten dari arsip yang mampu dipergunakan sejumlah pihak yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan teknologi tentu menjadi jawaban atas permasalahan ini di era disrupsi dewasa ini. Mekanisme yang

mudah dengan tetap menjaga esensial informasi arsip menjadi perspektif kita sebagai lembaga pembina kearsipan. Terlebih bilamana *think of future* berbasis *Artificial Intelligence* dan *Accessibility*, baik itu sepenuhnya dengan mekanisme otomasi dan robotik maupun bersifat *hybrid*. Melihat pada teori kearsipan terutama *Record Continuum Management* dan *Lifecycle of Archive* maka mampu kita implementasikan sebagai bentuk dukungan pada IKN baru.

Pemanfaatan teknologi ini tentu akan mempermudah dan membantu pengguna sebagai tujuan kita sehingga pemaksimalan terhadap isi informasi dalam arsip dapat dilakukan, baik itu untuk pengawasan, pendidikan hingga pada penelitian yang membutuhkan informasi yang valid dengan lembaga yang kompeten. Lingkup konservasi arsip bila mengacu pada SOTK ANRI (Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2020) maka terdapat beberapa unit atau bagian seperti akuisisi, pengolahan, preservasi dan pemanfaatan. Kesinambungan kinerja tentu dibutuhkan demi terlaksananya informasi arsip yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan keberadaan lembaga ini mampu menciptakan atmosfer baru dalam pengelolaan arsip yang lebih efektif dan efisien.

Pada gambar konsep desain konservasi arsip di era disrupsi informasi mendukung IKN Baru dapat dideskripsikan sebagai berikut: pertama, aplikasi yang mapan dan *sustainable* dengan dukungan sarana dan prasarana dalam hal ini sebagai modal utamanya jaringan dan *big server* yang terbagi atas 2 bagian besar primer (IKN baru) dan sekunder (IKN lama).

Kedua, pada akuisisi kemudian mencatat pada aplikasi terintegrasi dari keseluruhan pekerjaan yang dilakukan beserta arsip yang diterima. Koordinasi juga dilakukan pada unit preservasi untuk mempersiapkan



(1)



(2)

Gambar Model Records Continuum Management (1) dan Lifecycle of Archive (2)

perencanaan dan digitalisasi.

Ketiga, pada pengolahan mengatur catatan dari akuisisi dan mengolah informasinya yang diperoleh dari aplikasi yang terintegrasi didasarkan pada kaidah standar deskripsi arsip.

Keempat, preservasi menjadi ujung tombak dalam menginisiasi dan implementasi digitalisasi Arsip dari aplikasi terintegrasi dengan tidak mengesampingkan arsip yang berada di Depot ANRI. Tentu hal ini perlu didukung dengan penyimpanan digital, pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) digital, prosedur autentifikasi dan penerapan manajemen risiko di tiap level.

Kelima, pemanfaatan dan layanan mengadopsi pekerjaan dari keseluruhan pekerjaan akuisisi, pengolahan, dan menyesuaikan dengan unit Preservasi. Barang tentu juga pentingnya mengontrol penggunaan dan pemanfaatan oleh masyarakat. Bila dimungkinkan setiap pemakai teregistrasi sehingga mempersempit *loss control* dari kondisi yang tidak terkontrol.

Mengutip dari konsep organisasi yang efektif dengan berbasis kinerja dari Mark G. Popovich (dalam LAN, 2004 : 16) maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

Pertama, *Consistent and Sustained Leadership*. Kedua, *Willingness to Develop Performance Measures*. Ketiga, *Willingness to Change Whole Organizations*. Keempat, *Willingness to Allocate Resources to Continues Learning*.

Perluasan dari konsep tersebut maka ada beberapa unsur dan elemen yang mampu dijabarkan sebagai gambaran dari konservasi arsip guna menuju konservasi yang lebih berdaya guna terutama IKN Baru. Adanya konsistensi dan berkelanjutan dari kepemimpinan organisasi menjadi elemen pertama dalam meningkatkan kualitas organisasi. Mengacu dari pendapat Popovich dalam hal konsistensi dan paradigma berkelanjutan dari pimpinan yang lebih fleksibel dan selalu menuju arah perkembangan yang positif, berdaya guna, efektif dan efisien, Hal tersebut senada pendapat dari Toorney (2016) "*digital leadership are concept of leadership to the paradigm shift of the digital era and defines digital leadership as follows. It is the capability of (business) leaders to identify and realize opportunity for (business) growth and value through effective, efficient and acceptable use of Digital Technologies (IT).*" Point penting yang disebutkan Toomey adalah kemampuan pemimpin untuk dapat

mengidentifikasi dan merealisasikan peluang untuk mengembangkan bisnis melalui penggunaan teknologi digital yang efektif dan efisien. Dapat pula diinterpretasikan pada penekanan pemimpin yang memiliki semangat, paradigma dan jiwa kepemimpinan digital (*digital leadership*).

Elemen berikutnya adalah ketersediaan adanya pengembangan kinerja yang terukur. Pengukuran kinerja menjadi poin penting selanjutnya untuk dapat mengukur standar dan ukuran baku suatu pekerjaan. Penguatan sinergitas ukuran kinerja yang baku dan standardisasi, sehingga roda organisasi berjalan baik terutama dengan tersedianya aplikasi yang terintegrasi disertai dengan penyederhanaan alur kerja berstandar. Pada era teknologi digital yang telah mendunia, organisasi pemerintah perlu mengembangkan diri agar dapat mengedepankan pelayanan cepat dan prima untuk *stakeholder*. Pelayanan satu pintu yang kini telah banyak diadaptasi oleh organisasi pemerintah lain perlu dijadikan acuan untuk pengembangan sistem yang dapat diaplikasikan pada ANRI dalam menyongsong IKN Baru. Jika konsep pelayanan tersebut dapat diterapkan, diharapkan akan mempermudah *stakeholder* dan pengguna lainnya mengakses layanan yang disediakan ANRI, konsep layanan terpadu satu pintu yang diaplikasikan melalui web misalnya, dapat memudahkan pengguna untuk memanfaatkan pelayanan tanpa dibatasi ruang dan waktu, ini pun dapat berimbas pada peningkatan kredibilitas organisasi.

Sumber daya manusia yang kompeten dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dalam menyongsong era teknologi digital perlu diperhatikan dengan seksama. Pemetaan sumber daya manusia sesuai dengan umur, pendidikan terakhir dan keahlian perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsi pekerjaan. Berkaitan dengan hal



**Hubungan relativitas pada Revolusi Industri 4.0, <https://www.capgemini.com>.  
Diakses pada 25 Juli 2020**

tersebut peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia untuk menunjang kinerja organisasi perlu mendapatkan perhatian secara menyeluruh, pemetaan lebih lanjut pegawai yang perlu mendapatkan pembelajaran dievaluasi untuk dapat ditindaklanjuti demi tercapainya tujuan organisasi. Dalam hal ini entitas dalam organisasi turut menghidupkan atmosfer yang sama sehingga tujuan menjadi tercapai.

Selain hal-hal di atas, juga disempurnakan dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas serta berorientasi pada konten informasi dan optimalisasi produk digital (*Digital Data/Information Oriented*). Sistem aplikasi yang stabil dengan pembaharuan hanya pada pembaharuan fitur tidak merusak fundamental atau struktur basis. Secara komprehensif juga perlu diimbangi dengan kemudahan sistem *back up* sehingga bilamana terjadi bencana akan selalu dapat tetap melindungi isi informasi di dalamnya. Infrastruktur yang berkelanjutan dan berdaya guna juga menjadi elemen tambahan dalam penyempurnaan sistem kearsipan yang modern. Tujuan hilirnya adalah penciptaan pelayanan

yang mampu dikombinasikan antara lembaga dan masyarakat, dengan menitikberatkan kecepatan informasi serta penyediaan data, diseminasi yang lebih luas dan optimal.

Kondisi yang demikian kita dapat berkaca pada beberapa negara seperti Australia, Kanada, New Zealand maupun negara lainnya yang telah menerapkan pola dan konsep digital yang lebih mapan.

Keseluruhan aspek tersebut mulai dari konsep, penyediaan sarana dan prasarana hingga pada kepemimpinan digital tersebut menjadi satu-kesatuan utuh dalam mewujudkan kearsipan yang modern hingga mewujudkan *digital society* di Indonesia.

Dengan demikian bila mana kita mengacu pada pola kesinambungan (konteks arsip) antara IKN lama dengan IKN baru adalah IKN lama tetap menjaga posisi seperti yang terdapat pada sekarang dengan melestarikan fisik diimbangi dengan percepatan digitalisasi arsipnya sehingga mampu menopang keberlangsungan dari sistem di IKN baru. Ditambah dengan adanya pos atau pusat kajian bencana terhadap arsip yang ada di IKN lama dan IKN baru sehingga permasalahan

pada konservasi akan mampu diselaraskan dengan tantangan. Tidak luput yang menjadi perhatian juga adalah bagaimana penerapan manajemen risiko yang berbasis pada standar internasional (ISO). Diharapkan adanya paradig shift dan perubahan konservasi yang lebih masif mampu mendorong daerah lainnya di Indonesia kegiatan konservasi lebih modern, tepat guna, efektif dan efisien serta mampu diaplikasikan. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya kesadaran masyarakat Indonesia yang memandang penting arsip dan memanfaatkan arsip dengan lebih maksimal. Selain itu sinergi antara pemerintah (baik pusat maupun daerah), akademisi, masyarakat dan bila dimungkinkan dunia usaha untuk bersama-sama membumikan arsip dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Hal ini terutama dukungan modernisasi dan percepatan penyajian informasi arsip yang kelak akan membantu masyarakat dalam pemanfaatan dan pendayagunaan arsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



Lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Raden Saleh. Sumber: <https://www.liputan6.com/regional/read/3411776/2-wajah-pangeran-diponegoro-saat-penangkapan-188-tahun-lalu>

Rini Rusyeni :

# KISAH PENANGKAPAN PANGERAN DIPONEGORO VERSI LAPORAN HENDRIK MERKUS DE KOCK

**P**ada pertengahan Maret 2020, Raja Belanda, Willem Alexander mengadakan kunjungan resmi ke Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, sang Raja Belanda selain mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, beliau juga memiliki agenda khusus yaitu mengembalikan keris pusaka milik Pangeran Diponegoro yang dirampas bersamaan dengan penangkapan sang Panglima Perang Jawa tersebut pada 28 Maret 1830. Menurut cerita yang beredar selama ini, peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro yang dilakukan oleh Letnan Gubernur Jenderal Hendrik Merkus de Kock tersebut menggunakan cara yang licik dan tidak sportif. Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang ketika sedang mengunjungi Hendrik Merkus de Kock dalam rangka memenuhi undangan sang Gubernur Jenderal

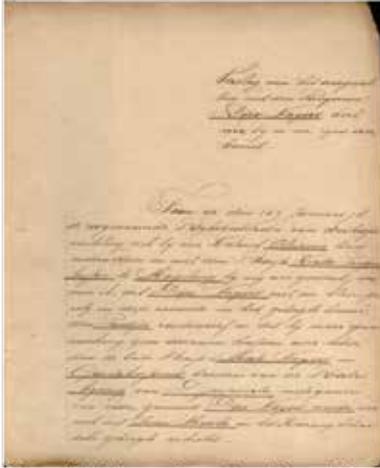
untuk melakukan perundingan damai di antara kedua belah pihak yang sedang berperang. Rangkaian penangkapan yang terekam dalam lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro yang dibuat oleh Raden Saleh, nampak jelas terlihat betapa masyarakat pribumi yang menyaksikan penangkapan tersebut sangat terpukul dan menyesali kecurangan yang dilakukan oleh para tentara Belanda. Sementara itu, Pangeran Diponegoro dilukiskan menunjukkan air muka penuh amarah dan wajah menghina kepada para tentara Belanda yang sedang menggiringnya untuk penahanan.

Lantas, bagaimana dengan cerita penangkapan Pangeran Diponegoro versi Belanda? Jawabannya dapat kita lihat dalam arsip laporan penangkapan Pangeran Diponegoro yang disusun sendiri oleh Sang

kreator penangkapan, yaitu Letnan Gubernur Jenderal Hendrik Merkus de Kock (koleksi arsip Djogja No.10-5, khazanah Arsip Nasional RI).

Laporan penangkapan Pangeran Diponegoro dibuat pada 1 April 1830, tepatnya 3 (tiga) hari setelah peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro, yaitu pada tanggal 28 Maret 1830. Dalam laporan sebanyak 36 halaman ini, De Kock menceritakan secara detail seluruh peristiwa penangkapan yang dimulai dari tanggal 16 Januari 1830, yaitu tanggal ketika bawahannya Kolonel Jan Baptist Cleerens yang bertindak sebagai utusan dari tentara Belanda berupaya untuk menghubungi pihak Pangeran Diponegoro untuk membahas 'kesepakatan damai'.

Dalam laporan ini, selain berupaya menghubungi pihak Pangeran Diponegoro, diceritakan pula dalam usahanya tersebut Kolonel Cleerens



**Arsip laporan De Kock mengenai penangkapan Pangeran Diponegoro**  
Sumber: Djogja, 10-5 (ANRI)



**Arsip laporan De Kock mengenai penangkapan Pangeran Diponegoro**  
Sumber: Djogja, 10-5 (ANRI)

juga bertindak sebagai informan yang memberikan informasi bahwa kondisi Pangeran Diponegoro pada saat itu sudah sangat tersudut. Pangeran Diponegoro diceritakan hidup berkelana dan berpindah-pindah dari satu hutan belantara ke hutan belantara lain di wilayah Jawa untuk bertahan hidup dan menghindari kejaran tentara Belanda. Dalam usahanya bertahan hidup tersebut, Pangeran Diponegoro hanya ditemani oleh putranya, salah satunya disebut dalam laporan tersebut diberi nama Diponegoro Moeda, penasihat agama, dua punakawan, dan panglimanya, Basya Mertanegara. Pangeran Diponegoro telah kehilangan banyak tentara dan beberapa panglima pemimpin perang yang handal yang selama ini telah menjadi tangan kanannya dalam berperang melawan Belanda.

Berdasarkan laporan Cleerens mengenai keadaan Diponegoro tersebut, De Kock sangat yakin bahwa pihak pangeran Diponegoro pasti mau bertemu dengan utusannya tersebut dan perundingan dapat cepat terlaksana.

Singkat cerita, Cleerens berhasil meyakinkan Pangeran Diponegoro

untuk datang memenuhi undangan De Kock ke Magelang dalam rangka 'perundingan damai' sebagaimana yang telah ditawarkan oleh De Kock. Akhirnya pada 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro datang ke Magelang untuk memenuhi undangan De Kock.

Dalam acara perundingan tersebut, Pangeran Diponegoro duduk didampingi oleh para kepala daerah dari golongan pribumi. Mereka semua duduk berhadapan dengan De Kock yang didampingi oleh Residen Kedu Valck, Letkol Roest (seorang perwira de Kock), Mayor F.V.H.A. de Stuers dan penerjemah bahasa Jawa, Kapten J.J Roefs serta para pejabat militer Belanda lainnya.

Hal yang menarik dalam pertemuan ini adalah bahwa De Kock menulis dalam laporannya:

".....pertemuan dengan Diponegoro berlangsung dengan cepat karena tidak ada hal penting apapun yang disampaikan oleh Diponegoro pada saat itu, dan saya mengatakan kepada Diponegoro bahwa sebaiknya sudah hentikan saja pertikaian ini, anda jangan kembali lagi ke tempat anda dan di sini saja, dengan begitu

perang ini akan selesai, kita sudah berperang selama hampir lima tahun, saya harap persahabatan yang telah kita jalin akan tetap terjaga selamanya, dan hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Belanda sangat adil".

Kalimat "persahabatan yang telah kita jalin" menurut saya sangat aneh untuk diucapkan oleh seorang De Kock. Apakah mengacu kepada persahabatan antara De Kock dengan Pangeran Diponegoro??

Dalam laporan ini juga, ditemukan beberapa nama yang ditulis dengan menggunakan gelar seperti, Ratoe Agung van Djocjarta, Kolonel Cleerens, dan Hadji Badarodin. Namun, gelar Diponegoro yang sebenarnya adalah seorang "pangeran dari Jogjakarta" tidak ditulis sama sekali dalam laporan sebanyak 36 halaman ini.

Dalam laporan ini sayangnya tidak diceritakan reaksi Pangeran Diponegoro secara detail, seperti yang digambarkan oleh Raden Saleh dalam lukisannya. Laporan ini hanya menceritakan bahwa suasana yang terjadi pada saat penangkapan berjalan lancar dan singkat tanpa ada hambatan apapun. Nampaknya De Kock tidak ingin menampilkan suasana kegaduhan sebagaimana yang nampak dalam lukisan Raden Saleh karena ini merupakan laporan yang ia tulis untuk atasannya, Menteri Urusan Negara Jajajahan di negeri Belanda. Ia harus melaporkan bahwa semua aksi tersebut berjalan lancar dan ia telah berhasil mengatasi kemelut yang dihadapi oleh Belanda selama hampir lima tahun belakangan. Penangkapan Pangeran Diponegoro ini merupakan sebuah prestasi besar bagi seorang De Kock.

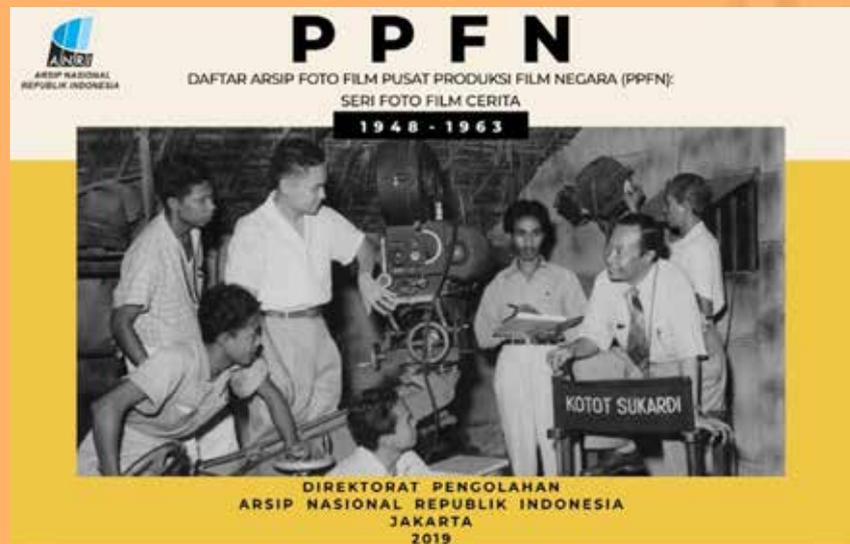
Dharwis W.U. Yacob :

## DARI ANGGREK BULAN SAMPAI DAUN EMAS:

### Perjalanan Film Indonesia dalam Daftar Arsip Foto PPFN: Seri Foto Film Cerita 1948-1963

**F**ilm atau pertama kali lebih dikenal dengan nama gambar hidup, merupakan salah satu dari produk kesenian. Gambar hidup pertama kali dipertunjukkan pada tahun 1895 di Paris, Perancis. Auguste dan Louis Lumiere adalah dua orang yang berhasil mempertunjukkan gambar hidup di sebuah cafe yang terletak di Boulevard des Capucines bernama Grand Cafe. Untuk melihat pertunjukkan gambar hidup ini orang diharuskan membayar. Pada awal abad XX, pertunjukkan itu sampai di Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Masyarakat di Hindia Belanda mulai mengenal pertunjukkan gambar hidup pertama kali pada 5 Desember 1900 ketika diadakan sebuah pertunjukkan di rumah Tuan Schwarz di daerah Tanah Abang Kebondjaje (Manage).

Film cerita pertama yang dibuat di Indonesia adalah film Loetoeng Kasaroeng. Dibuat oleh L. Heuvelcorp dan G. Krugers di Bandung pada tahun 1926 di bawah naungan Java Film Company. Film ini merupakan film cerita pertama yang dibuat di Indonesia serta menampilkan cerita rakyat daerah Priangan (Jawa Barat). Sampai tahun 1930 film yang diproduksi masih berupa film bisu. Baru pada tahun 1931 diproduksi film bicara pertama Atma de Visher arahan



Cover Daftar Arsip Foto Film Pusat Produksi Film Negara (PPFN): Seri Foto Film Cerita 1948-1963

sutradara G. Krugers

Pada tahun 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu dan diberi tugas untuk menjaga status quo Indonesia sebelum Sekutu datang. Kekosongan kekuasaan pada waktu itu, dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Kedatangan tentara Sekutu di Indonesia diboncengi oleh tentara *Nederlands Indies Civil Administration* (NICA). Belanda kemudian berusaha

merebut Indonesia kembali melalui agresi militernya yang terjadi dua kali. Terjadilah revolusi fisik di Indonesia (1945–1949) untuk mempertahankan kemerdekaan melawan tentara Belanda. Oleh karena hal itu, dunia perfilman Indonesia sejak merdeka mati suri selama 3 tahun. Beberapa kelompok sandiwara yang ada pada waktu itu keluar masuk kampung untuk memberikan hiburan kepada para pejuang sambil mengobarkan semangat berjuang. Ketika R.M. Soetarto berhasil merebut Nippon

Eigasha pada awal proklamasi dan merubahnya menjadi Berita Film Indonesia (BFI), pada tahun 1948 Belanda kemudian mengambil alih dan mengubahnya menjadi *South Pasific Film Corporation* (SPFC). Tanggal 30 Maret 1950 adalah hari bersejarah bagi dunia perfilman Indonesia. Pada tanggal ini diadakan pengambilan gambar pertama kali film *Darah dan Doa* (*The Long March of Siliwangi*) garapan Usmar Ismail dan tanggal ini dijadikan sebagai Hari Perfilman Nasional. Pada tahun ini juga Usmar Ismail mendirikan perusahaan film Indonesia pertama, yaitu Perusahaan Film Nasional (Perfini). Setahun kemudian, tepatnya tanggal 23 April 1953, berdiri Perseroan Artis Film Republik Indonesia (Persari) sebagai tempat bernaung artis film dan sandiwara. Lembaga ini dipimpin oleh Djamaluddin Malik. Djamaluddin Malik merupakan sahabat sekaligus saingan Usmar Ismail. Selain dua orang film ini, pemerintah juga turut campur tangan dalam usaha mengembangkan perfilman nasional. Salah satu usahanya adalah dengan membentuk Perusahaan Film Negara (PFN), sekarang menjadi Pusat Produksi Film Negara (PPFN). PFN menghasilkan beberapa film yang cukup penting, di antaranya: *Anggerek Bulan* atau *Anggerek Bulan* (1948), *Djauh di Mata* (1948), *Harta Karun* (1949), *Aneka Warna* (1949), *Menanti Kasih* (1949), *Gadis Desa* (1949), *Tjitra* (1949), *Dewi Murni* (1950), *Untuk Sang Merah Putih* (1950), *Inspektur Rahman* (1950), *Si Pintjang* (1951), *Djiwa Pemuda* (1951), *Sajap Memanggil* (1952), *Tenang Menanti* (1952), *Sekuntum Bunga di Tepi Danau* (1952), *Penjelundup* (1952), *Pulang* (1952), *Belunggu Masyarakat* (1953), *Meratjun Sukma* (1953), *Rentjong dan Surat* (1953), *Kembali ke Masyarakat* (1954), *Merapi* (1954), *Kopral Djono* (1954), *Si Melati* (1954), *Peristiwa di Danau Toba* (1955), *Djajaparna* (1955), *Genangan Air Mata* (1955), *Kunang-Kunang* (1957), *Ni Gowok* (1958), *Lajang-*



**Suasana proses syuting film Anggerek Bulan, 1948**  
**Sumber: ANRI, Daftar Arsip Foto Film PPFN (Pusat Produksi Film Negara): Seri Foto Film Cerita 1948-1963**



**Suasana proses syuting film Menanti Kasih, 1949**  
**Sumber: ANRI, Daftar Arsip Foto Film PPFN (Pusat Produksi Film Negara): Seri Foto Film Cerita 1948-1963**



**Dua orang kru film mengambil gambar pada pembuatan film Untuk Sang Merah Putih, 1950**  
**Sumber: ANRI, Daftar Arsip Foto Film PPFN: Seri Foto Film Cerita 1948-1963**

*Lajanku Putus* (1958), dan yang terakhir adalah *Daun Emas* (1963). Kesemuanya bisa dilihat dalam Daftar Arsip Foto Film PPFN (Pusat Produksi Film Negara): Seri Foto Film Cerita 1948-1963.

Film *Anggerek Bulan* atau *Anggerek Bulan* merupakan film bertema cinta yaitu seorang wanita bernama Kati alias *Anggerek Bulan* yang membantu seorang laki-laki bernama Subrata dalam memperkaya diri. Film *Djauh Dimata* bertema percintaan antara pasangan suami istri yang memiliki masalah, dari isu perselingkuhan hingga hidup dalam keadaan sulit

secara ekonomi. Film *Harta Karun* merupakan film drama keluarga yang fokus pada topik perjudohan. Film *Aneka Warna* merupakan film yang secara umum menceritakan perjalanan dua manusia jujur tapi bodoh yakni *Dul Kalong* dan *Mat Codot*, tergabung dalam rombongan sandiwara bernama *Aneka Warna*.

Film selanjutnya adalah *Menanti Kasih* merupakan film kisah perjalanan cinta seorang dokter bernama Husni Anwar dalam menemukan cinta sejatinya. Film *Gadis Desa* merupakan film yang memuat kisah seorang gadis desa bernama *Aisah* yang cantik jelita.

## KHAZANAH

Karena kecantikannya, Aisah dijadikan alat oleh juragan kontrakan bernama Abu Bakar. Film Tjitra merupakan film yang mengisahkan dinamika percintaan segitiga antara Harsono, Suryani, dan Sutopo. Film Dewi Murni merupakan film yang menceritakan tentang seorang gadis desa yang cantik kemudian dinikahi seorang raja. Film Untuk Sang Merah Putih merupakan film yang mengisahkan seorang tentara bernama Letnan Subandrio sekaligus seorang dokter dan pemimpin gerilya disertai kisah asmara dan solidaritas antar sesama anggota militer. Inspektur Rahman berisi tentang seorang polisi bernama Rahman yang bertugas menangkap gerombolan perampok yang ternyata salah satu anggota tersebut adalah ayahnya sendiri.

Selanjutnya adalah Film Si Pintjang merupakan film berlatar perang kemerdekaan Indonesia yang menceritakan seorang bernama Gimam terpisah dengan keluarganya. Film Djiwa Pemuda merupakan film yang menceritakan dua pemuda bernama Suria dan Karnaen yang baru saja pulang ke desa dari perang gerilya. Kisah disertai bumbu asmara karena keduanya menaruh perasaan pada gadis yang sama. Film Sajap Memanggil merupakan film penerangan tentang bagaimana proses mendidik dan melahirkan prajurit udara, baik penerbang maupun perwira teknik. Film Tenang Menanti tentang film kisah percintaan yang melibatkan drama pembunuhan antara Rusman, Luthfi, dan Lastuti. Film Sekuntum Bunga di Tepi Danau berisi tentang kisah hubungan sepasang kekasih yakni Burhan dan Yulizar yang berlatar pada masa Agresi Militer Belanda I dan II.

Film lainnya adalah Penjelundup merupakan film yang menceritakan dua orang penyelundup bernama Darmodjo dan Retno yang membantu ALRI dalam memberantas kelompok penyusup yang dipimpin oleh Kouw



**Kamerawan shooting film Sekuntum Bunga di Tepi Danau, 1952**

**Sumber: ANRI, Daftar Arsip Foto Film PPFN (Pusat Produksi Film Negara): Seri Foto Film Cerita 1948-1963**

Ling. Film Pulang merupakan film yang menceritakan pemuda desa bernama Tamin yang dipaksa masuk menjadi tentara Belanda (KNIL) sebagai juru rawat untuk memerangi bangsanya sendiri. Film Belunggu Masyarakat merupakan film mengenai kisah yang berpusat pada tindakan korupsi pegawai bernama Suparto yang tidak disetujui oleh istrinya bernama Sulastri. Film Meratjun Sukma berisi tentang seorang pria yang telah beristri bernama Hamid yang terlibat asmara dengan seorang janda bernama Suratni. Film juga dibumbui dengan drama keluarga hubungan ibu dan anak. Film Rentjong dan Surat berisi tentang bangkitnya perjuangan rakyat Aceh menentang penjajah Belanda dalam sebuah kisah fiktif yang disertai kisah cinta antara Meutia, Panglima Husin, Tjut Kemala, dan Djohan. Film Kembali ke Masyarakat merupakan film yang menceritakan seorang tentara revolusi bernama Letnan Subagio yang memiliki serangkaian masalah hidup termasuk dengan istrinya bernama Sumiati.

Film berikutnya adalah Merapi berisi tentang film yang berkisah

terkait penyelidikan Gunung Merapi oleh sekelompok orang bernama Marta, Harto, Suparto, dan Karmin ketika Gunung Merapi memperlihatkan tanda bahaya. Film Kopral Djono merupakan film yang lebih mengedepankan propaganda AURI dari suka-duka seorang kopral AU. Diselipkan pula cinta segitiga dan kilas balik masa revolusi fisik. Si Melati merupakan film yang menceritakan seorang anak bernama Melati yang kehilangan kasih sayang ibunya kemudian selalu mendapatkan penyiksaan dari ibu dan saudara tirinya. Film Peristiwa di Danau Toba berisi tentang cinta segitiga antara dua tentara bernama Syamsi dan Effendi dengan seorang perawat bernama Hasnah yang berlatar belakang pada masa perang kemerdekaan. Film Djajaprana merupakan film yang menceritakan kisah seseorang bernama Djajaprana yang menikahi Lajonsari. Drama terjadi ketika Raja Kalianget yang tidak lain adalah ayah dari Djajaprana juga menyukai Lajonsari. Film Kunang-kunang berisi tentang dua orang anak bernama Udin dan Indra yang terpisah dari keluarganya dan tersesat di Jakarta. Film Ni Gowok merupakan film yang

mengisahkan seorang wanita yang bernama Ni Gowok yang tidak kunjung bersyukur atas hidupnya. Film Lajang-Lajangku Putus merupakan film yang menggambarkan seorang pemuda bernama Amat berkeliling Indonesia dengan cara mengejar layang-layang sedangkan Film Genangan Airmata dan Daun Emas hanya berisi foto filmnya saja.

Film Anggerek Bulan atau Anggrek Bulan yang dibuat tahun 1948 merupakan film pertama A. Hamid Arief sebagai Aktor. Pada era 1970-

an, A. Hamid Arief dikenal sebagai tokoh antagonis yang dibintangi pula Benyamin Sueb dan terkenal pula dengan sinetronya di Televisi Republik Indonesia (TVRI) yaitu Rumah Masa Depan. Film Gadis Desa yang dibuat pada tahun 1949 juga merupakan debut Usmar Ismail sebagai Asisten Sutradara. Usmar Ismail kini dikenal sebagai Bapak Perfilman Nasional. Film Tjitra yang dibuat tahun 1949 juga merupakan film pertama yang disutradarai oleh Usmar Ismail namun di akhir pembuatannya, Usmar Ismail mengundurkan diri dikarenakan

ketidakpuasannya dalam menggarap film Tjitra karena sangat didominasi oleh produsernya. Usmar Ismail lebih puas dengan pembuatan film Darah dan Doa (*The Long March of Siliwangi*) dan selalu menganggap film ini adalah karya pertamanya. Film Menanti Kasih yang dibuat tahun 1949 menghasilkan lagu film yang terkenal berjudul Menanti Kasih yang dinyanyikan oleh Bing Slamet. Film Dewi Murni yang dibuat tahun 1950 merupakan film Asia Tenggara pertama kali yang diproduksi di Indonesia tapi untuk pasaran Malaysia. Seluruh aktor dan aktrisnya berasal dari Indonesia. Film Si Pintjang yang dibuat tahun 1951 merupakan film festival yang diikuti dalam festival internasional yang diperankan oleh Marlia Hardi yang terkenal pada tahun 1970-an dan 1980-an dan terkenal sebagai tokoh Bu Mar dalam Keluarga Marlia Hardi di TVRI. Marlia Hardi pernah memenangi Piala Citra untuk pemeran pembantu utama terbaik pada tahun 1967 dalam film Petir Sepandjang Malam.

Tak kalah menariknya adalah film Penjelundup yang dibuat tahun 1952. Film Penjelundup ditulis oleh Yos Sudarso yang merupakan pahlawan pembebasan Irian Barat. Begitu pula dengan Film Belunggu Masyarakat yang dibuat tahun 1953 mendapatkan penghargaan Film Festival Indonesia (FFI) tahun 1955 untuk Penata Kamera Terbaik atas nama Lie Gie San (Ali Bukhari). Terakhir adalah film Daun Emas yang diproduksi tahun 1963 yang disutradarai oleh R. Iskak yang merupakan ayah dari Indriati Iskak yang dikenal dalam film Tiga Dara dan kakek buyut dari Gary Iskak yaitu aktor film era 2000-an.

Aktor dan aktris yang namanya masuk dalam daftar arsip ini juga sangat berperan dalam perkembangan perfilman Indonesia termasuk yang sudah disebutkan diatas. Rd Sukarno atau nama lainnya Rendra Karno beberapa kali menjadi aktor utama dalam film yang dibuat oleh PPFN



Para kru film mengambil adegan Tjut Kemala, Djohan (Turino Djunaidy), Panglima Husin dan seorang wanita dalam Film Rentjong dan Surat, 1953  
Sumber: ANRI, Daftar Arsip Foto Film PPFN (Pusat Produksi Film Negara): Seri Foto Film Cerita 1948-1963



**Beberapa orang kru film mengambil adegan di perahu bercadik. Amat (Nurdjaja) berdiri di samping perahu dalam film *Lajang-lajangku Putus*, 1958  
Sumber: ANRI, Daftar Arsip Foto Film PPFN: Seri Foto Film Cerita 1948-196**

seperti Film *Anggerek Bulan* atau *Anggrek Bulan*, *Harta Karun*, *Tjitra*, *Djiwa Pemuda*, *Penyelundup*, *Kopral Djono*. Hampir seluruh film dibintangi di masa tahun 1948 sampai tahun 1950-an. Selain itu pula ada *Chatir Harro* yang juga beberapa kali menjadi aktor utama dalam film yang dibuat oleh PPFN seperti Film *Menanti Kasih*, *Untuk Sang Merah Putih*, dan *Inspektur Rahman*. *Chatir Harro* kerap berperan di film bertemakan percintaan di tahun 1940-an dan 1950-an. Selain aktor-aktornya, aktris-aktisnya juga tidak kalah. *Nila Djuwita* merupakan aktris cantik di tahun 1940-an dan 1950-an beberapa kali menjadi aktris utama dalam film yang dibuat oleh PPFN seperti Film *Anggerek Bulan* atau *Anggrek Bulan*, *Menanti Kasih*, dan *Tjitra*. Selain itu pula, *Lies Noor* beberapa kali juga menjadi aktris utama dalam film yang dibuat oleh PPFN seperti Film *Pulang dan Rentjong* dan *Surat* yang merupakan aktris muda yang populer di zamannya. Beberapa aktris yang juga ikut dalam produksi PPFN seperti

*Nana Mayo*, *Dhalia*, *Sofia WD*, *Wolly Sutinah*, *Risa Umami*, dan *Ratna Asmara*. Deretan sutradaranya pun juga tidak kalah kawakan dengan aktor-aktisnya. Selain *Usmar Ismail* yang menyutradarai film *Tjitra* dan *Harta Karun*, ada pula *Kotot Sukardi* yang menyutradarai Film *Si Pitjang*, *Djajaprana*, *Ni Gowok*, dan *Lajang-lajangku Putus*. Tak lupa *Andjar Asmara* yang merupakan sutradara kawakan di era 1940-an yang menyutradarai film *Anggerek Bulan* atau *Anggrek Bulan*, *Djauh di Mata*, dan *Gadis Desa* dan juga *R. Iskak* yang menyutradarai film *Penjelundup* dan *Daun Emas*. Selain itu pula, *Wim Umboh* juga menyutradarai film *Kunang-Kunang*. *Wim Umboh* sendiri justru mulai terkenal dengan filmnya pada tahun 1970-an dan 1980-an.

Arsip Foto Film PPFN: Seri Foto Film Cerita 1948-1963 merupakan hasil produksi PPFN dari tahun 1948 sampai dengan 1963 yang mencapai kejayaannya ketika film ini diputar di bioskop-bioskop sekitar tahun 1950

sampai dengan 1960-an. Arsip Foto Film PPFN: Seri Foto Film Cerita 1948-1963 tersebut diserahkan ke ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) dengan Berita Acara Nomor: A.318/PPFN/VIII/1981 tentang Berita Serah Terima Penyerahan Arsip Foto Film PPFN pada tanggal 8 Agustus 1981 di Jakarta. Arsip tersebut diserahkan secara langsung oleh Bapak G. Dwipayana selaku Direktur PPFN kepada Ibu Soemartini selaku Kepala ANRI (1971-1992). Direktorat Pengolahan mengolah Arsip Foto Film: Seri Foto Film Cerita 1948-1963 yang diolah dalam media foto dengan berbagai ukuran dengan jumlah arsip foto yang diolah sebanyak 4349 lembar.

Keberadaan arsip statis di ANRI, terutama Arsip foto seperti Arsip Foto Film PPFN: Seri Foto Film Cerita 1948-1963 harus diidentifikasi, diregistrasi, diolah, dan dibuatkan finding aids (sarana bantu penemuan kembali arsip) agar dapat disajikan dan diakses oleh pengguna arsip terutama masyarakat yang mencintai perfilman Indonesia. Dengan adanya Daftar Arsip Foto Film Pusat Produksi Film Negara (PPFN): Seri Foto Film Cerita 1948-1963, sejarah perfilman Indonesia semakin terbuka sehingga memberikan gambaran bagaimana perkembangan film Indonesia baik di negerinya sendiri maupun di dunia internasional. Foto-fotonya pun tidak hanya berisi adegan dalam film melainkan juga di balik pembuatan filmnya dan juga beberapa poster filmnya sehingga nantinya bisa dipelajari oleh masyarakat yang berminat di bidang perfilman. Akhirnya dengan adanya Daftar Arsip ini mampu menguk sejarah perfilman Indonesia lebih banyak lagi sehingga mampu dipelajari oleh generasi-generasi mendatang.

Jajang Nurjaman

# DARI AMBOINA KE BATAVIA: KISAH VOC Mencari Ibu Kota

*Seggelum Urbis Bataviae:  
30 Mei 1619*

*Tuak nira  
Arak Cina  
Menggelitik tenggorokan  
Dan memanaskan urat darah  
Para pesinggah  
Di pelabuhan Sunda Calapa.*

*Sisa uap getir asam cuka  
Menerpa wajah Mayor singa  
Dari kota Hoorn.  
Seperti singa lapar,  
Ia mengendap*

*Mengintai  
Menghitung  
Menjerat  
Dan memangsa  
Kurban dalam jemarinya yang lentik.*

*Tiap hari, sesenti demi sesenti*

*Sehasta demi sehasta  
Dengan rasa pasti  
Sang Mayor jangkung  
Menutup dan menyulap rawa Jacatra  
Menjadi Kastil Batavia.*

*Seperti singa pemalu  
Ia merayu para pesinggah, tentara, dan  
budak*

*Untuk merasakan runcing taringnya  
Setajam tumbak.*

*Darah mereka menciprati  
Tembok menara benteng Mauritius  
dan Nassau.*

*Sebagian yang mengental  
Dikirim dan dipersembahkan  
oleh sang Mayor  
Kepada leluhur orang-orang Batavier  
Di Hollandia.*

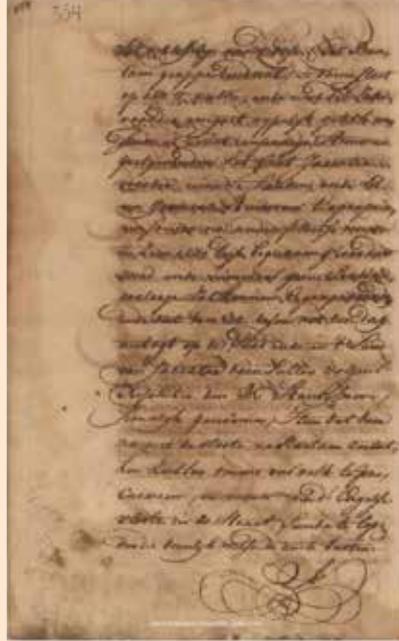
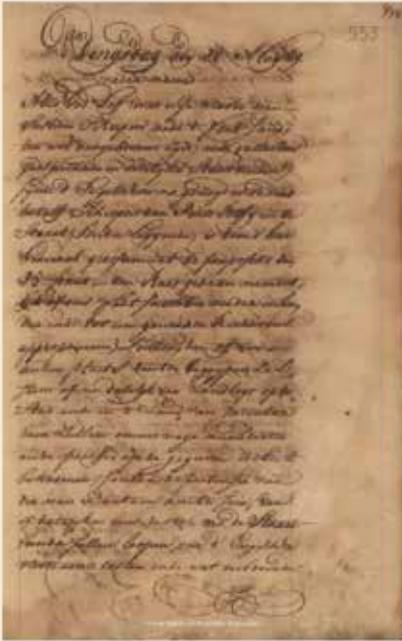
*1999  
(Zeffry J. Alkatiri, Dari Batavia Sampai  
Jakarta 1616-1999: Peristiwa Sejarah dan  
Kebudayaan Betawi-Jakarta dalam Sajak)*

Dalam sebuah puisi di atas, tergambar situasi sosial budaya Batavia Ketika Sang Mayor Jangkung, sapaan bagi Jan Pieterszoon Coen, membangun Batavia sebagai pusat pemerintahan *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC), kongsi dagang Belanda di Hindia Timur, di Asia. Tanggal 30 Mei 1619 ditasbihkan sebagai tanggal resmi penaklukan Jayakarta oleh J.P. Coen. Sesuai penaklukan, Coen kemudian membangun Batavia menjadi *rendezvous* VOC di Asia. Nama Jayakarta kemudian diubah menjadi

Batavia, sesuai rekomendasi dari Tuan-tuan XVII di Belanda. Harapan Coen memberi nama Nieuw Hoorn, tempat kelahirannya, pada wilayah Jayakarta ditolak oleh para penguasa VOC. Beberapa tahun sebelum Coen menaklukkan Jayakarta, VOC terlebih dahulu singgah di Kepulauan Maluku di Timur Nusantara. Ambon menjadi pusat pemerintahan VOC sebelum berpindah ke Batavia.

Kedatangan Belanda ke Nusantara diawali dari ekspansi pelayar Belanda dan para pedagang yang telah

dimulai sejak akhir abad ke-17. Ekspedisi pertama yang lebih dulu terjadi adalah pada saat Cornelis de Houtman dan Gerrit van Beuningen mengunjungi Banten dan kemudian ke Maluku. Ekspedisi pertama ini didanai oleh *compagnie van verre*, nama yang digunakan sebelum VOC berdiri. *Compagnie van verre* awal mulanya terdiri dari sembilan pedagang yang berlokasi di Amsterdam. Mereka memiliki modal yang cukup besar untuk diinvestasikan ke perusahaan tersebut. Namun, dana yang besar



**Resolusi final untuk menjadikan Jaccatra sebagai rendez-vous atau ibukota VOC di Asia, 28 Mei 1619.**  
**Sumber: Hoge Regering, Nomor 853, folio 553-555. <https://www.sejarah-nusantara.anri.go.id>**

masih dibutuhkan dari pedagang lain untuk mendirikan sebuah perusahaan. Maka, participant atau pemegang saham lainnya kemudian bergabung, dan menjadi inisiator dari pendirian perusahaan. Mereka inilah para direktur perusahaan tersebut.

De Houtman dan van Beuningen telah membuka gerbang ke timur. Mereka sukses menemukan rute terbaik untuk berlayar ke timur. Rute ini sebetulnya sudah ditemukan sebelumnya oleh para pelaut dan pedagang Portugis. Pelayaran pertama ke timur pertama kali tersebut tidak membawa untung yang banyak, tetapi telah membuka ide bahwa pelayaran ke Asia adalah bukan hal yang tidak mungkin. Arus kapal yang berlayar setelah pelayaran pertama ini meningkat. Dari tahun 1595 hingga 1601, jumlah kapal yang berlayar mencapai hingga 65 kapal. Pada masa itu, perjalanan ke Asia bukanlah hal yang mudah karena tingginya eskalitis bencana di laut dan juga ancaman dari bajak laut. Belum lagi banyak penyakit tropis yang menghantui para awak kapal.

Periode pelayaran antara tahun 1595 dan 1601 disebut sebagai periode “gold rush”. Kapal-kapal berangkat dari tempat berbeda di Belanda pada waktu yang sama. Banyak kapal yang pulang membawa untung, banyak pula yang tidak membawa apaapa, bahkan tidak kembali. Kabar suksesnya pelayaran tersebut cepat menyebar di kalangan pengusaha dan menyebabkan persaingan. Persaingan tersebut mengakibatkan naiknya harga beli rempah sementara harga jual rempah di Belanda mengalami penurunan karena jumlah rempah yang beredar sangat banyak. Demi mencegah lebih banyak lagi persaingan, *Staten Generaal* (Pemerintah Tertinggi di Belanda) mengajak perusahaan-perusahaan tersebut untuk membentuk sebuah perusahaan tunggal. Maka, mereka setuju membentuk VOC yang memiliki hak monopoli perdagangan dan pelayaran Belanda di Asia.

Setelah VOC terbentuk, dimulailah pengiriman kapal lebih banyak lagi ke Asia. Hak octrooi yang didapat VOC membuat VOC

menjadi pemain tunggal di Asia. Hak tersebut juga memungkinkan VOC untuk mendeklarasikan perang atas nama pemerinthan tertinggi di Belanda. VOC juga memiliki hak untuk mengadakan perjanjian dengan para penguasa lokal di Asia. Hak-hak tadi memungkinkan VOC untuk mendirikan pos-pos perdagangannya dan juga membangun benteng-bentengnya, membentuk pasukannya serta menunjuk pegawai-pegawainya sebagai administrator di Asia (Nurjaman, 2019).

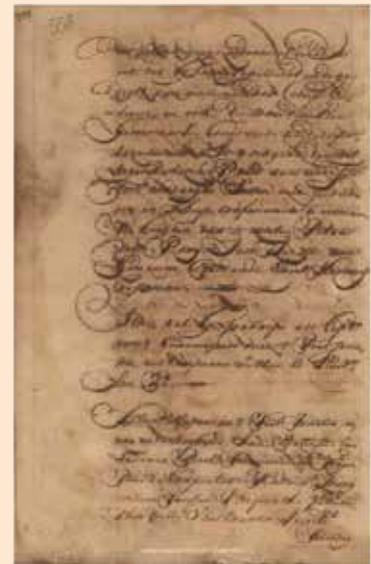
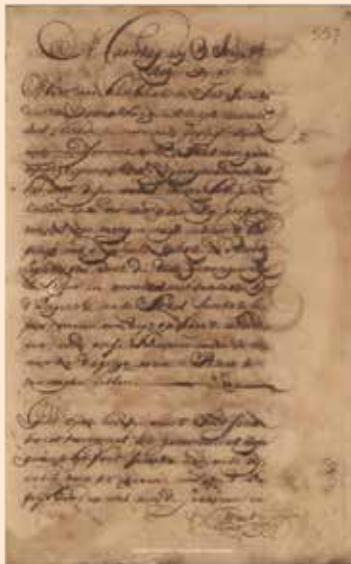
Apalagi yang membuat Belanda tertarik ke Nusantara selain rempah. Ketika itu, lada menjadi primadona dan harga jualnya juga tinggi. Banten, sebagai produsen lada, menjadi tempat pertama Ketika De Houtman datang ke Nusantara. Pelaut lainnya, yaitu Van Warwijck lanjut berlayar ke Maluku, Ambon, Ternate, dan kemudian pelaut Jacob van Heemskerck berlayar ke Banda. Tanggal 18 Desember 1603, VOC memulai pelayaran besarnya yang pertama. Dua belas kapal bersenjata di bawah komando Steven van der Haghen mendapatkan tugas

dari Tuan-tuan XVII tidak hanya untuk berdagang, namun juga untuk menyerang Portugis di Mozambik dan Goa. Namun, usaha ini kurang berhasil, sama seperti ekspedisi-ekspedisi yang selanjutnya dilakukan oleh para pelaut dan pedagang Belanda lainnya: Matelieff (1605), Van Caerden (1606) dan Verhoeff (1607). Satu-satunya hasil yang memuaskan adalah Ketika tahun 1605, Benteng Victoria di Ambon diserahkan ke Van der Haghen dari Portugis di tahun 1605. Dari sinilah VOC mulai menjadikan Ambon sebagai pusat administrasi.

### Ambon sebagai “ibu kota” VOC

Penaklukan Ambon oleh VOC sudah diijazahi ketika *Compagnie van der Verre* di tahun 1600 memulai pelayaran yang dipimpin oleh Stefan van der Haghen. Sebuah benteng kecil ketika itu dibangun di Kaitetu, di sekitar Hila. Pasukan ini membangun kastil Belanda pertama di Nusantara. Kastil ini disebut Kasteel van Verre, yang nantinya akan menjadi benteng Amsterdam. Belanda membuat perjanjian dengan penduduk lokal untuk memperdagangkan cengkeh. Mereka berhasil memonopoli perdangan cengkeh di wilayah Hila. Dengan dalih untuk melindungi warga lokal, VOC mendapatkan banyak keuntungan dengan memperjualbelikan cengkeh.

Tahun 1605, untuk kedua kalinya Van der Haghen berlayar ke kepulauan Maluku. Pada 22 Februari 1605, dia tiba di Ambon dan berhasil mengalahkan Portugis untuk kemudian menduduki Benteng Victoria. Gubernur Jenderal pertama VOC, Pieter Both (1610-1614) menjadikan Ambon sebagai tempat kedudukan Gubernur Jenderal. Artinya, segala kegiatan administrasi VOC, akan berpusat dari Ambon. Dipilihnya Ambon sebagai “ibu kota” karena Kepulauan Maluku dianggap sebagai penghasil rempah terbesar saat itu, dan juga



**Penaklukan Jacatra tanggal 30 Mei 1619 berhasil dilakukan, 3 Juni 1619. Hoge Regering Nomor 853, folio 557-558. <https://www.sejarah-nusantara.anri.go.id>**

kegagalan VOC untuk menaklukkan Makasar yang sudah terlebih dahulu membuat perjanjian dengan Inggris, Portugis, dan Spanyol. Terhitung ada tiga Gubernur Jenderal yang berkedudukan di Ambon, yaitu Pieter Both, Gerard Reynst (1614-1615), dan Laurens Reael (1615-1619). Pada masa-masa Ambon menjadi ibukota, di Belanda terjadi diskusi di rapat-rapat para penguasa VOC untuk mencari tempat yang lebih ideal. Pencarian ini didasari dari laporan Cornelis Matelieff de Jonge (1570-1632) yang setelah pulang dari pelayarannya ke Asia menuliskan laporannya tentang aspek keamanan dan politik di wilayah Asia. Ide-ide dari Matelieff ini akan membawa VOC memiliki sebuah ibu kota baru.

### Penaklukan Jacatra dan Batavia sebagai ibu kota VOC

Matelieff membawa empat buah catatan selama ia berada di Asia Ketika pulang ke tanah Belanda. Ia memberikan gambaran bagaimana keadaan geografis, dan terutama politik di Asia. Menurutnya, VOC perlu membentuk sebuah konsep *empire building* di Asia. Konsep inilah

yang diyakinkan di depan para Tuan-tuan XVII. Cornelies mempelajari bagaimana Portugis bisa sukses di Asia dengan memberikan sebuah bangunan permanen di wilayah Goa (wilayah barat India sekarang). Matelieff lalu meminta Coen untuk mendirikan sebuah pusat dagang tetap untuk memperkokoh kedudukan VOC di ranah perdagangan Intra-Asia.

Semua pertimbangan-pertimbangan pada akhirnya mencapai kesimpulan dengan tiga buah tujuan pendirian sebuah tempat tetap di Asia. Tiga tujuan tersebut adalah pertama di Asia harus ada sebuah pusat untuk mencegah fragmentasi kekuasaan, yang dipimpin oleh seorang gubernur jenderal dan sebuah dewan. Tempat tersebut haruslah menjadi tempat bertemunya kapal-kapal untuk berdagang dan juga bisa untuk membangun sebuah pemerintahan. Tujuan terakhir adalah monopoli terhadap rempah-rempah harus menjadi lebih meningkat dari sebelumnya dan juga jika dimungkinkan, dapat mengendalikan pulau-pulau di “Timur Raya”.

Penguasa VOC kemudian

## KHAZANAH

menunjuk Pieter Both sebagai gubernur jenderal pertama, dan kemudian di tahun 1610 tiba di Banten. Seperti penulis jelaskan di bagian awal, Both memilih untuk menetap di Ambon, dan menjadikan Ambon sebagai pusat pemerintahan. Proyek kedua adalah mencari sebuah tempat yang strategis untuk menjadi pusat pemerintahan sebenarnya dan menjadi tempat bertemunya kapal-kapal untuk berdagang. Tempat ini disarankan oleh para penguasa VOC adalah yang terletak di antara Selat Sunda dan Selat Malaka. Sebagaimana telah diketahui, baik Both dan kedua penerusnya tidak dapat menemukan tempat yang diinginkan oleh para penguasa VOC.

Banten, tempat di mana Coen menjadi direktur jenderal sejak 1613, sudah dianggap seperti pusat administrasi, namun tidak cocok menjadi *rendez-vous* atau tempat bertemunya kapal-kapal. Penguasa Banten-pun tidak ingin memberikan wilayahnya kepada Belanda dan tidak mau terusik dengan pelabuhannya yang memang sudah terkenal di internasional kala itu. Di Banten, Coen juga tidak dapat mengambil peran kunci pedagang-pedagang Cina dalam perdagangan lada di sana. Belum lagi persaingan dengan orang-orang Inggris yang lebih disukai oleh pedagang di wilayah Banten. Dengan pertimbangan keamanan, sekitar tahun 1610, VOC mendirikan sebuah gudang di sisi lebih ke timur, yaitu Jacatra. Wilayah ini secara formal adalah termasuk ke wilayah Banten, yang dipimpin oleh seorang Pangeran. Sebelumnya, Jacatra telah disebut oleh Matelieff sebagai tempat yang paling cocok menjadi ibu kota VOC di Asia. Tahun 1618, persaingan Inggris, VOC dan Banten semakin menguat. Banten yang dibantu Inggris berhasil mengusir VOC dari teluk Jakarta, dan kemudian mencari pertolongan ke Maluku. Peperangan di teluk Jakarta ini berlangsung lama.



**Pengenalan gerobak sebagai alat angkut sampah di Batavia. Salah satu usaha penanggulangan sampah kota Batavia. Sumber: Hoge Regering Nomor 952, folio 417-418. <https://www.sejarah-nusantara.anri.go.id>**

Perjanjian-perjanjian tak pernah menemui kata sepakat. Coen akhirnya meminta bantuan ke Tuan-tuan XVII untuk mengirimkan lagi lebih banyak kapal dan pasukan. Akhirnya, Coen berhasil menaklukkan Jacatra pada 30 Mei 1619. Nieuw-Hoorn dipilih Coen untuk menamai wilayah yang baru ditaklukkan. Namun, Tuantuan XVII lebih menyukai nama Batavia. Coen menjadi gubernur jenderal dan mulai membangun Batavia.

### Batavia dengan Segala Masalahnya

Setelah menjadi “ibu kota” VOC di Asia, Batavia bukan tanpa masalah-masalah. Coen berhasil mengatasi masalah dengan Inggris dengan jalan mengajak kerja sama Inggris dalam hal perdagangan lada. Hal ini dilakukan karena di Eropa, para penguasa VOC sudah melakukan kontrak dengan perusahaan dagang Inggris, EIC. Kedua belah pihak, VOC dan EIC, bersama-sama melawan musuhnya di Asia. Pembagian-pembagian jatah rempah juga dilakukan, misalnya dua pertiga menjadi milik VOC, sepertiga lagi untuk jatah EIC.

Batavia yang menjadi pusat perdagangan intra-Asia mulai didatangi penduduk dari segala bangsa. Dengan datangnya penduduk berbagai bangsa, persoalan-persoalan perkotaan pun muncul, seperti kriminalitas, wabah penyakit, dan masalah-masalah sosial budaya lainnya.

Tidak hanya persoalan perkotaan, VOC yang berkedudukan di Batavia pun masih memiliki ancaman dari penguasa-penguasa Nusantara. Banten tetap menjadi ancaman. Selain Banten, juga ada Mataram. Belum lagi ancaman yang datang dari Timur Nusantara, seperti Maluku dan Ternate. Permasalahan-permasalahan sosial budaya dan ancaman-ancaman ke Batavia terus terjadi semasa Batavia menjadi ibu kota. Setiap gubernur jenderal memiliki caranya sendiri untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan berbagai peraturan yang dibuat. mungkin kini, Batavia masa kini masih mewarisi masalah-masalah yang ada di tempo dulu.



**Intan Lidwina :**

## **LARASKA, SALAH SATU KONTRIBUSI ANRI BAGI MASYARAKAT**

Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan kekayaan alamnya: tanahnya yang subur, iklimnya yang tropis, terdapat banyak pantai yang indah membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi destinasi wisata para turis asing. Banyak turis asing yang datang ke pantai-pantai di Indonesia selain untuk menikmati pemandangan alamnya tetapi juga untuk berjemur. Ya, di banyak negara seperti Eropa sinar matahari mereka tidak seperti di Indonesia. Sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa, sinar matahari di pagi hari menjelang siang sangat bermanfaat bagi kesehatan yaitu di antaranya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Namun, walaupun bermanfaat berjemur pun disarankan

hanya sekitar 5-10 menit saja dengan waktu berjemur di jam 10.00-11.00 lebih dari itu dapat menyebabkan penyakit pada kulit.

Keindahan alam yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya yang berada di antara Benua Australia dan Asia, serta diapit oleh dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomis, Indonesia terletak di 6° Lintang Utara (LU) - 11° Lintang Selatan (LS) dan 95° Bujur Timur (BT) - 141° Bujur Timur (BT). Letak geografis yang berada di dua samudera besar ini memberikan dampak Indonesia mendapatkan angin laut yang membawa hujan. Ini jugalah yang menyebabkan Indonesia

memiliki iklim tropis dengan ciri-ciri sebagai berikut: curah hujan tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembaban udara yang tinggi.

Kekayaan dan keindahan alam yang dimiliki Indonesia tidak terlepas dari kondisi geografis ini. Indonesia memiliki lebih dari sepuluh ribu pulau yang di dalamnya terdapat banyak gunung berapi aktif yang mana hal ini tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai negara yang subur tetapi juga sebagai salah satu negara yang berada di kawasan *ring of fire*. *Ring of fire* atau cincin api Pasifik merupakan terminologi yang digunakan terhadap kawasan yang sering mengalami letusan gunung berapi aktif dan gempa

## PRESERVASI

bumi. Cincin api Pasifik meliputi wilayah cekungan samudera Pasifik. Dikatakan sebagai kawasan *ring of fire* dikarenakan kawasan tersebut membentuk tapal kuda. Panjang area yang termasuk dalam Cincin Api Pasifik adalah 40.000 km.

Diketahui bahwa kurang lebih 90% gempa bumi yang terjadi, sekitar 80% di antaranya terjadi di wilayah ini. Diketahui juga bahwa Indonesia terletak pada *Alpine Belt* atau Sabuk Alpine yang mana sekitar 17% dari gempa bumi terbesar atau sekitar 5% - 6% gempa bumi yang terjadi di dunia terjadi di kawasan Sabuk Alpine dan Indonesia berada di dua jalur rawan bencana ini yaitu: Cincin Api Pasifik dan Sabuk Alpine.

Kondisi geografis ini juga membuat Indonesia menjadi sebuah negara yang rawan akan bencana. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam kurun waktu 2010-2020 tercatat sebanyak 18.433 kejadian bencana yang terdiri atas 6.548 kasus bencana banjir, 4.337 kasus tanah longsor, 188 kasus gelombang pasang/abrasi, 5.437 kasus puting beliung, 753 kasus kekeringan, 894 kasus kebakaran hutan dan lahan, 159 kasus gempa bumi, 9 kasus tsunami, 2 kasus gempa dan tsunami serta 106 letusan gunung api.

Rentan terhadap bencana gempa bumi dan curah hujan yang tinggi juga membuat Indonesia rawan banjir terutama di daerah Jakarta yang mengalami penurunan permukaan tanah dari tahun ke tahun. Pada awal tahun ini contohnya terjadi banjir di beberapa kawasan di Jakarta dan sekitarnya karena adanya hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi selama beberapa hari. Banyak kawasan terendam air cukup tinggi



Tim Laraska ANRI

yang menyebabkan beberapa jalan utama menjadi sulit dilewati; banyak kawasan rumah penduduk yang tergenang air hingga beberapa meter. Kerugian material pun tidak terhingga banyaknya.

Selain banjir, beberapa peristiwa bencana alam seperti gempa bumi dengan getaran cukup besar juga pernah dialami Indonesia. Beberapa diantaranya adalah gempa bumi yang terjadi pada tahun 2018 lalu di Lombok dengan magnitudo sebesar 7,0 skala Richter; gempa bumi yang terjadi di Banten pada tahun 2019 lalu dengan magnitudo 7,4 skala Richter yang menyebabkan tsunami dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Namun, gempa paling besar yang pernah terjadi di Indonesia serta mengakibatkan tsunami yang cukup dahsyat terjadi pada tahun 2004 di Aceh dengan magnitudo 9,1 skala Richter.

Bencana alam yang terjadi mengakibatkan rusaknya gedung-gedung pemerintahan, tempat peribadatan, toko-toko, rumah-rumah penduduk dan sebagainya. Dampak dari bencana mengakibatkan banyak

sekali korban jiwa, banyak orang kehilangan keluarga dan bahkan beberapa tidak diketemukan hingga kini. Dampaknya yang besar juga mengakibatkan banyak aset yang rusak tidak hanya bangunan tetapi juga dokumen-dokumen penting yang salah satunya adalah dokumen mengenai kepemilikan aset (tanah). Sebagai lembaga kearsipan nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mencoba untuk berkontribusi kepada masyarakat terutama bagi masyarakat yang terdampak oleh bencana melalui program arsip terdampak bencana dan Layanan Restorasi Arsip Keluarga (LARASKA).

Peran ANRI dalam perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana telah dilakukan sejak tahun 2005-2020 sebanyak 44 Instansi dan telah merestorasi arsip yang rusak sebanyak 277.335.648.439 lembar ditambah restorasi Badan Pertanahan Nasional kota Bekasi yang sedang berjalan sebanyak 96 container dan Layanan Restorasi Arsip Keluarga (LARASKA) secara gratis yang terkena dampak banjir pada awal tahun 2020 sebanyak 681 orang (34.050 lembar),

sedangkan kegiatan digitalisasi arsip dari dampak bencana sejak Tahun 2017-2018 sebanyak 2.775 image.

Pelindungan dan penyelamatan arsip dari dampak bencana diharapkan agar arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dan memori kolektif berbangsa dan bernegara terjamin keberadaan dan keselamatannya. Pelindungan dan penyelamatan arsip dari dampak bencana menjadi tanggung jawab pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 6 huruf g, bahwa salah satu tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu pemeliharaan arsip/ dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Selain itu juga dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 34 ayat 1, disebutkan bahwa negara menyelenggarakan pelindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, baik terhadap arsip yang keberadaanya di dalam maupun

di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya dalam pasal 34 ayat 4 disebutkan bahwa pelindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh ANRI, pencipta arsip, dan pihak terkait. Lebih lanjut pada pasal 34 ayat 5 bahwa pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana nasional dilaksanakan oleh ANRI dan pencipta arsip yang berkoordinasi dengan BNPB.

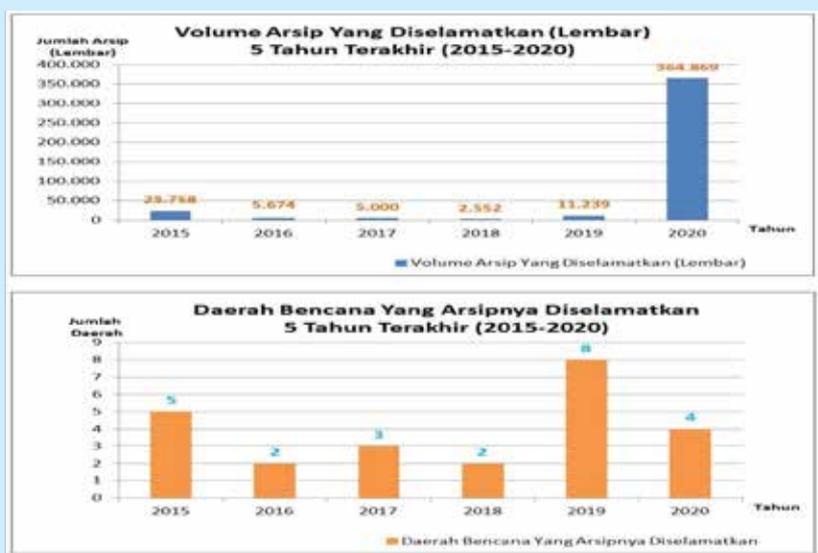
Dari kedua undang-undang tersebut dapat ditegaskan bahwa pertama, pelindungan dan penyelamatan arsip dari dampak bencana menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga badan usaha dan masyarakat. Khususnya dalam pelindungan dan penyelamatan arsip masyarakat/

keluarga, semua pihak berkewajiban untuk turut menjamin pelindungan hak-hak keperdataan rakyat yang meliputi hak sosial, hak ekonomi, dan hak politik dan lain-lain yang dibuktikan dalam arsip.

Kedua, tanggung jawab dalam melakukan pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dilakukan secara bertingkat, yaitu jika bencana tingkat nasional menjadi tanggung jawab ANRI, bencana tingkat provinsi menjadi tanggung jawab Lembaga Kearsipan Provinsi, dan bencana tingkat kabupaten atau kota menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan kabupaten atau kota. Hal ini tidak berbeda dengan bencana pada lingkup lembaga perguruan tinggi dan lembaga pencipta, menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga tersebut. Namun demikian, tentu ANRI tidak tinggal diam terhadap bencana yang bukan diklasifikasikan sebagai bencana nasional di tengah-tengah lembaga tersebut belum siap menanganinya.

Selama ini ANRI telah melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga terkait dengan penanganan arsip dari bencana seperti dengan BNPB, antara lain saling memberikan informasi terkait dengan bencana terhadap arsip, pemberdayaan pusat studi dan dokumentasi arsip tsunami, pemanfaatan arsip bencana sebagai bahan riset, dan peluncuran LARASKA bersama dengan peluncuran Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) di Aceh pada Desember 2019.

ANRI juga melakukan kerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) terkait dengan upaya mewujudkan keluarga nasional sejahtera, sedangkan ANRI melalui pembentukan Kampung LARASKA yang bermuara pada kesejahteraan keluarga melalui pelindungan arsip



Tabel capaian hasil arsip yang berhasil diselamatkan oleh ANRI dalam beberapa tahun terakhir

## PRESERVASI

sebagai bukti hak-hak kerpedataan rakyat. Selain itu ANRI juga bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait dengan pembentukan Desa LARASKA.

Dalam beberapa tahun terakhir ini juga, ANRI melalui Direktorat Preservasi melakukan kegiatan edukasi pengenalan restorasi arsip keluarga yang dikenal dengan Layanan Restorasi Arsip Keluarga (LARASKA) dengan bekerja sama dengan perangkat pemerintahan terkecil seperti ke kelurahan-kelurahan di berbagai daerah di Jakarta maupun di luar Jakarta untuk mendemonstrasikan perbaikan arsip yang bisa dilakukan oleh tiap-tiap rumah tangga. Dikarenakan tujuannya memberikan edukasi maka demonstrasi yang dilakukan disesuaikan dengan jenis restorasi atau perbaikan yang memang bisa dengan mudah dilakukan di tiap rumah tangga yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat ditemui oleh masyarakat dengan mudah dan harganya terjangkau. Harapan dari diadakannya kegiatan ini adalah masyarakat tidak hanya dapat memahami jenis dan kriteria arsip pribadi atau keluarga, tetapi juga memahami pentingnya menjaga arsip tersebut serta apa yang bisa dilakukan untuk melindungi arsip yang mereka miliki. Kedepannya, diharapkan masyarakat semakin mengenal arsip dan bagaimana cara memperlakukan arsip yang mereka miliki dengan baik dan benar.

Selain memberikan edukasi bagaimana melakukan restorasi yang mudah kepada masyarakat, Tim Restorasi Arsip ANRI juga masih memberikan Layanan Restorasi Arsip Keluarga (LARASKA) untuk arsip keluarga yang terdampak bencana selama beberapa tahun terakhir



Contoh Arsip Personil Keluarga



Contoh Arsip Aset Keluarga

secara gratis atau cuma-cuma. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, untuk awal tahun 2020 ini saja telah dilakukan restorasi arsip keluarga sebanyak 34.050 lembar (media kertas) terdampak bencana dari sebanyak 681 orang. Ini menunjukkan sebuah bukti nyata peran ANRI bagi masyarakat dan patut untuk dilestarikan.

Adapun mengenai pemahaman mengenai LARASKA itu sendiri serta prosedurnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

### APA ITU ARSIP KELUARGA ?

Adalah arsip yang tercipta dari keluarga yang meliputi tetapi tidak terbatas pada akta kelahiran, surat nikah, kartu keluarga, ijazah, sertifikat dan lain-lain.

### DAMPAK BENCANA TERHADAP



Contoh Arsip Aktivitas Sosial Keluarga

## ARSIP

Kerusakan terhadap arsip aktif, inaktif, vital, terjaga, dan statis milik instansi pemerintah, Ormas/Orpol, BUMN/D, Swasta termasuk juga arsip milik keluarga sebagai entitas terkecil dari bangsa dan negara.

### JENIS PELAYANAN RESTORASI ARSIP KELUARGA (LARASKA)

1. Layanan Sosialisasi & Bimbingan Teknis sebagai upaya preventif (pencegahan) dan mengurangi kerusakan arsip dari dampak bencana.
2. Layanan Digitalisasi Arsip dalam rangka membuat backup arsip.
3. Layanan Restorasi Arsip sebagai upaya preventif dengan metode enkapsulasi dan kuratif (perbaikan) terhadap arsip yang

terkena dampak bencana.

### **Standar Layanan Restorasi Arsip Milik Masyarakat yang Terdampak Bencana**

#### **a. Jenis Pelayanan**

Layanan restorasi arsip milik masyarakat (keluarga dan perseorangan) dari dampak bencana adalah kegiatan restorasi/perbaikan dan perlindungan arsip dari dampak bencana milik keluarga dan perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia.

#### **b. Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 4) Peraturan Kepala ANRI No.23 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Dampak Bencana;
- 5) Peraturan Kepala ANRI No.14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia.

#### **c. Ketentuan dan Persyaratan**

- 1) Layanan restorasi arsip ini diberikan kepada keluarga dan perseorangan yang menjadi warga negara Indonesia, bukan lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan.
- 2) Arsip yang diperbaiki adalah arsip kertas yang rusak karena dampak bencana.
- 3) Jumlah maksimal layanan perbaikan

arsip setiap keluarga/perseorangan adalah :

- a) Arsip tekstual : 10 lembar
- b) Arsip kartografi/kearsitekturan : 3 lembar
- 4) Masyarakat pengguna layanan perbaikan arsip agar menyerahkan langsung arsip yang akan diperbaiki ke Subdit Restorasi Arsip dengan diantar oleh petugas HUMAS.
- 5) Masyarakat pengguna layanan perbaikan arsip wajib mengikuti peraturan yang berlaku di lingkungan ANRI.
- 6) Masyarakat pengguna layanan perbaikan arsip ini selanjutnya mengambil arsip yang telah selesai diperbaiki di Subdit Restorasi Arsip.

#### **d. Jenis Bencana**

Jenis bencana yang dimaksud dalam standard layanan ini adalah banjir, tsunami, gempa bumi dan tanah longsor.

#### **e. Prosedur**

- 1) Masyarakat yang akan memperbaiki arsipnya di Subdit Restorasi Arsip ANRI harus terlebih dahulu melapor ke Bagian HUMAS ANRI.
- 2) HUMAS ANRI berkoordinasi dengan Subdit Restorasi Arsip dalam rangka proses layanan perbaikan arsip masyarakat.
- 3) Masyarakat yang akan memperbaiki arsip nya datang ke ruangan Subdit Restorasi Arsip dengan membawa arsip yang akan diperbaiki dan diantar oleh Petugas Bagian HUMAS ANRI.
- 4) Subdit Restorasi Arsip memeriksa tingkat kerusakan arsip untuk kemudian akan ditindaklanjuti sebagai mana langkah berikut :
  - a) Apabila arsipnya masuk kategori tidak bisa direstorasi, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Kategori yang tidak bisa direstorasi yaitu: tinta arsip luntur, tulisan/informasi arsip rontok dan fisik arsip hancur.

b) Apabila arsipnya masuk kategori yang bisa direstorasi, maka akan ditindaklanjuti dengan metode restorasi sesuai hasil pemeriksaan Tim Restorasi Arsip.

5) Jika arsip yang akan diperbaiki dapat dilakukan restorasi, maka masyarakat yang akan memperbaiki arsip nya (pemilik arsip) mengisi "Form 1 : Bukti Penyerahan Arsip" rangkap dua yang dipandu oleh petugas dari Subdit Restorasi Arsip. Lembar 1 untuk masyarakat yang akan memperbaiki arsip dan lembar 2 untuk disimpan oleh Subdit Restorasi Arsip.

6) Setelah arsip selesai diperbaiki, petugas Subdit Restorasi Arsip akan menghubungi pemilik arsip untuk mengambil arsip miliknya.

7) Pemilik arsip datang ke Subdit Restorasi Arsip dengan diantar oleh HUMAS ANRI dan menunjukkan "Form 1 : Bukti Penyerahan Arsip" kepada petugas Subdit Restorasi Arsip.

8) Petugas Subdit Restorasi Arsip mengambil arsip yang telah selesai diperbaiki sesuai dengan nomor yang tertera pada "Form 1 : Bukti Penyerahan Arsip".

9) Pemilik arsip memeriksa arsip miliknya yang telah selesai direstorasi, jika sudah konfirmasi dan sesuai maka Petugas Subdit Restorasi Arsip mengisi "Form 2 : Bukti Pengambilan Arsip" rangkap dua. Lembar 1 untuk pemilik arsip dan lembar 2 untuk disimpan oleh Subdit Restorasi Arsip.

#### **f. Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan perbaikan arsip adalah sebagai berikut:

- 1) Arsip dengan tingkat kerusakan ringan lama waktu perbaikan

## PRESERVASI

: 1 Minggu;

2) Arsip dengan tingkat kerusakan sedang lama waktu perbaikan

: 2 Minggu;

3) Arsip dengan tingkat kerusakan berat lama waktu perbaikan

: 3 Minggu;

g. Tarif / Biaya

Biaya untuk perbaikan arsip milik masyarakat yang terkena dampak bencana ditanggung oleh DIPA ANRI (tidak dipungut biaya).

h. Metode Perbaikan/Restorasi

Metode restorasi yang digunakan dalam standard layanan ini adalah :

1) Pembersihan arsip dari kotoran, jamur dan lain-lain;

2) Deasidifikasi, yaitu menurunkan kadar/tingkat keasaman kertas fisik arsip;

3) Enkapsulasi;

4) Laminasi.

i. Hasil Perbaikan / Hasil Layanan

Arsip yang telah dilakukan restorasi memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1) Tingkat keasaman fisik arsip netral dengan pH antar 7-8 ;

2) Usia simpan arsip lebih lama;

3) Struktur fisik arsip (kertas) menjadi lebih kuat.

j. Pengelolaan Pengaduan

1) Inspektorat menerima pengaduan atas pelayanan perbaikan arsip milik masyarakat yang terkena dampak bencana serta menjamin bahwa pengaduan akan disampaikan kepada penyelenggara pelayanan yang berwenang menangani, dalam hal ini adalah Subdit Restorasi Arsip;

2) Pengaduan dapat disampaikan secara langsung dalam bentuk lisan melalui tatap muka maupun telepon ke nomor +62-21-7805851 pesawat 704/406;



### Infografis mekanisme Layanan Laraska

3) Pengaduan secara tidak langsung dapat melalui;

a) Surat tertulis yang ditujukan kepada Inspektur dengan alamat pos Jalan Ampera Raya Nomor 7 Cilandak Timur, Jakarta 12560 atau melalui telp/ fax +62-21-7810280/7815157;

b) Surat elektronik ke alamat anri.inspektorat@gmail.com dan copy carbon (CC) ke alamat restorasi.anri@gmail.com.

4) Setiap pengaduan yang masuk, wajib di catat substansi aduan dan identitas pengadu serta wajib memberikan tanggapan secara langsung sesuai kewenangannya;

5) Inspektorat memberikan tanggapan awal kepada pengadu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima dan penyelesaian akhir pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.



**Muhamad Tris Hadi Pratama**

# MEMETIK PENGALAMAN PEMINDAHAN ARSIP NEGERI PAMAN SAM

**D**engan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan”, Presiden Joko Widodo, Pidato Kenegaraan (16/08/2019).

Setuntasnya ucapan di atas, perbincangan publik muncul bergemuruh, menghadirkan beragam diskursus, termasuk di ranah kearsipan. Bagi bidang kearsipan, pemindahan ibu kota negara (IKN) tidak hanya berbicara tentang membangun infrastruktur, sarana, dan prasarana baru, tetapi juga tentang memindahkan arsip. Banyaknya jumlah arsip yang akan dipindah, menuntut adanya sebuah strategi

tersendiri dan perencanaan yang mendalam. Terlebih lagi, pemindahan dilakukan menuju wilayah seluas sekitar 180.000 hektar di Kalimantan Timur, tepatnya di antara Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai yang berjarak sekitar 1.231 km dari Jakarta dengan melintasi Laut Jawa. Pemindahan arsip berjumlah besar dengan jarak yang begitu jauh mungkin saja menjadi pengalaman perdana bangsa Indonesia, namun tidak untuk Amerika Serikat.

### Pemindahan Setiap Transisi

Pemindahan arsip dalam skala besar telah menjadi hal yang rutin bagi Amerika Serikat. Pada setiap masa transisi presiden, Amerika Serikat melalui lembaga kearsipannya *National Archives and Record Administration* (NARA) melakukan pemindahan Koleksi Kepresidenan (*Presidential Collection*) yang terdiri

dari berbagai bentuk artefak dan arsip dalam beragam medium. Menurut Nancy Kegan dalam tulisannya *Escorting Presidency Into History*, menerangkan bahwa sejak didirikan pada tahun 1934, NARA baru mulai berperan dalam pemindahan Koleksi Kepresidenan setelah 4 tahun berdiri, dalam pemindahan Koleksi Kepresidenan pemerintahan Franklin Delano Roosevelt. Akan tetapi pada saat itu, belum ada produk hukum yang mengatur mengenai status kepemilikan Koleksi Kepresidenan ketika jabatan seorang presiden berakhir, apakah akan menjadi kepemilikan pribadi presiden atau menjadi barang publik.

Walaupun demikian, Roosevelt secara sukarela memberikan Perpustakaan Kepresidenannya yang terletak di tanah kelahirannya Hyde Park, New York, termasuk dokumen



**Kondisi Oval Office masa transisi Lyndon B. Johnson menuju Richard Nixon, Januari 1969**

Sumber: <https://www.archives.gov/files/publications/prologue/2008/winter/images/transitions-nixon-1.jpg>

kepresidenan dan beberapa naskah bersejarah kepada Kongres Amerika Serikat. Kemudian NARA ditunjuk sebagai pengelolanya, sehingga dokumen kepresidenan dan beberapa naskah bersejarah Roosevelt dapat diakses publik. Perdebatan mengenai status kepemilikan Koleksi Kepresidenan terus berlangsung pada setiap masa transisi, hingga terbitnya *Presidential Records Act of 1978* (Undang-Undang Arsip Kepresidenan) yang memberikan kejelasan status sebagai barang publik dan NARA sebagai pengelolanya, dengan demikian mengakhiri perdebatan yang telah berlangsung lama.

Transisi kepemimpinan Presiden Reagan menuju Presiden George H. W. Bush pada tahun 1989, menjadi kiprah awal *Presidential Records Act of 1978*. NARA dapat langsung

mengambil alih kepengurusan Koleksi Kepresidenan, dalam bentuk artefak maupun arsip, pada hari terakhir jabatan yang kemudian dilakukan pemindahan. Seorang arsiparis NARA, Mary Frances Morrow dalam hasil surveinya yang terbit pada tahun 1990 berjudul *Moving an Archives*, mencatat NARA memindahkan 21.000 *cubic feet* (Kaki Kubik), setara dengan 7.560 meter linier (ml), arsip Kepresidenan Reagan dari White House menuju fasilitas penyimpanan sementara di California dengan jarak kurang lebih 3.692 km. Besarnya jumlah arsip dan jarak pemindahan yang begitu jauh, menjadi tantangan yang harus dihadapi NARA dalam pemindahan.

#### **Kolaborasi Teknologi Transportasi**

NARA menyadari pentingnya

strategi dan perencanaan dalam menghadapi besarnya jumlah arsip dan jarak pemindahan yang sangat jauh. Agar dapat menghasilkan strategi dan rencana yang baik, maka pada tahap awal pemindahan, NARA melakukan peninjauan menyeluruh terhadap arsip yang dikandungnya, sebagai bahan awal menyusun strategi dan rencana pemindahan. Peninjauan menyeluruh dilakukan, meliputi kondisi fisik, susunan, dan kuantitas. Baik buruknya kondisi fisik arsip, bagaimana arsip disusun, dan kuantitas jumlah arsip merupakan output yang diharapkan pada tahap ini. Selain untuk kebutuhan pemindahan, NARA juga memanfaatkan peninjauan menyeluruh sebagai kesempatan untuk memilah Koleksi Kepresidenan Reagan, guna mengelompokkan arsip yang memiliki manfaat intelektual.



### Truk trailer dan Pesawat Angkut Galaxy C-5

Sumber: <https://www.archives.gov/publications/prologue/2008/winter/transitions.html>

Kemudian pada tahap perencanaan, dari hasil peninjauan menyeluruh, NARA memutuskan untuk menggunakan sistem *barcode* dan komputer sebagai strategi pemindahan arsip. Mengingat pada saat itu, teknologi komputer telah mengalami perkembangan yang pesat dengan kehadiran *Personal Computer* (PC). *Barcode* digunakan untuk mengetahui identitas arsip agar lebih mudah dilacak saat melakukan pemindahan dan meringankan beban pembongkaran saat sudah sampai, serta memudahkan pengaturan penyimpanan arsip pada lokasi baru. Kemudian, komputer berfungsi sebagai basis data dalam memproduksi label arsip dan *barcode*. Selain itu, komputer juga digunakan sebagai alat menyimpan data catatan dari seluruh proses pemindahan arsip. Perihal jauhnya jarak, NARA memilih melakukan pemindahan arsip dengan menggunakan pesawat angkut. Selain itu, NARA juga menjalin kerja sama dengan *Federal Protective Service* (FPS) dan *California Highway Patrol* untuk mengamankan proses pemindahan.

Sesuai dengan rencana, maka

di tahap pelaksanaan, NARA menggunakan sebuah basis data komputer untuk mengontrol dan memproduksi label, guna memudahkan pengepakan arsip sebagai muatan yang akan dipindah. Setiap boks arsip menerima label yang berisi nomor dan lokasi penyimpanan di lokasi baru. Petugas pemindah memuat tiga puluh boks arsip kedalam wadah pemindah, yaitu kotak palet. Lalu mencatat informasi muatan isi palet pada lembar inventaris yang kemudian segera diinput datanya ke dalam komputer. Pengawas pemindahan berusaha menyeleksi boks arsip di setiap paletnya, berdasarkan asal usul dan lokasi penyimpanan di tempat tujuan. Setiap palet dbaluti dengan bungkus menyusut (*shrink wrap*) agar boks arsip tidak bergerak, demi mencegah kerusakan. Kemudian palet yang sudah bermuatan boks arsip juga diberi label sebagai penanda informasi muatan dan tujuan.

Selesai proses pengepakan, palet-palet bermuatan boks arsip tersebut, diangkut menuju bandara menggunakan truk trailer dengan komposisi 45 palet di setiap truknya.

Sesampainya di bandara, muatan dikelompokkan kembali dalam satuan kargo dengan komposisi 6 palet di masing-masing kargo. Kemudian, kargo dipindahkan ke dalam 3 pesawat angkut militer berjenis Galaxy C-5 yang memiliki kompartemen kargo berdimensi sangat besar dengan ukuran 30,5 m(P) 5,24 m(L) 4,11 (T). Masing-masing pesawat memuat 35 kargo palet yang berisi kurang lebih 2.520 ml arsip. Setelah sampai di pangkalan udara California, muatan diangkut oleh truk menuju lokasi tujuan pemindahan yang terletak di sebuah kawasan perpustakaan sementara, Los Angeles Barat, di bawah pengamanan FPS dan *California Highway Patrol*. Selanjutnya, dilakukan proses bongkar muat dan penataan arsip di ruang penyimpanan pada fasilitas yang baru berdasarkan label dan *barcode*.

Pemindahan arsip pada masa transisi kepemimpinan Reagan berjalan sangat lancar. Kolaborasi antara penggunaan teknologi terkini pada masanya dengan transportasi yang memadai, membuahkan hasil yang manis. Oleh karena itu, pemindahan arsip pada masa transisi

kepemimpinan Reagan, dijadikan rujukan, khususnya pemindahan arsip pada akhir masa jabatan Presiden Bill Clinton pada tahun 2001 yang dikenang sebagai pemindahan arsip terbesar, dengan jumlah hampir dua kali lipat pemindahan Reagan, sehingga pelaksanaannya melibatkan 8 pesawat Galaxy C-5.

### Perkiraan Anggaran

Penulis tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa total anggaran yang dikeluarkan Amerika Serikat dalam pemindahan Koleksi Kepresidenan Reagan masa transisi 1989. Bagi penulis, anggaran menjadi hal yang sangat krusial bagi sebuah kegiatan, begitu pun juga dalam pemindahan arsip dengan jumlah besar, perencanaan sudah selayaknya memperhatikan anggaran. Oleh karena itu, agar tetap dapat memberikan gambaran mengenai total anggaran, penulis akan melakukan sedikit kalkulasi sebagai perkiraan.

Mengacu pada *Treasury, Postal Service, and General Government Appropriations for Fiscal Year 1991* Bagian Kedua, NARA meminta anggaran sebesar 400.000 Dollar untuk memindahkan Koleksi Kepresidenan Reagan ke lokasi baru *Reagan Library* di Simi Valley, California. Dekatnya jarak pemindahan dari lokasi awal, maka anggaran tersebut ditambahkan dengan biaya transportasi muatan agar sedikit lebih mendekati. Perhitungan biaya transportasi hanya akan berfokus pada penggunaan Pesawat Angkut Galaxy C-5.

Perhitungan dilakukan dengan mengacu pada harga avtur bulan Januari tahun 1989, lalu dikalikan dengan kebutuhan bahan bakar Pesawat Angkut Galaxy C-5 untuk

menempuh jarak 3.692 km. Melansir *Energy Information Administration* (EIA), harga avtur pada Januari tahun 1989 sebesar 0.892 dollar per 1 galon ukuran Amerika Serikat atau setara dengan 3,78 liter, sedangkan kapasitas bahan bakar Pesawat Angkut Galaxy C-5, yaitu 193.600 liter untuk jarak tempuh 11.705 km, maka untuk kebutuhan 3.692 km hanya membutuhkan 61.065,45 liter. Oleh karena itu, kebutuhan biaya transportasi diperkirakan senilai 14.389,6 dollar untuk satu pesawatnya. Pada masa transisi Reagan menggunakan 3 pesawat, maka totalnya menjadi 43.168,7 dollar.

Jadi jumlah keseluruhan perkiraan biaya pemindahan Koleksi Kepresidenan Reagan masa transisi 1989 adalah 443.168,7 dollar. Jika disesuaikan dengan tingkat inflasi saat ini, maka jumlahnya hampir setara dengan 924.499,9 dollar, atau 15.148.790.646,41 jika dirupiahkan.

### Memetik Pengalaman

Jika Amerika Serikat diperkirakan mengeluarkan biaya Rp. 15.148.790.646,41 untuk memindahkan 7.560 ml dari satu institusinya, yaitu kepresidenan dengan jarak pemindahan 3.692 km, maka dapat dibayangkan betapa besarnya biaya yang akan dikeluarkan Indonesia untuk memindahkan seluruh arsip dari setiap lembaga pemerintah ke IKN baru. Di sini lah pentingnya memetik pengalaman dari Negeri Paman Sam, yaitu menggunakan teknologi terkini. Derasnya perkembangan teknologi telah menghadirkan kegiatan korespondensi secara elektronik dan digital. Arsip pun telah dapat dialihmediakan dari bentuk konvensional maupun analog

ke dalam bentuk digital dengan digitasi dan digitalisasi, sehingga bisa disimpan dalam *server storage* dan dimanfaatkan tanpa tatap muka dengan akses daring (*online*).

Penggunaan teknologi informasi terkini dapat dimanfaatkan untuk mengefisiensi jumlah arsip yang dipindah dengan melakukan pemilahan, mana arsip yang harus dipindah secara fisik dan mana arsip yang harus dialihmediakan. Pemilahan akan menjadi langkah awal yang harus dilakukan sejak sekarang, sehingga sesegera mungkin dapat dilakukan alih media terhadap arsip yang tidak harus dipindahkan secara fisik. Kemudian dapat disusun rencana terhadap arsip yang harus dipindahkan secara fisik, dari segi anggaran, sarana prasarana, rancangan fasilitas baru, dan metode pemindahan.

Alih media tidak saja akan bermanfaat untuk pemindahan arsip, tetapi juga untuk menjawab tantangan zaman dengan kemajuan perkembangan teknologi yang menuntut arsip atau sebuah informasi dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Bahkan, Anne Gilliland dalam *Conceptualizing 21st Century Archives* menggambarkan sebuah kondisi yang harus diantisipasi, bahwasannya perkembangan teknologi telah menuntut arsiparis atau lembaga kearsipan untuk bertanggung jawab bekerja dengan perspektif dan komunitas global, tidak skala lokal maupun nasional. Dengan demikian, agar dapat menghadirkan keluasan akses skala global, penyelenggaraan kearsipan secara digital menjadi kebutuhan teraktual yang harus dipikirkan ketersediaannya oleh setiap lembaga kearsipan.

# Epi Fahrozi :

## BANGKITNYA KEARSIPAN DI PROVINSI TERMUDA DI PULAU JAWA

**B**ANTEN, merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan etape sejarah yang panjang dari masa kerajaan Islam, masa kolonial, masa pendudukan Jepang, masa revolusi hingga menjadi sebuah provinsi pada tahun 2000, hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Sejak itu Banten resmi menjadi Provinsi termuda di Pulau Jawa. Segala hal yang berkaitan dengan pembangunan sarana prasarana segera dikebut untuk mengejar ketinggalan. Namun bagaimana dengan pembangunan kearsipan.

### A. Sekilas Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Banten

Kondisi kearsipan di Provinsi Banten sampai pada tahun 2012 masih memprihatinkan. Pengelolaan arsip belum dapat serta merta dapat diwujudkan di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten. Hal tersebut disebabkan daya dukung sumber daya kearsipan yang masih jauh dari kondisi ideal. Ini tak lain karena sejak berdirinya Provinsi Banten pada tahun 2000 sebagai daerah provinsi otonomi baru, belum

menetapkan Kebijakan Kearsipan Daerah, sebagai landasan hukum pokok seperti urusan-urusan wajib lainnya di lingkungan pemerintahan daerah. Salah satu contoh dari dampak tersebut adalah implikasinya, dengan tidak tertuangnya kewajiban pengelolaan arsip dalam uraian tugas fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten memunculkan persepsi bahwa pengelolaan arsip hanya bersifat "tugas sampingan". Sebagai konsekuensi logisnya, perhatian para pimpinan OPD terhadap kearsipan sangatlah memprihatinkan, perlakuan pejabat dan pegawai terhadap arsip banyak terjadi kesalahan, arsip dan tenaga kearsipan masih dianggap sesuatu pekerjaan yang kurang berharga dan belum diperhatikan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil supervisi kearsipan yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (nomenklatur saat itu: 2008-2016) pada tahun 2012, terdapat beberapa permasalahan umum kearsipan OPD Provinsi Banten, yaitu :

Pertama, terjadi penumpukan arsip hampir di setiap unit kerja OPD

Kedua, belum ada pemisahan yang jelas antara arsip aktif dan inaktif, arsip inaktif masih banyak disimpan masing-masing di unit pengolah. Ketiga, belum terlaksananya pemberkasan dan penyusutan arsip yang sesuai dengan standar yang berlaku. Keempat, belum adanya SDM Kearsipan atau pegawai yang ditugaskan secara khusus untuk mengelola arsip aktif dan inaktif

Kelima, belum memiliki *records center* yang memenuhi standar, hanya bersifat gudang penyimpanan sementara dan bercampur dengan benda/barang non arsip. Keenam, belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan arsip yang sesuai standar. Ketujuh, belum memiliki sistem *retrieval* arsip sehingga belum dapat melayani penemuan arsip secara cepat dan tepat. Kedelapan, persepsi yang sempit dan kurangnya apresiasi terhadap arsip dan pengelola arsip. Kesembilan, kurangnya perhatian pimpinan OPD terhadap kearsipan di lingkungannya. Kesepuluh, minimnya anggaran pengelolaan arsip.

### Bangkitnya Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Banten

Guna memperbaiki kondisi

## DAERAH

kearsipan yang masih jauh dari optimal, BPAD Provinsi Banten sebagai *leading sector* penyelenggaraan kearsipan Provinsi Banten, sesuai tugas fungsi dan kewenangan yang dimilikinya, berusaha merumuskan berbagai strategi pola kebijakan kearsipan, antara lain:

### Penyusunan Regulasi Kearsipan Daerah

#### 1. Peraturan Daerah

Mengusulkan penerbitan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan Provinsi Banten melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) pada kegiatan DPRD Provinsi Banten tahun anggaran 2013. Usulan tersebut telah disertai dengan dokumen Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah sebagai pendukung resmi sebagaimana disyaratkan.

Raperda Kearsipan yang diusulkan memuat kurang lebih 30% muatan lokal, antara lain tentang:

- a. Penetapan Organisasi Kearsipan Pemerintah Provinsi Banten dan di lingkungan OPD Provinsi Banten
- b. Penetapan Uraian Tugas Fungsi Unit Kearsipan dan Unit Pengolah OPD
- c. Penetapan kewajiban pengelolaan arsip dinamis dan statis daerah
- d. Penetapan kewajiban pengalokasian anggaran kearsipan oleh OPD selaku pencipta arsip
- e. Penetapan kewajiban penunjukan SDM Kearsipan (Arsiparis, Pengelola Arsip dan Petugas Pembantu Penata Arsip/ Non PNS)
- f. Penetapan insentif untuk SDM Kearsipan
- g. Penetapan kewajiban pengadaan Record Center pada OPD
- h. Penetapan Pembangunan Depot Arsip pada Lembaga Kearsipan Daerah
- i. Penetapan layanan dan jasa kearsipan oleh Lembaga Kearsipan Daerah



Depot Arsip Banten 4 lantai (2000 m2)

- j. Penetapan perintah penyusunan pedoman teknis pengelolaan arsip berupa Peraturan Kepala Daerah (Gubernur)

#### 2. Peraturan Kepala Daerah

Sebagai tindak lanjut dari amanat Perda Kearsipan, BPAD menyusun beberapa pedoman teknis pengelolaan arsip berupa Peraturan Gubernur secara simultan mulai tahun 2014-2019, antara lain :

- a. Tahun 2014: Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan, Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan,
- b. Tahun 2015: JRA Kepegawaian, Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Non Keuangan dan Kepegawaian
- c. Tahun 2016: SOP Pengelolaan Arsip Dinamis, Penetapan Uraian Tugas fungsi pengelolaan Arsip dalam Peraturan Gubernur tentang SOTK OPD Provinsi Banten
- d. Tahun 2017: Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif (9 urusan)
- e. Tahun 2018: Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif (11 urusan)
- f. Tahun 2019: Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip

#### 3. Surat Keputusan dan Edaran Kepala Daerah

Sebagai pendukung dalam rangka terlaksananya kegiatan pengelolaan arsip, Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Surat Keputusan Gubernur tentang:

- a. Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Pengelola Arsip OPD
- b. Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Petugas Pembantu Penata Arsip (Non PNS)
- c. Keputusan Gubernur Banten tentang insentif SDM Kearsipan (Tunjangan Kinerja, Honorarium dan Ekstra Fooding)
- d. Surat Edaran Gubernur Banten tentang pengadaan Records Center OPD dan Sarana Pengelolaan Arsip OPD Provinsi Banten
- e. Keputusan Sekda selaku Ketua TAPD tentang Nomenklatur dan Kode Rekening Kegiatan Pengelolaan Arsip pada OPD Provinsi Banten

#### 4. Modul dan Manual Pengelolaan Arsip Dinamis

Dalam rangka memberikan kemudahan pengelolaan arsip bagi



### Pendampingan Teknis di OPD

OPD, disusunlah beberapa modul dan manual sebagai berikut:

- a. Modul Pengadaan Records Center dan Pengelolaan Arsip Inaktif OPD
- b. Manual Pemberkasan Arsip Aktif
- c. Manual Pengelolaan Arsip Media Baru
- d. Manual Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
- e. Manual Program Arsip Vital
- f. Manual Akuisisi Arsip Statis

### Pengelolaan Arsip

Mencermati pola pembinaan kearsipan yang terdahulu, yakni berupa kegiatan Bimbingan Teknis dan *Workshop* Pengelolaan Arsip Dinamis, dinilai belum dapat memberikan dampak perubahan terhadap pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Mulai tahun 2016, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten mulai melaksanakan pendekatan lain yaitu berupa kegiatan pendampingan teknis pengelolaan arsip secara langsung kepada 10 OPD setiap tahunnya. Pendampingan ini dilaksanakan selama 3 hari di setiap OPD dengan memfokuskan kepada teknis pemberkasan arsip aktif di unit-unit pengolah, penataan arsip inaktif di *record center*, penyusunan daftar arsip aktif dan inaktif dan penyusutan arsip. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan monitoring untuk memantau

perkembangan lebih lanjut.

Sebagai upaya memotivasi pengelolaan arsip OPD, pada tahun 2018 mulai dilaksanakan kegiatan Lomba Tertib Arsip OPD Provinsi Banten dan Lomba Arsiparis Terbaik Tingkat Provinsi Banten dengan diberikan penghargaan kepada lima besar pemenang lomba berupa trofi, sertifikat dan uang.

### Inpassing Arsiparis

Masih terbatasnya keberadaan pengelola arsip di lingkungan Provinsi Banten menjadikan pengelolaan arsip belum maksimal. Umumnya, pengelola arsip adalah staf pelaksana di unit-unit kerja OPD yang juga harus melaksanakan tugas-tugas lain yang sesuai perintah atasannya. Menyikapi hal tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten pada tahun 2017 dan 2018 melaksanakan Inpassing Arsiparis yang menghasilkan ditetapkannya 20 orang arsiparis OPD dan 51 calon arsiparis OPD (menunggu pelantikan). Selain itu, dalam rangka menarik minat pegawai untuk mengikuti inpassing, Pemerintah Provinsi Banten terlebih dulu telah menetapkan kenaikan tunjangan kinerja arsiparis yang cukup signifikan, yaitu mulai Rp. 7.000.000 sampai dengan Rp. 16.000.000 sesuai jenjang.

Dengan adanya Arsiparis pada OPD Provinsi Banten, terlihat sekali perkembangan pengelolaan arsip yang cukup baik dari waktu ke waktu.

### Layanan Kearsipan

Dalam rangka meningkatkan kunjungan ke Depot Arsip Banten, DPK Provinsi Banten mulai melaksanakan kegiatan pemutaran film dokumenter pada tahun 2018 di Studio Arsip yang dapat memuat 80 orang pengunjung. Sebelum pemutaran film dokumenter arsip sejarah Banten, terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan sosialisasi kearsipan untuk memberikan informasi kepada pengunjung tentang fungsi dan layanan Depot Arsip Banten, koleksi yang dimiliki serta peran penting arsip bagi organisasi dan perorangan.

Sebagai hasil kegiatan tersebut, tercatat kunjungan ke Depot Arsip Banten kurang lebih sejumlah 12 ribu pengunjung pada tahun 2018 dan 13 ribu orang pengunjung pada tahun 2019.

### Prestasi

Segala usaha dan daya upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Banten cukup membuahkan hasil yang cukup signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*). Hal tersebut terbukti dengan diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemerintah Provinsi Banten mulai tahun 2017 sampai tahun 2019 serta Juara I Lembaga Kearsipan Daerah Terbaik Nasional Tahun 2019 yang diserahkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bertepatan pada Hari Kearsipan Tingkat Nasional di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

### Penutup

Strategi yang tepat dengan didukung oleh kebijakan pimpinan yang searah serta upaya yang serius dan kontinyu akan menghasilkan suatu proses dan hasil yang baik sebagaimana diharapkan. Terlebih dari itu semua adalah, pengelolaan arsip yang baik dan benar dapat memberikan manfaat untuk kepentingan internal pemerintah sendiri dan kepentingan masyarakat secara luas.

Parno Nusantara

# MEMOTRET TOPOLOGI *NETWORK* PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK DI IKN BARU

**R**encana perpindahan Ibu kota Negara (IKN) Republik Indonesia yang baru sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo memberikan tantangan tersendiri terhadap kearsipan. Pindahan ibu kota baru akan menyisakan pekerjaan besar yang harus dilakukan, termasuk bagi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga kearsipan nasional. Ini tak lain agar arsip yang dikelola sebagai bukti akuntabilitas pemerintahan maupun memori kolektif bangsa terselamatkan. Namun demikian, penerapan *Electronic Records Government* dari mulai penciptaan sampai penyusutan secara elektronik tampaknya menjadi suatu harapan yang bisa diwujudkan terlebih bahwa IKN baru berkonsep *forest city* dengan slogan '*Smart, Green, Beautiful dan Sustainable*'. Selain itu, besar harapan pengelolaan arsip elektronik secara penuh dapat terlaksana, didukung oleh kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di mana penilaian penerapannya telah menjadi salah satu indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Instansi pemerintahan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sebelumnya dikenal dengan *e-government* sering diidentikan dengan sebuah aplikasi.

Hal tersebut disebabkan karena aplikasi merupakan perwujudan dari implementasi SPBE yang terlihat dan dapat digunakan secara langsung. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, aplikasi SPBE bidang kearsipan sendiri merupakan satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE dalam bidang kearsipan. Penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan sendiri terbagi ke dalam dua jenis yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah, contohnya adalah aplikasi pengelolaan arsip dinamis. Sementara itu aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain. Dalam bidang kearsipan, contoh aplikasi khusus di antaranya adalah aplikasi pengelolaan arsip statis, aplikasi akreditasi kearsipan dan lainnya. Baik aplikasi umum maupun aplikasi khusus bidang kearsipan, harus dibangun dengan memperhatikan interoperabilitas dari masing-masing aplikasi.

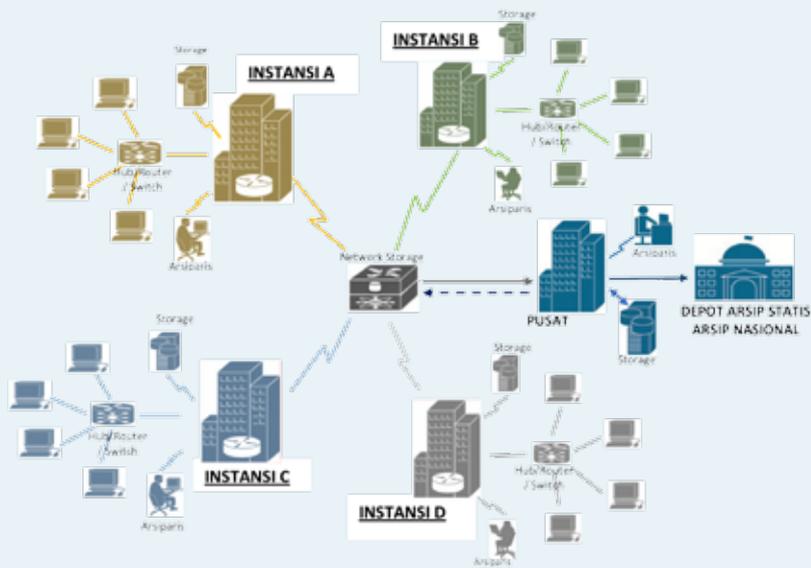
Interoperabilitas yang merupakan salah satu prinsip

dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE. Interoperabilitas dalam lingkup kearsipan bertujuan untuk mengefisienkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, sehingga dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik baik bagi instansi pemerintah pusat dan daerah. Keterpaduan proses bisnis pengelolaan kearsipan yang dimaksud dimaksud diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Instansi pemerintah pusat dan daerah. Adapun integrasi layanan kearsipan tersebut dilakukan melalui:

- bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam Instansi pemerintah pusat, dalam pemerintah daerah, dan/ atau antar instansi pemerintah pusat dan daerah;
- penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
- penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.

Secara umum penyusunan sebuah aplikasi dimulai dengan memetakan kebutuhan aplikasi yang dimaksud melalui sebuah proses bisnis. Proses bisnis pengelolaan arsip secara umum didefinisikan sebagai suatu daur hidup arsip (*life cycle of records*) mulai

dari proses penciptaan (*creation*), penggunaan (*use*), pemeliharaan (*maintenance*) sampai dengan arsip tersebut disusutkan (*disposal*). Hasil dari penyusutan adalah arsip yang bernilai guna sekunder akan diserahkan dan disimpan di lembaga kearsipan sebagai arsip statis. Proses bisnis pada lembaga kearsipan dilakukan melalui proses penilaian dan akuisisi, penataan dan deskripsi, preservasi serta akses arsip. Pendekatan model proses bisnis tersebut berlaku baik arsip yang tercipta secara konvensional maupun arsip elektronik, kecuali ditetapkan model pengelolaan arsip baru seperti *record continuum*. Model proses bisnis pengelolaan arsip elektronik pada IKN dapat digambarkan melalui topologi *network* sederhana pada Gambar 1.



**Gambar 1 Topologi *Network* Pengelolaan Arsip Elektronik**

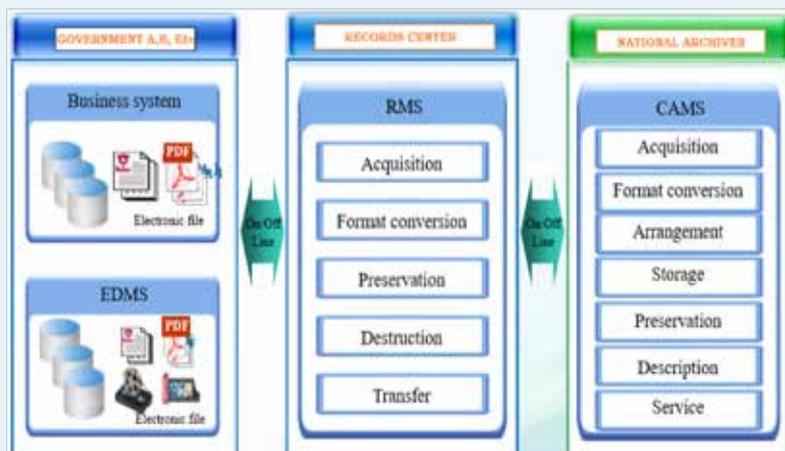
Gambar 1 menunjukkan contoh bahwa terdapat 4 instansi yang terdiri dari Instansi A, B, C dan D yang masing-masing terhubung satu sama lain termasuk di dalamnya Pusat Arsip dan Depot Arsip Statis. Pusat Arsip dan Depot Arsip Statis berada di bawah kendali ANRI. Setiap instansi menggunakan aplikasi pengelolaan arsip yang telah terverifikasi oleh ANRI dengan tujuan supaya setiap aplikasi dapat terinteroperabilitas antara masing-masing instansi juga dengan Pusat Arsip. Setiap instansi pencipta wajib memiliki *storage* untuk mengelola arsip yang tercipta. *Storage* tersebut mempunyai fungsi yang sama dengan *filig cabinet*, yaitu untuk menyimpan dan mengelola arsip yang masih aktif. Arsip yang sudah inaktif kemudian akan disimpan di Pusat arsip secara tersentral. Di pusat arsip inilah dilakukan penilaian sehingga arsip yang bernilai guna terselamatkan, sedangkan arsip dengan status musnah dapat terdokumentasi secara terstruktur. Secara teknikal gambar alur prosesnya dapat dilihat pada Gambar 2.

Instansi pencipta arsip menghasilkan arsip berupa *file* elektronik. *File* elektronik ini di Pusat Arsip akan diterima setelah melalui proses penyerahan dari instansi pencipta arsip dengan kondisi berupa arsip inaktif. Di Pusat Arsip akan dilakukan penyesuaian format *file* elektronik beserta metadatanya,

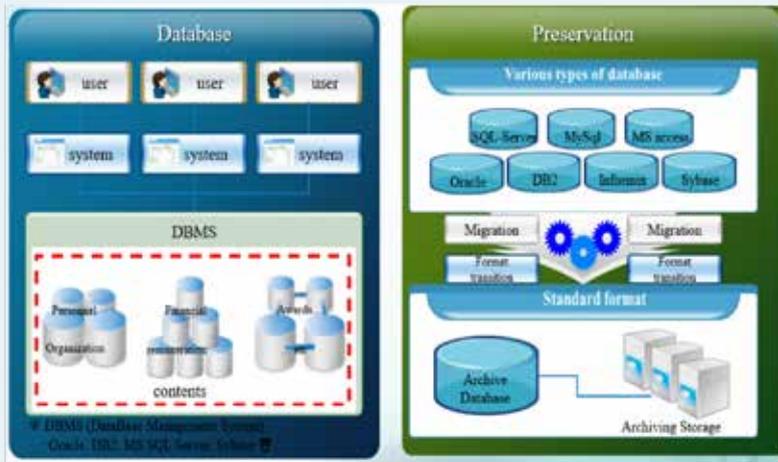
pemeliharaan sampai dengan tahap penyusutan. Arsip elektronik yang bernilai statis akan diserahkan ke Depot Arsip Statis ANRI, sedangkan arsip berstatus musnah akan dimusnahkan di Pusat Arsip. Setiap pencipta arsip, Pusat Arsip, maupun Depot Arsip Statis harus memiliki ruang simpan elektronik (*storage*) secara mandiri. Dalam hal ini harus dibedakan antara *storage* dengan *database*. *Database* adalah susunan rekaman data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan, yang diorganisir dan disimpan secara

terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dalam sebuah sistem komputer, sehingga mampu memenuhi informasi secara optimal yang dibutuhkan oleh pengguna. Adapun *storage* merupakan bagian dari *database* yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras sebagai tempat penyimpanan datanya. Pengaturan *database* dalam sistem pengelolaan arsip dimaksud menggunakan *DataBase Management System* (DBMS).

DBMS diperlukan agar sebuah



**Gambar 2 Alur Proses Teknis Pengelolaan Arsip Elektronik**



Gambar 3 Database dalam Pengelolaan Arsip Elektronik

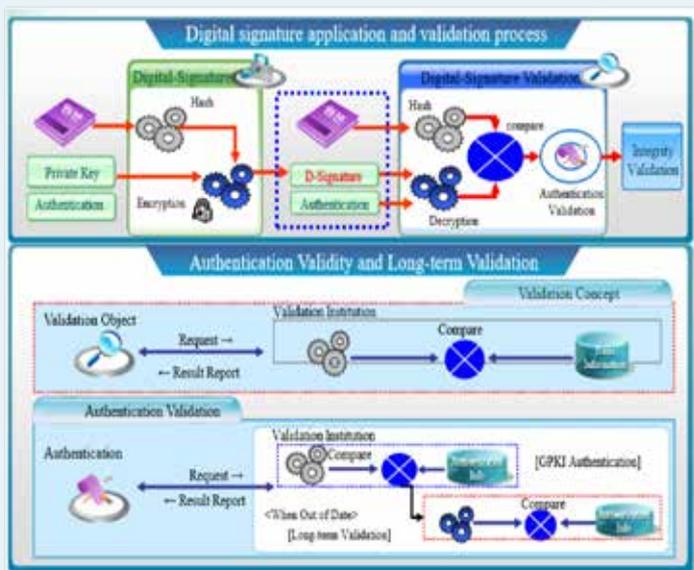
sistem dapat mengintegrasikan data *file* (item berkas) ke dalam suatu *file* (berkas), sehingga dapat melayani pengguna yang berbeda. Selain itu DBMS berfungsi untuk : Menyediakan sistem akses cepat; Mengurangi terjadinya *redundancy* data; Memungkinkan adanya *updating* secara bersama; Menyediakan sistem yang memungkinkan dilakukan pengembangan *database*; serta (e). Memberikan perlindungan dari pihak pemakai yang tidak berhak. Keterkaitan *database* dan DBMS yang dimiliki dapat dilihat pada Gambar 3. Gambar dengan warna biru menunjukkan *database* yang dimiliki oleh pencipta arsip, sedangkan gambar berwarna hijau menunjukkan *database*

yang harus dimiliki oleh Pusat Arsip/ Lembaga Kearsipan. *Database* pada pencipta arsip dapat menggunakan tipe *operational database* atau *relational database* yaitu *database* yang menyimpan data rinci yang diperlukan untuk mendukung operasi dari kegiatan organisasi. Dalam hal ini, informasi tersimpan secara terstruktur dan mudah untuk dicari kembali. Sementara itu, untuk Pusat Arsip dan Depot Arsip Statis dapat menggunakan tipe *analytical database* atau *data warehouse*. *Database* ini menyimpan data dan informasi yang kemudian dapat menampilkan data secara menyeluruh berdasarkan data yang dicari yang diambil dari berbagai

*database* operasional sebuah organisasi.

Dalam pengelolaan arsip elektronik ini, peranan arsiparis sangat besar. Di instansi pencipta arsip, arsiparis bertanggungjawab mengendalikan pengelolaan arsip elektronik mulai dari penciptaan sampai dengan pemeliharaan untuk selanjutnya diserahkan ke Pusat Arsip ketika berstatus inaktif. Di Pusat Arsip, arsiparis berperan dalam proses keberlangsungan daur hidup arsip berjalan, mulai dari arsip inaktif diterima dari instansi pencipta. Selain berperan sebagai pengelola arsip inaktif, arsiparis di Pusat arsip juga melakukan penilaian untuk tahap penyusutan serta memberikan pelayanan arsip inaktif ketika diminta oleh instansi pencipta. Arsiparis harus menyiapkan format arsip dengan ketentuan preservasi arsip jangka panjang ketika arsip inaktif tersebut mempunyai nilai guna dan akan diserahkan ke Depot Arsip Statis untuk disimpan sebagai memori kolektif bangsa.

ANRI maupun Lembaga Kearsipan Daerah, termasuk arsiparis berperan menjaga, memelihara dan melestarikan arsip yang bernilai guna sekunder tersebut untuk dapat dilayankan kepada pengguna. Oleh karena itu, kompetisi arsiparis dalam pengelolaan arsip elektronik perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, arsiparis harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman praktis dalam mengautentikasi dan memvalidasi keberadaan arsip elektronik. Autentikasi dan validasi diperlukan untuk melihat sejauhmana tingkat keaslian dan keberadaan arsip tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa pengetahuan dan kemampuan terkait hal tersebut di antaranya berhubungan dengan keamanan sebuah *file*/arsip elektronik terkait dengan *private key*, *hashing*, *encryption*, *decryption* dan lainnya sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4 Pengetahuan Teknis Dalam Pengelolaan Arsip Elektronik



**RAYI DARMAGARA**

# KEARSIPAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA

*Lari kota Jakarta lupa kaki yang luka*

*Mengejek langkah kura-kura*

*Ingin sesuatu tak ingat bebanmu*

*Atau itu ulahmu kota.. ramaikan mimpi  
indah penghuni*

**S**epenggal lirik lagu yang dinyanyikan oleh Virgiawan Listanto (Iwan Fals) dengan judul Berkacalah Jakarta menjadi representasi wajah ibu kota Jakarta saat ini. Jakarta pada beberapa dekade sebagai ibu kota negara dituntut banyak perubahan dalam berbagai hal, mulai dari isu kualitas lingkungan hidup, kesejahteraan ekonomi, sosial oleh berbagai pihak mulai dari masyarakatnya sampai dengan pemerintah khususnya pemerintah pusat yang banyak memiliki gedung perkantoran di ibu kota.

Tuntutan perubahan atas ibu kota menjadi momentum besar yang diwacanakan oleh pemerintah saat ini, yang disampaikan pada Pidato Kenegaraan Presiden Joko

Widodo dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 16 Agustus 2019. Kemudian disusul dengan Pengumuman Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Presiden pada 26 Agustus 2019 di Istana Negara. Pemindahan itu didasarkan pada kajian yang telah dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menyimpulkan bahwa performa Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara, sudah tidak lagi dapat mengemban peran secara optimal. Ini tak lain karena semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar DKI Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemindahan ibu kota menjadi lebih serius lagi dengan adanya Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor

KEP.192/M.PPN/HK/10/2019 tentang Tim Koordinasi Strategis Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara yang bertugas penyusunan dan pemantapan kajian, masterplan, dan dokumen perencanaan, serta perumusan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, pembiayaan, infrastruktur, kelembagaan, pertahanan dan keamanan, aparatur negara, sosial, budaya, demografi, perencanaan wilayah, tata ruang, dan pertanahan, lingkungan hidup dan kebencanaan, dan sektor lainnya.

Hingga akhirnya, pada 7 Februari 2020 undangan konsultasi publik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi begitu penting bagi dunia kearsipan dalam rangka mencari desain arah politik hukum kearsipan dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Argumentasi yang dituangkan dalam norma "Ibu Kota Negara dikelola berdasarkan prinsip kota modern, berkelanjutan, dan berkelas internasional dengan tetap mencerminkan identitas bangsa

Indonesia dan sebagai simbol keberagaman yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, merupakan anasir kearsipan yang dijadikan oase dan energi dalam rangka memperkuat kearsipan dalam Ibu Kota Negara.

Selain itu, dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara mengatur pula bahwa Daerah Khusus Ibu Kota Negara menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Lembaga Kearsipan Nasional dalam hal ini Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), berdasarkan ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang melakukan penyusunan penetapan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis.

Tak hanya itu, memahami peran strategis kearsipan pada ibu kota baru, ANRI telah mengirimkan surat usulan penambahan materi muatan pada rancangan undang-undang tersebut pada 18 Februari 2020 kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan menambahkan ayat baru pada bab Pindahan Ibu Kota. Rumusan norma tersebut adalah “Pemerintah pusat dan Badan Otorita bertanggungjawab terhadap pengelolaan arsip yang tercipta dari persiapan, pembangunan, dan pindahan Ibu Kota Negara dengan berkoordinasi kepada lembaga kearsipan nasional.

Penjelasan pada norma tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan

“pengelolaan arsip” adalah upaya menyelamatkan dan menyajikan arsip yang tercipta dari kegiatan pindahan Ibu Kota Negara guna menjamin keberlangsungan praktik kenegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban nasional, menjamin keberlangsungan pelayanan publik, melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori kolektif bangsa. Usulan diperkuat dengan analisis dampak regulasi sebagai justifikasi diperlukannya rumusan norma tersebut. Justifikasi tersebut pada intinya memperkuat keberadaan ibu kota baru dengan arsip sebagai pilarnya. Arsip akan merekam kegiatan persiapan, pembangunan dan pindahan ibu kota negara memiliki nilai strategis sehingga penting dikelola dengan baik agar dapat menjamin keberlangsungan praktik kenegaraan dan pelayanan publik.

Tersajinya arsip kegiatan pindahan ibu kota yang utuh, lengkap dan terpercaya, dapat turut meningkatkan citra yang solid dan berwibawa di mata masyarakat. Terlebih norma ini ingin memagari dan meminimalisir risiko hilangnya arsip yang bernilai bagi pertanggungjawaban nasional terhadap perkembangan sejarah kenegaraan di Indonesia.

Pemindahan ibu kota harus tetap menjamin keberlangsungan praktik kenegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan serta keberlangsungan peradaban bangsa dan negara. Dalam rangka menjamin keberlangsungan praktik kenegaraan dan pemerintahan tersebut, pengelolaan arsip harus mampu menjawab tantangan

konektivitas antara Jakarta dan ibu kota baru, yang akhirnya arsip dapat diakses dari Jakarta maupun dari Ibu Kota Negara baru.

Sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian, arah kebijakan pada Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara bagi ANRI memang belum secara tegas, apakah pada saat penetapan Daerah Khusus Ibu Kota Negara secara otomatis pula ANRI berpindah kedudukannya dan mulai menjalankan tugas, fungsi dan perannya di kawasan Ibu Kota Negara di dalam Daerah Khusus Ibu Kota Negara baru. Bagi Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Pusat dapat menentukan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang dipindahkan atau tidak dipindahkan kedudukannya ke Daerah Khusus Ibu Kota Negara. Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Cita Hukum Pindahan Ibu Kota Negara dalam Konteks Kearsipan**

Pertimbangan terhadap ditetapkannya IKN adalah kota baru yang berkelanjutan (*sustainable*) yang berciri *smart*, *green*, memiliki identitas bangsa dan kebhinekaan. IKN merupakan kota baru yang modern dan bertaraf internasional serta pusat pemerintahan yang mencerminkan birokrasi dan sumber daya manusia pemerintahan atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ideal. Ciri utama *smart city* antara lain didukung dengan

teknologi informasi dan komunikasi dengan kecepatan tinggi, sebagai pusat pemerintahan yang ideal dengan tujuan kualitas pelayanan publik dapat lebih meningkat dan berorientasi *smart governance*.

Dalam kerangka Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, jika dijabarkan terhadap makna filosofis bahwa ibu kota Negara Republik Indonesia yang diharapkan adalah Ibu Kota yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Identitas dan karakter bangsa Indonesia telah ditorehkan para bapak bangsa berdasarkan pemahaman sejarah panjang bangsa Nusantara dalam membangun karakter Indonesia, memunculkan kebutuhan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang dapat merepresentasikan identitas dan persatuan bangsa dalam kerangka *nation and state building*, merefleksikan kebhinnekaan Indonesia, negara kepulauan, kearifan lokal, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, terdapat benang merah terhadap konsideran filosofis Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara. Kemudian dipertegas dalam salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan yang tertuang dalam Pasal 3

huruf g Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yaitu menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa.

Sejatinya setiap langkah dan dinamika gerak maju bangsa, masyarakat, dan negara Indonesia ke depan harus didasarkan pada pemahaman, penghayatan, dan catatan atas identitas dan jati diri bangsa tersebut yang terekam dalam bentuk arsip. Karena cita hukum (*recht idee*) di Indonesia adalah Pancasila, undang-undang difungsikan menjadi jembatan dalam rangka mewujudkan ketertiban, keteraturan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Walaupun sifatnya abstrak dan luhur, cita hukum menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sehingga sinergi antara undang-undang kearsipan dan rancangan undang-undang ibu kota negara mampu menyimpan memori peradaban bangsa Indonesia.

### **Kearsipan dan Ibu Kota Baru**

Disadari atau tidak, kearsipan merupakan elemen penting dalam proses pindahnya ibu kota negara, bukan hanya momentum proses perpindahannya yang merupakan peristiwa besar dalam sejarah, lebih dari itu, konektivitas dan keberlanjutan perjalanan bangsa bagi dunia kearsipan wajib hukumnya untuk di jaga. Proses pembentukan undang-undang tentang ibu kota negara yang saat ini masih berjalan layaknya etalase yang bukan hanya untuk dilihat tetapi perlu diintervensi dalam bentuk partisipasi publik oleh “komunitas kearsipan” sehingga menjadikan

undang-undang yang memiliki warna kearsipan.

Uji publik, rapat dengar pendapat umum, sosialisasi, atau apapun bentuknya terhadap rancangan undang-undang tentang ibu kota negara merupakan wadah dalam rangka memberi warna pada undang-undang tersebut sebagai aspirasi komunitas kearsipan. Tujuannya tentu dalam rangka mempengaruhi pembentukan atau perubahan kebijakan sebagai upaya penyampaian kepentingan masyarakat kearsipan. Secara lugas hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan dijamin dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Partisipasi dalam memberikan masukan terhadap warna kearsipan pada rancangan undang-undang tentang ibu kota negara dapat dilakukan oleh kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Banyaknya hal yang perlu disiapkan dan dilakukan pada proses pemindahan ibu kota dilihat dari kaca mata kearsipan, pengelolaan arsip akan dimulai dari proses perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan dan evaluasi, dan yang tidak kalah hebatnya karena dalam catatan sejarah dunia, hanya Indonesia lah yang memindahkan ibu kotanya dari satu pulau ke pulau lainnya. Itu sebabnya ibu kota baru perlu dijaga oleh arsip.

# PEDULI SITUASI PANDEMI: LABORATORIUM ANRI BAGIKAN *HAND* *SANITIZER* UNTUK MASYARAKAT



Sejak akhir Desember 2019, perhatian publik di dunia mulai menyoroti terdeteksinya penyakit yang diakibatkan virus corona jenis baru (SARS CoV-2) atau yang dikenal dengan *Corona Virus Disease* tahun 2019 (COVID-19). Infeksi virus corona jenis baru tersebut pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina serta ke beberapa negara, termasuk Indonesia.

Penularan dan penyebaran virus yang cukup cepat ke banyak negara, menjadi salah satu pemicu Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) menetapkan wabah COVID-19 menjadi pandemi

global pada 11 Maret 2020. Peningkatan status pandemi tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus di Jenewa, Swiss (Kompas.com, 12/3/2020). Adapun terakhir WHO menetapkan status pandemi ialah terhadap wabah penyakit flu babi pada 2003 silam.

Di Indonesia, pada 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo yang kala itu didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengumumkan adanya 2 Warga Negara Indonesia (WNI) terkonfirmasi terpapar COVID-19. Tercatat sampai 11 April 2020, jumlah WNI yang positif terpapar COVID-19 mencapai 3.842

pasien dengan penderita yang sembuh sebanyak 286 pasien dan wafat sebanyak 327 pasien. Penyebarannya pun kini berada pada 34 provinsi di Indonesia.

Sejak terkonfirmasinya pasien positif COVID-19 di Indonesia, ditambah lagi ditetapkannya status pandemi terhadap wabah COVID-19 oleh WHO, baik secara langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat. Mulai dari penutupan tempat wisata, penutupan layanan publik tatap muka, penerapan sistem bekerja dari rumah (*work from home*), sistem pembelajaran jarak jauh, pembatasan operasional transportasi publik, dan



**ANRI Bagikan *Hand Sanitizer* secara Gratis kepada Masyarakat**

juga hadirnya fenomena kelangkaan alat pelindung diri, masker dan *hand sanitizer*. Tingginya kebutuhan dan penggunaan masker dan *hand sanitizer* menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memperoleh barang tersebut. Jika pun ada, harga barang-barang tersebut tidak lagi sama dengan biasanya. Bahkan, beberapa barang ada yang dijual dengan harga mencapai 10 kali lipat dari harga biasa (tempo.co, 3/3/2020).

Tak dipungkiri, *hand sanitizer* memang menjadi “primadona” di tengah pencegahan penyebaran COVID-19. Meski membersihkan tangan dengan mencuci memakai sabun dan air mengalir lebih diutamakan, *hand sanitizer* tetap dicari masyarakat. Ini terjadi karena beberapa kegunaannya yang kerap diperlukan, terutama ketika seseorang kesulitan memperoleh air mengalir dan sabun atau ketika seseorang sedang berpergian. Apalagi kemasan *hand sanitizer* dalam botol kecil memudahkan untuk dapat dibawa ke mana saja sehingga dapat digunakan di mana dan kapan pun. Dengan demikian, keberadaan *hand sanitizer* diharapkan dapat membantu masyarakat menjaga kebersihan tangan sebagai bagian dari pola hidup bersih dan sehat seperti yang sudah kerap kali digaungkan oleh

pemerintah.

Kelangkaan dan tingginya harga *hand sanitizer* di pasaran, membuat Laboratorium Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Direktorat Preservasi ANRI berinisiatif dan berinovasi untuk memproduksi *hand sanitizer* secara mandiri dalam jumlah yang lebih banyak. Dalam memproduksi *hand sanitizer* ini, Laboratorium ANRI memiliki sarana prasarana sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan WHO, didukung sumber daya manusia dengan 3 orang berlatarbelakang pendidikan bidang kimia, 1 orang berlatarbelakang pendidikan farmasi dan juga turut disertai dukungan jajaran pimpinan di ANRI. Produksi *hand sanitizer* ini pun menjadi salah satu bentuk peran aktif ANRI untuk peduli terhadap situasi pandemi, khususnya dalam upaya menghadapi dan mencegah penyebaran COVID-19.

#### **Sudah Produksi untuk Kebutuhan Preservasi**

Sebelum dihadapkan pada situasi pandemi, ANRI juga telah memulai memproduksi *hand sanitizer* secara mandiri. Utamanya untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai di lingkungan Direktorat Preservasi. *Hand sanitizer*

menjadi antiseptik keseharian yang kerap digunakan pegawai yang bersentuhan langsung dalam kegiatan preservasi ataupun restorasi arsip. Apalagi sejak tim preservasi ANRI menangani Layanan Restorasi Arsip Keluarga yang makin banyak diminati masyarakat dan pelaksanaan proses restorasi arsip terhadap 97 kontainer boks arsip terdampak banjir milik Kantor Pertanahan Kota Bekasi, keberadaan *hand sanitizer* di ruang kerja mutlak harus tersedia.

Dalam melaksanakan pengujian kontrol kualitas (*quality control*) yang mendukung pelaksanaan kegiatan preservasi arsip secara menyeluruh, baik terhadap arsipnya, sarana prasarana kearsipan serta mendorong Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam melakukan pelestarian arsip (arsip konvensional, audio visual, dan elektronik). Dengan demikian, produksi *hand sanitizer* menjadi salah satu pewujudan peran penting Laboratorium ANRI dalam mendukung K3 bagi pegawai, khususnya di lingkungan Direktorat Preservasi.

#### **Sesuai Standar Badan POM dan WHO**

Sulitnya dan mahalnya harga *hand sanitizer* di pasaran, mendorong berbagai kalangan masyarakat membuat *hand sanitizer* secara mandiri. Kendati demikian, pembuatan *hand sanitizer* secara mandiri tetap harus sesuai dan mengacu pada standar resmi yang ditetapkan Badan POM dan WHO agar aman digunakan. Dalam wawancaranya dengan tim redaksi Majalah ARSIP, Direktur Preservasi ANRI Kandar menegaskan bahwa *hand sanitizer* yang diproduksi oleh Laboratorium ANRI, tata cara pembuatan dan kandungan materialnya sudah sesuai dengan ketentuan Badan POM dan WHO. Adapun bahan, peralatan dan cara pembuatan *hand sanitizer* oleh Laboratorium ANRI antara lain sebagai berikut:

Bahan-bahan:

## VARIA

- etanol atau alkohol 96%;
- gliserol 98%;
- hydrogen peroksida 3%;
- air steril atau aquadest.

Alat:

- gelas ukur (25 mililiter (ml), 50 ml, 1.000 ml);
- becker glass;
- botol kaca;
- batang pengaduk.

Cara membuat 1 liter (1.000 ml) hand sanitizer:

- Memasukkan etanol/alkohol sebanyak 833 ml dimasukkan dalam backer glass;
- Menyampurkan hydrogen peroksida 41,7 ml dan gliserol 14,5 ml;
- Menambahkan air steril atau aquadest hingga mencapai 1.000 ml;
- Mengaduk keseluruhan bahan di atas sampai homogen. Selanjutnya, hand sanitizer siap digunakan;
- Untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal dalam penggunaannya, hand sanitizer yang telah selesai diracik disimpan terlebih dahulu selama 72 jam.

Adapun dalam pengemasan serta pembagian *hand sanitizer* melibatkan seluruh pegawai di Kelompok Laboratorium dan Autentikasi Arsip serta beberapa pegawai di lingkungan Direktorat Preservasi. Tiap kemasan *hand sanitizer* masing-masing bervolume 100 ml.

Dikarenakan langka dan sulitnya memperoleh bahan baku pembuatan *hand sanitizer* terutama etanol 96%, maka sampai saat ini Laboratorium ANRI baru memproduksi *hand sanitizer* pada 18 dan 19 Maret,



**ANRI Bagikan *Hand Sanitizer* secara Gratis kepada Masyarakat**

serta 1 April 2020. Ini mungkin akan diproduksi kembali jika ada kebutuhan yang sangat mendesak.

### ***Hand Sanitizer* untuk Publik**

Di tengah situasi pandemi dan langkanya *hand sanitizer* di pasaran, produksi *hand sanitizer* Laboratorium ANRI dibagikan secara gratis kepada publik, baik publik internal maupun eksternal ANRI. Publik internal yang biasanya diprioritaskan untuk pegawai yang langsung melaksanakan kegiatan preservasi arsip, kini turut dibagikan pula kepada seluruh pegawai ANRI yang meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), non ASN, petugas kebersihan, *office boy*, dan petugas pengamanan. Sedangkan untuk publik eksternal, dibagikan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar ANRI, tamu yang berkunjung, dan masyarakat yang beraktivitas melewati jalan utama gedung ANRI di Ampera Raya, Jakarta Selatan. Pada saat pembagian *hand sanitizer* ini, tentunya tetap memperhatikan dan mengutamakan jarak fisik (*physical distancing*).

Hasilnya, baik publik internal

maupun eksternal memberikan apresiasi yang baik terhadap ANRI. Seperti halnya diungkapkan oleh salah seorang pengemudi ojek daring (*online*), pembagian *hand sanitizer* dari ANRI amat membantu dirinya untuk membersihkan tangan, terutama jika akan dan telah selesai memegang barang pesanan yang diantar ataupun usai menerima uang dari konsumen.

Saat ini *hand sanitizer* memang menjadi bagian dari pemenuhan gaya hidup di tengah kondisi pandemi COVID-19. Bentuk responsif Laboratorium ANRI dalam memproduksi dan membagikan *hand sanitizer* secara gratis kepada publik ini menjadi salah satu wujud partisipasi ANRI dalam membantu pencegahan dan penyebaran COVID-19. Oleh karena sudah semestinya, dalam menghadapi situasi seperti ini, penting bagi berbagai pihak untuk merespons dan menerapkan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, untuk bergerak dan bekerja bersama mencegah dan melawan corona (COVID-19). (tk)



Tato Pujiarto & Dimas P. Yuda

# LEMBAGA KEARSIPAN BERSIAP DIRI MENYELAMATKAN ARSIP PANDEMI COVID-19

Sudah beberapa bulan berlalu sejak Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan adanya 2 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang dinyatakan positif COVID-19 pada 2 Maret 2020 lalu. COVID-19 atau 2019-nCoV adalah jenis baru dari coronavirus yang menyerang manusia dan mengakibatkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian.

Kemunculan COVID-19 pertama kali diketahui di Kota Wuhan, China, pada Desember 2019. Barangkali tidak banyak yang menyangka bahwa penyakit yang awalnya dianggap sebagai gejala *pneumonia* misterius secara cepat dan mematikan menyebar ke seluruh kota tersebut dan akhirnya dunia. Berdasarkan catatan *World Health Organizations* (WHO), COVID-19 telah menyebar

ke 212 negara/kawasan dengan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1,395,136 orang dimana 81,580 orang dinyatakan meninggal ([www.who.int](http://www.who.int), 9/4/20).

Tidak terkecuali di Indonesia, kasus pertama yang diumumkan oleh pemerintah merupakan pengembangan dari warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia dan dinyatakan positif COVID-19. Sejak pengumuman pertama kali oleh Presiden tentang adanya masyarakat yang positif COVID-19, sampai dengan tulisan ini dibuat sebanyak 32 provinsi di Indonesia telah melaporkan adanya warga yang terinfeksi COVID-19, dengan total seluruh kasus mencapai 3,293 orang terkonfirmasi positif dimana sebanyak 280 orang meninggal, dan 252 dinyatakan sembuh (Tempo, 9/4/20).

Berbagai upaya untuk mempercepat penanganan COVID-19

telah dan terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mulai dari penerapan *physical distancing* atau menjaga jarak fisik, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sampai dengan menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Beberapa kebijakan yang diterbitkan misalnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang menambah belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 sebesar Rp 405,1 triliun untuk meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB, Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

Sama halnya dengan negara, peran serta masyarakat dalam penanganan COVID-19 ini pun tidak

kalah penting. Kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah untuk membantu pencegahan penularan wabah ditunjukkan dengan ikut serta berpartisipasi mendukung kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Para tokoh dan pemuka agama, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan turut membantu mencegah penularan COVID-19 ini dengan mengurangi atau bahkan meniadakan pertemuan atau ibadah yang melibatkan banyak orang. Bahkan di tingkat lingkungan warga beberapa telah menerapkan isolasi mandiri dan membangun jaringan koordinasi serta komunikasi apabila ada salah satu dari warganya yang menunjukkan gejala terinfeksi COVID-19.

### Pandemi dan Arsip

Seluruh peristiwa maupun kegiatan terkait penanganan COVID-19 baik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sesungguhnya terekam dalam arsip. Hal ini tidak terlepas dari definisi arsip berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Definisi tersebut jika dikaitkan dengan pandemi COVID-19, pada intinya adalah bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam penanganan COVID-19 nantinya adalah bagian dari sejarah perjalanan bangsa dalam menghadapi ancaman bencana non-

alam yang terekam dalam arsip dan dapat menjadi pelajaran (*lesson learn*) bagi generasi yang akan datang.

Apabila kita melihat kembali pada arsip yang ada, peristiwa yang hampir sama pernah terjadi di wilayah Hindia Belanda. Tepatnya pada Tahun 1918 pernah terjadi pandemi influenza (dikenal dengan Flu Spanyol) yang terjadi di banyak negara di dunia, termasuk Hindia Belanda. Sebuah penelitian oleh Priyanto Wibowo dkk yang terbit tahun 2009 dengan judul, *Yang Terlupakan: Sejarah Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda*, menjelaskan pandemi influenza dengan sangat baik dan berhati-hati mengingat peristiwa tersebut dapat memberikan pelajaran bagi generasi setelahnya dalam membuat suatu keputusan atau kebijakan.

Penelitian tersebut mengambil sumber dari arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan sumber lainnya, seperti misalnya arsip *Kantoor voor Gezondheid Dienst* Tahun 1910-1942 dalam bundel *Algemeen Secretarie Buitenzorge* (1892-1942) atau Khazanah Sekretariat Hindia Belanda, bundel *Binnenlandsch Bestuur* khususnya mengenai bagian *Inlandsche Hoofden*, koleksi *Memorie van Overgrave*, jenis arsip leksikografi atau jenis arsip yang dicetak dan diterbitkan untuk dibaca publik seperti *Koloniaal Verslag*, *Regeeringsalmanak*, *Staatsblad van Nederlandsch Indie* dan *Bijblad van het Staatsblad*, dan lain-lain (Wibowo, 2009).

*Pandemi influenza* yang menyerang wilayah Hindia Belanda pada saat itu hampir mirip dengan penyebaran COVID-19 saat ini dimana hubungan perdagangan dan kontak manusia lintas negara secara cepat membantu penyebaran penyakit ke

beberapa negara. Pandemi tersebut merupakan sebuah fenomena penting dalam sejarah kesehatan mengingat banyaknya korban baik yang tertular maupun meninggal (Wibowo, 2009). Singkatnya, penyebaran influenza yang masif itu pada akhirnya mendorong pemerintah kolonial untuk menerbitkan *Influenza Ordonnantie* pada tahun 1920 yang mengatur mengenai pembatasan kontak awak kapal dan penumpang dengan penduduk, serta opsi karantina. Peraturan tersebut juga mengatur ancaman pidana bagi para pelanggarnya (Wibowo, 2009).

Terbitnya peraturan tersebut selain menunjukkan keseriusan pemerintah kolonial dalam menghadapi pandemi, nyatanya juga sempat ditentang oleh beberapa pihak seperti perusahaan perdagangan yang menguasai jalur-jalur perdagangan. Hal tersebut dikarenakan dianggap mengganggu aktivitas ekonomi, dan Direktur Kehakiman yang menganggap peraturan tersebut membatasi atau melarang hak berkumpul dan berserikat (*recht van Vereeniging en vergadering*) tanpa alasan politik yang kuat (Wibowo, 2009).

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bagaimana sebuah peristiwa kesehatan yang penting pada masa lalu terjadi, serta bagaimana pemerintah pada saat itu mengambil langkah-langka kebijakan untuk menghadapi masalah yang dihadapi. Penelitian tersebut juga menggambarkan bagaimana suasana zaman (*zeitgeist*) ketika kebijakan tersebut dibuat termasuk resistensi dan penerimaan dari golongan masyarakat. Lebih dari itu, penelitian tersebut telah memberikan contoh bagaimana sebuah peristiwa penting pada masa lalu terekam melalui arsip dan saat ini dapat dijadikan rujukan

bagi para pembuat kebijakan dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Masih terkait dengan kearsipan, lantas bagaimanakah lembaga kearsipan sebagai penyelenggara kearsipan semestinya berperan dalam situasi seperti sekarang ini?

### **Peran Lembaga Kearsipan**

Tentu saja lembaga kearsipan memiliki peran strategis dalam menghadapi pandemi COVID-19, lembaga kearsipan memiliki mandat yang diberikan langsung oleh undang-undang dengan lingkup mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota, serta perguruan tinggi. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga kearsipan dalam konteks peristiwa pandemi COVID-19 ini adalah melaksanakan persiapan kegiatan akuisisi arsip terkait peristiwa tersebut.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pandemi COVID-19 ini telah menghasilkan serangkaian kebijakan yang diputuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, peristiwa ini juga telah mendorong langkah-langkah yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat. Baik langkah-langkah kebijakan pemerintah maupun partisipasi masyarakat sudah barang tentu terekam di dalam arsip. Arsip yang tersebar di pemerintah maupun masyarakat tersebut pada akhirnya akan menjadi sebuah arsip statis, atau dalam pengertian singkatnya adalah arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan.

Bagi lembaga kearsipan nasional, hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah menetapkan kebijakan akuisisi arsip statis COVID-19. Sebuah kebijakan yang proaktif untuk mencegah ketiadaan arsip tersebut

baik karena kehilangan maupun kerusakan akibat kurangnya kesadaran (*awareness*) untuk menjaga arsip. Arsip yang dapat diakuisisi misalnya mengenai kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diputuskan oleh pemerintah di tingkat pusat (Presiden, Kementerian Kesehatan, serta lembaga terkait seperti Gugus Tugas COVID-19, Kepolisian, dan lain-lain), arsip mengenai data tentang jumlah, sebaran, dan pola penularan kasus COVID-19, dan lain-lain.

Kemudian bagi lembaga kearsipan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kebijakan akuisisi dapat mengacu pada pedoman kebijakan akuisisi arsip statis COVID-19 yang dibuat oleh lembaga kearsipan nasional. Adapun untuk jenis arsip yang dapat diakuisisi kurang lebih hampir sama dengan tingkat nasional, hanya lebih dikhususkan pada arsip yang tercipta di daerah sesuai dengan jenjang dan skala kewenangannya. Misalnya, arsip mengenai data kesehatan kasus-kasus COVID-19 yang terjadi di daerahnya, arsip mengenai kebijakan penanganan COVID-19 yang diputuskan oleh kepala daerah baik itu gubernur, bupati/walikota, Gugus Tugas COVID-19 di daerah, dan lain-lain.

Sedangkan untuk lembaga kearsipan perguruan tinggi, akuisisi arsip statis mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti maupun mahasiswa untuk menangani atau lebih tepatnya menemukan obat COVID-19, di samping arsip mengenai kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Dalam kasus yang misalnya lembaga kearsipan perguruan tinggi dapat mengakuisisi arsip mengenai kajian yang dilakukan peneliti ataupun pakar dalam rangka memberikan masukan bagi pemerintah untuk memutuskan

kebijakan penanganan pandemi COVID-19.

Akuisisi arsip statis COVID-19 adalah salah satu peran yang harus dilakukan oleh lembaga kearsipan nasional, daerah, maupun perguruan tinggi. Selain itu tentu saja masih ada peran kearsipan lain yang dapat dilakukan. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah menjamin pelaksanaan dari peran tersebut secara disiplin dan konsisten serta berjenjang mulai dari tingkat nasional sampai dengan daerah.

Komitmen yang tinggi pimpinan lembaga kearsipan untuk melaksanakan akuisisi arsip statis COVID-19 dan komitmen pencipta arsip untuk menjamin ketersediaan arsip statis tersebut tentu saja sangat penting. Sekali lagi lembaga kearsipan dan pencipta arsip harus mau dan mampu membangun kesadaran pola pikir (*mindset*) bahwa arsip statis COVID-19 adalah arsip yang bernilai guna kesejarahan yang sangat berharga dan dapat dimanfaatkan sebagai pelajaran untuk membantu perumusan kebijakan oleh generasi mendatang.

Sambil berharap agar pandemi COVID-19 segera lekas berakhir, maka tidak ada salahnya apabila lembaga kearsipan tetap menyiapkan rencana kegiatan akuisisi arsip pandemi COVID-19 secara berjenjang. Dengan cara berpikir seperti itulah kemudian arsip tidak hanya dipandang sebelah mata sebagai hal yang tercipta dari adanya suatu kegiatan atau peristiwa semata untuk kemudian hanya disimpan sampai berdebu di sudut ruangan, tetapi arsip sebagai bahan rujukan untuk menghadirkan keputusan atau kebijakan yang strategis dan memberikan manfaat bagi masyarakat.



# ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

## SUMBER INFORMASI YANG MENGINSPIRASI

**S** iapa yang tidak tahu tentang perpustakaan? Hampir semua orang dari berbagai usia tahu mengenai perpustakaan. Secara umum perpustakaan dikenal sebagai tempat untuk membaca buku mulai dari buku langka, buku khusus mengenai tema tertentu hingga buku-buku kontemporer lainnya. Semua orang bisa berkunjung ke sana. Setiap pengunjung yang datang dapat mendaftarkan diri menjadi anggota. Prosesnya pun tidak sulit dan cenderung cepat. Kemudahan dalam mencari buku yang diinginkan membuat perpustakaan menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi terutama bagi para pelajar dan mahasiswa serta peneliti. Tidaklah sulit untuk meminjam buku untuk dibaca di sana. Umumnya pengunjung dapat melihat katalog menggunakan komputer via internet untuk mencari judul buku yang diinginkan untuk kemudian akan muncul lokasi/lantai di mana buku tersebut berada dan di tempat itu nanti pengunjung dapat meminjam buku yang diinginkan.

Namun, bagaimana dengan arsip atau lembaga kearsipan? Lembaga kearsipan yang ada di Indonesia telah berdiri sejak masa kolonial Hindia Belanda dengan nama *Landsarchieff*. Tepatnya tahun 1892, kegiatannya sempat vakum

saat Indonesia baru saja menyatakan kemerdekaannya tetapi kemudian dibuka dan aktif kembali. Sempat dipimpin oleh orang Belanda bernama Prof. W.Ph.Coolhaas pada tahun 1947-1949 dan Mej. D.A.Hoogendijk yang menggantikan tugas Coolhaas di tahun 1950-1951 kemudian tahun 1951-1957 Prof. R.Soekanto diangkat menjadi kepala lembaga kearsipan yang berganti nama menjadi Arsip Negara. Namun, tampaknya walaupun telah lama berdiri, masih banyak orang yang tidak tahu tentang arsip.

Pada umumnya masyarakat mengetahui arsip adalah dokumen tetapi tidak banyak yang tahu bahwa lembaga kearsipan nasional yang untuk selanjutnya penulis akan menggunakan terminologi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyimpan dokumen bersejarah bangsa Indonesia. Apa yang ada di dalam benak masyarakat pada umumnya yang disimpan di ANRI hanyalah sekedar dokumen biasa yang malah mungkin tidak bernilai sekunder atau kesejarahan. Koleksi arsip di ANRI sebagian besar berupa dokumen lepasan (tidak dijilid) dan unik (hanya satu dari jenisnya dan tidak ada di tempat lain. Pada umumnya yang memanfaatkan informasi di dalam arsip adalah mahasiswa atau peneliti yang memang mencari informasi

melalui sumber primernya. Untuk dapat membaca sebuah arsip pun ada prosedur yang harus dilalui (pada kesempatan lain akan penulis buat sebuah artikel tersendiri). ANRI tidak mengenal sistem keanggotaan tetapi bagi pengguna yang memang ingin membaca arsip setelah memenuhi persyaratan dapat meminjam arsip dengan terlebih dahulu menggunakan sarana bantu penemuan kembali arsip (*finding aid*) untuk kemudian meminta nomor arsip yang diinginkan.

### Arsip dan Perpustakaan

Secara umum perpustakaan dapat didefinisikan sebagai koleksi buku dan/atau bahan cetak atau non-cetak lainnya yang ditata dan dipelihara untuk digunakan. Para pengunjung perpustakaan dapat mengakses materi yang diinginkan di dalam perpustakaan maupun di rumah atau tempat lain via internet untuk mengecek informasinya. Keberadaan perpustakaan sendiri bertujuan untuk membuat koleksi mereka tersedia bagi pengunjung (pengguna).

Lembaga kearsipan, seperti halnya perpustakaan juga memiliki tujuan untuk membuat koleksinya dapat digunakan bagi khalayak umum tetapi memiliki perbedaan dari jenis bahan yang disimpan dan juga cara mengaksesnya.

Berdasarkan bahan yang disimpan: arsip dapat menyimpan dokumen yang diterbitkan maupun yang tidak dalam berbagai format. Contohnya: surat, foto, gambar bergerak, dan rekaman suara, karya seni, buku-buku, buku harian, artefak dan bentuk digital lain yang berkaitan. Bahan dari koleksi arsip biasanya unik, khusus, atau dalam bentuk objek yang jarang ditemukan yang artinya hanya sedikit dari bahan tadi yang ada di dunia atau bahkan hanya satu dari jenisnya.

Akses material arsip: karena bahan material dalam koleksi arsip adalah unik maka arsiparis yang bertugas merawat bahan/media itu berusaha untuk melestarikannya agar dapat digunakan untuk hari ini, dan untuk generasi (peneliti) di masa depan. Arsip memiliki pedoman khusus mengenai bagaimana orang dapat menggunakan koleksi untuk melindungi materi dari kerusakan fisik dan pencurian, serta isi informasi arsipnya agar dapat diakses oleh generasi mendatang. Sebagai contoh: memanfaatkan buku dari perpustakaan untuk digunakan/dibaca dengan intensitas yang cukup tinggi dapat menyebabkan buku tersebut terlepas dari sampulnya/berantakan/rusak, tetapi kemudian perpustakaan dapat membeli salinan baru dari buku yang sama. Hal tersebut tidak dapat dilakukan pada arsip. Jika sebuah arsip, sebagai contoh buku harian tulisan tangan dari seorang tokoh bersejarah, dimanfaatkan oleh pengguna/dibaca dalam intensitas yang tinggi akan menyebabkan kerusakan fisik yang sama (seperti pada contoh buku tadi), tetapi sayangnya buku harian tersebut tidak tergantikan.

Harus diperhatikan bahwa ada banyak tumpang tindih antara (fungsi lembaga) arsip dan perpustakaan.

Arsip mungkin memiliki perpustakaan sebagai bagian dari namanya, atau bisa saja arsip menjadi salah satu bagian di dalam perpustakaan.

### Apa itu arsip?

*Society of American Archivists* (SAA), organisasi profesional untuk arsiparis di Amerika Serikat, mendefinisikan arsip sebagai organisasi yang memelihara warisan dokumenter kelompok tertentu baik itu kota, provinsi atau negara, bisnis, universitas, atau komunitas yang secara khusus menyimpan catatan yang dibuat oleh individu, organisasi, dan pemerintah mengenai kegiatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Para arsiparis-lah, para profesional yang menilai, mengumpulkan, mengatur, melestarikan, dan menyediakan akses ke arsip, catatan arsip yang memperkuat memori kolektif dan melindungi hak-hak orang, properti, dan identitas dengan arsip yang berguna bagi semua orang tidak terkecuali bagi mereka yang belum pernah menggunakannya secara langsung. *National Records and Research Administration* (NARA) mendefinisikan arsip dengan cara yang sama, yaitu tempat di mana orang dapat datang untuk mengumpulkan fakta, data, dan bukti langsung dari surat, laporan, catatan, memo, foto, dan sumber primer lainnya.

*International Council on Archives* (ICA), mendefinisikan arsip sebagai produk sampingan dokumenter dari aktivitas manusia yang dipertahankan untuk nilai jangka panjangnya yang menjadi catatan kontemporer yang dibuat oleh organisasi atau individu pada saat mereka melakukan bisnis mereka yang menyediakan jendela tentang peristiwa masa lalu yang datang dalam berbagai format baik disimpan oleh lembaga publik atau swasta bersama dengan sumber daya

tertentu. Dikatakan bahwa agar arsip dapat menjadi sumber terpercaya oleh masyarakat, arsip harus memiliki unsur keaslian, kepenggunaan, integritas, dan kegunaan, tetapi tidak boleh dianggap sebagai “kebenaran” tetapi hanya sebagai “catatan kontemporer dari suatu individu atau organisasi dengan tingkat keterlibatan dan sudut tertentu”, sesuatu yang harus diperhatikan oleh pengguna arsip. Definisi ini juga menyebutkan dikatakan arsip hanya jika mereka memiliki “nilai historis jangka panjang” dan bahwa dokumen tidak diperlukan untuk “penggunaan yang mereka buat”, dengan dokumen-dokumen ini datang “dalam berbagai media analog dan digital - bukan hanya dokumen kertas”. Sumber (informasi) dalam arsip adalah pemerintah, pengadilan, bisnis, serikat pekerja, organisasi keagamaan, universitas dan sekolah, badan militer, teater, amal, komunitas, individu, dan keluarga.

Berdasarkan dua pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa arsip merupakan sebuah organisasi atau institusi, baik fisik atau *online*, yang memelihara warisan dokumenter dari tangan pertama (dianggap tidak tergantikan, dan unik serta memiliki nilai permanen atau jangka panjang) atau memori jangka panjang dari suatu kelompok tertentu, apakah sebuah bisnis, pemerintah, atau organisasi non-pemerintah, atau seorang individu, dan juga merupakan tempat (baik publik, atau pribadi) di mana orang dapat pergi untuk mengumpulkan data, fakta, dan bukti langsung tentang masa lalu dari berbagai catatan, baik dalam bentuk analog maupun digital.

Hanya-lah arsiparis yang dapat membantu pengguna menemukan informasi di dalam arsip dan bertanggung jawab atas arsip itu

sendiri. Arsiparis-lah yang bekerja untuk membuat informasi di dalamnya dapat diakses semaksimal mungkin, mereka juga yang merawat dan mengendalikan arsip. Penting untuk dipahami bahwa arsip tidak boleh dianggap sebagai sebuah “kebenaran” tetapi hanya sebagai “catatan kontemporer” dari organisasi atau individu tertentu yang perlu memiliki keaslian, integritas, dan kegunaan untuk menjadi sumber daya terpercaya oleh masyarakat.

### Apa itu perpustakaan?

*American Library Association* (ALA), organisasi profesional untuk pustakawan, mengatakan dalam pendahuluan laporan *State of America's Libraries* menyatakan bahwa perpustakaan di Amerika Serikat memainkan peran penting dalam memperkuat masyarakat melalui pendidikan dan pembelajaran seumur hidup. Perpustakaan adalah mikrokosmos dari masyarakat yang lebih besar dan berperan penting serta unik dalam komunitas yang mereka layani dan menyediakan lingkungan yang inklusif di mana semua diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, melayani sebagai garis hidup bagi sebagian dari kita komunitas bangsa yang paling rentan sambil bekerja sebagai katalisator dalam mengembangkan solusi berbasis komunitas yang memperkuat komunitas.

Definisi perpustakaan menurut *Society of American Archivists* (SAA) yang mewakili bidang kearsipan, mengatakan bahwa perpustakaan umum di kota-kota atau universitas dapat didefinisikan secara umum sebagai koleksi buku dan/atau bahan cetak atau non-cetak lainnya yang diorganisasikan dan dipelihara untuk digunakan. Pengguna perpustakaan dapat mengakses materi di

perpustakaan langsung melalui internet, atau dengan memeriksa koleksi perpustakaan untuk digunakan di rumah dan bahwa perpustakaan ada untuk membuat koleksi mereka tersedia bagi pengguna.

Berdasarkan dari dua penjelasan di atas, maka perpustakaan dapat diartikan sebagai lembaga, baik daring atau langsung, yang menawarkan pengguna akses gratis ke banyak informasi (buku) yang tidak dapat ditemukan di tempat lain melalui akuisisi, pelestarian, dan akses ke berbagai bahan (terkadang melalui pinjaman), menjadikan mereka pembagi informasi utama, mitra masyarakat, lembaga demokratis dan tempat untuk keterlibatan masyarakat. Lembaga-lembaga ini juga memiliki tujuan utama seperti akses informasi, “kebebasan intelektual”, peningkatan (kualitas) individu, literasi informasi, dan pembelajaran berkelanjutan, membantu pengguna menemukan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna.

Dapat juga dikatakan bahwa pustakawan adalah pakar informasi yang tidak hanya memilih bahan yang relevan, baik buku atau hal lain, untuk suatu komunitas, tetapi juga membuat program khusus, dan menghubungkan orang dengan informasi.

### Bagaimana arsip dan perpustakaan itu berbeda dan mengapa hal itu penting?

Perpustakaan dan arsip pada dasarnya berbeda. Sebagaimana sebut oleh *Society of American Archivists* (SAA), pustakawan dan arsiparis sama-sama melestarikan, mengumpulkan, dan membuat bahan-bahan agar dapat diakses untuk penelitian, mereka berbeda dalam hal mengatur, menjelaskan,

dan menggunakan bahan-bahan dalam koleksi itu sendiri. Material dalam koleksi arsip adalah “unik dan sering kali tidak tergantikan, sedangkan perpustakaan biasanya dapat memperoleh salinan baru dari buku yang usang atau hilang”. Selain itu, SAA mencatat bahwa arsip ada untuk membuat koleksi tersedia untuk pengguna, menyimpan materi yang diterbitkan dan tidak diterbitkan dalam format apa pun, tetapi sering kali merupakan “benda unik, khusus, atau langka, yang berarti sangat sedikit dari mereka ada di dunia, atau mereka adalah satu-satunya dari jenisnya” yang mana hal ini tidak berlaku untuk bahan pustaka. Dengan arsip yang menyimpan catatan seperti itu, mereka memiliki pedoman khusus untuk digunakan, tidak seperti perpustakaan. SAA mengakui bahwa “ada banyak tumpang tindih antara arsip dan perpustakaan” karena “arsip mungkin memiliki perpustakaan sebagai bagian dari namanya, atau arsip mungkin merupakan departemen dalam perpustakaan”.

*National Archives of Australia* (NAA) memberikan argumen kuat mengenai perbedaan antara arsip dan bahan pustaka. Bahan pustaka biasanya diterbitkan dan sering kali dimiliki oleh perpustakaan atau individu lain dengan bahan yang jika hilang atau dicuri biasanya dapat diganti, tetapi arsip adalah catatan asli, sering kali unik dan biasanya tidak tergantikan. Ini berarti bahwa jika pengguna menggunakan arsip sering kali itu artinya pengguna menggunakan satu-satunya salinan yang ada. Dikarenakan fisik arsip yang rapuh dan informasi yang dikandungnya rentan terhadap kerusakan atau kehilangan melalui penanganan yang konstan atau tidak tepat ini berarti bahwa harus ada aturan ketat yang mengatur mengenai penanganan dan

penggunaannya. Akibatnya, catatan-catatan ini disimpan dalam kondisi yang dikendalikan lingkungan untuk meminimalkan kerusakannya dan tidak dapat dilihat (terpajang) di rak seperti umumnya di perpustakaan; dan kemungkinan tidak dapat dipinjam. Dengan demikian, ketika arsip itu diminta oleh para peneliti untuk digunakan maka mereka harus menggunakannya di bawah pengawasan. Dikatakan juga bahwa sementara bahan pustaka memiliki katalog dan disimpan sesuai dengan subjek dan sistem klasifikasi lainnya, sedangkan arsip diatur dengan cara menjaga nilainya sebagai bukti.

*National Archives of Australia* (NAA) juga menguraikan dua aturan yang mengatur penataan arsip: bahwa arsip individu atau agensi tidak akan bercampur atau berbaur dengan agensi atau individu lain dan bahwa arsip akan dipertahankan dalam urutan dan sistem pengarsipan yang sama dengan yang mereka miliki pada saat mereka diciptakan dan dipelihara. Pengaturan ini memungkinkan para peneliti di masa sekarang untuk menggunakan informasi dan memahami sesuatu tentang cara departemen yang menciptakan arsip ditata dan dikelola. Menata ulang dokumen-dokumen ini menjadi pengaturan subjek akan menghancurkan hubungan kontekstual ini dan akan mengurangi nilainya sebagai sumber bukti dan informasi. Prinsip asal usul dan tatanan asli dalam pengaturan arsip memiliki implikasi terhadap cara mereka digunakan untuk penelitian yang berarti bahwa dalam banyak kasus arsip dibuat untuk memenuhi kebutuhan mendesak lembaga atau individu dan bukan beragam kebutuhan penelitian masyarakat luas beberapa tahun kemudian. *National Archives of Australia* (NAA)

juga mengingatkan bahwa karena arsip tidak diatur berdasarkan subjek maka menemukan informasi yang pengguna inginkan sering kali akan memakan waktu, tetapi juga bisa menjadi sesuatu yang menantang dan menarik.

Arsip Nasional Inggris menambahkan bahwa buku di perpustakaan sering kali merupakan sumber informasi sekunder, sedangkan informasi yang terdapat di dalam arsip adalah sumber primer yang memberikan informasi dari tangan pertama atau bukti yang berkaitan dengan peristiwa atau angka sejarah. Buku sebagai koleksi perpustakaan diatur berdasarkan subjek dan penulis sedangkan informasi di dalam arsip diatur sesuai dengan orang atau organisasi yang menciptakannya. Hal ini berarti bahwa pengguna perlu melihat arsip yang berasal dari beberapa sumber dan tidak hanya satu pada saat mengumpulkan informasi.

Perbedaan kedua lembaga penyedia informasi tersebut dapat dilihat pada tabel yang mendeskripsikan lembaga arsip dan perpustakaan.

Sebagai lembaga yang sama-sama memberikan informasi terkait erat dengan ilmu pengetahuan

Akuisisi koleksi

Arsip	Perpustakaan
<b>Koleksinya biasanya diakuisisi langsung dari penulis atau pencipta arsipnya.</b>	Koleksinya biasanya diakuisisi melalui penerbit atau vendor perpustakaan.
<b>Koleksinya biasanya didapatkan karena donasi dan bukan pembelian.</b>	Koleksinya biasanya didapatkan melalui pembelian tetapi perpustakaan juga terkadang mendapatkan hadiah dari perorangan.
<b>Koleksinya biasanya diseleksi oleh arsiparis yang memiliki pengetahuan luas mengenai documentary heritage (dokumen warisan dunia).</b>	Koleksinya biasanya diseleksi oleh pustakawan spesialis subjek.
<b>Koleksinya biasanya diseleksi berdasarkan kebijakan akuisisi arsip dan mandat lembaga.</b>	Koleksinya biasanya diseleksi berdasarkan kebijakan koleksi perpustakaan dan mandat lembaga.

kepada masyarakat, saat ini ada pemikiran untuk menyatukan kedua lembaga tersebut. Di Indonesia, pemikiran mengenai penyatuan/ peleburan ini mungkin merupakan sesuatu yang baru, tetapi tidak bagi negara lain. Beberapa negara di dunia telah menyatukan beberapa lembaga yang memberikan informasi ke dalam satu 'wadah'. Seperti Selandia Baru yang dikenal dengan istilah 'GLAM' yang merupakan akronim dari *Gallery, Library, Archive, and Museum*. Tetapi seperti apa dan bagaimana penyatuan yang dimaksud perlu dilakukan dilakukan riset lebih mendalam lagi, sehingga penulis tidak akan membahasnya di sini.

Namun, apabila memang akan dilakukan penyatuan terhadap kedua lembaga tadi, kiranya ada beberapa hal yang harus disiapkan dan juga dipertimbangkan. Contohnya kedua lembaga harus mempertimbangkan manfaat dan resiko jika melakukan penyatuan/kolaborasi. Beberapa manfaat dan resiko dari penyatuan antara kedua lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

Manfaat

- (Jumlah koleksi) keseluruhan menjadi lebih besar
- Menghemat biaya operasional.
- Menghasilkan koleksi yang lebih

## VARIA

### Tipe koleksi

Arsip	Perpustakaan
Kebanyakan merupakan bahan/dokumen yang tidak diterbitkan seperti surat, manuskrip dan lain sebagainya.	Kebanyakan merupakan bahan/dokumen yang diterbitkan seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya.
Koleksinya merupakan kelompok-kelompok dari item yang terpisah.	Koleksinya merupakan item yang terpisah.
Bahan/dokumennya biasanya unik dan tidak tersedia di tempat lain.	Bahan koleksinya seringkali tersedia di tempat lain.

### Penataan koleksi

Arsip	Perpustakaan
Koleksinya ditata berdasarkan prinsip <i>provenance</i> dan <i>original order</i> .	Koleksinya ditata berdasarkan klasifikasi subjek.
Arsiparis melakukan penataan dengan berusaha mempertahankan penataan dari pencipta arsipnya.	Pustakawan menata koleksinya tanpa memperhatikan bagaimana pencipta menata koleksinya.
Urutan intelektual koleksi disajikan dalam sarana bantu penemuan kembali arsip ( <i>finding aid</i> ). Urutan fisik koleksi tergantung pada ukuran dan format bahan dan mungkin tidak cocok dengan urutan intelektual koleksi.	

### Dekripsi koleksi

Arsip	Perpustakaan
Arsip dideskripsikan dalam tingkatan deskripsi yang berbeda di dalam koleksi atau fonds (contoh: fonds, series, sub-series, file, item).	Koleksinya dideskripsikan pada level individual (contoh: katalog untuk sebuah buku).
Deskripsi tiap bagian dari koleksinya terhubung bersama di dalam deskripsi arsip yang 'multi-level' atau <i>finding aid</i> .	Deskripsi item individual tidak terhubung satu sama lain terkecuali mereka membentuk sebuah series dari item.
Sarana bantu penemuan kembali arsip ( <i>finding aid</i> ) sering mengandung titik akses seperti judul subjek, judul geografis, dan catatan otoritas (contoh: nama pencipta dari materi arsip).	Katalog perpustakaan berisi tentang judul subjek

### Akses

Arsip	Perpustakaan
Arsip tidak dapat keluar/beredar (dari lembaga kearsipan) dan harus diakses di tempat. Hanya arsip tertentu yang tersedia <i>online</i> .	Koleksi buku perpustakaan kebanyakan dapat keluar/beredar atau dapat diakses online. Beberapa item (seperti koleksi khusus) tidak dapat beredar keluar (dari perpustakaan).
Akses terhadap informasi tertentu bisa jadi terbatas (contoh: dokumen universitas, berkas personal, data penelitian dan lain sebagainya).	Sebagian besar bahan pustaka diterbitkan dan tidak mengandung informasi terbatas. Akses ke sebagian besar konten daring (mis., Ebooks, jurnal, dll.)
Arsip harus ditangani dengan hati-hati. Sarung tangan putih biasanya diperlukan untuk menangani bahan fotografi.	Bahan pustaka harus ditangani dengan hati-hati.

baik, lebih banyak pengguna yang dapat memanfaatkan koleksi.

- Mengumpulkan materi dari

beberapa institusi menjadi satu koleksi yang luar biasa, dengan demikian meningkatkan akses ke

semua koleksi.

- Pengembangan sumber daya manusia
- Meningkatkan kesadaran publik dan akses ke sumber daya [pembelajaran vital].

Resiko

- Resiko kapasitas, atau prospek bahwa mitra tidak akan dapat melakukan tugas yang disepakati. Ini mungkin karena masalah dengan pembiayaan, manajemen, kesulitan teknis atau alasan lainnya. Risiko strategi mengacu pada kemungkinan bahwa proyek mungkin tidak selesai sesuai rencana. Risiko komitmen menunjukkan kemungkinan bahwa tidak semua mitra dapat berkomitmen penuh untuk proyek, karena berbagai alasan. Risiko kompatibilitas, jenis risiko akhir yang diidentifikasi, mengacu pada bahaya yang aset dan liabilitas masing-masing mitra tidak cocok yang kesemuanya bersumber dari inovasi, kompleksitas, dan saling ketergantungan institusional.
- Masing-masing lembaga memilih 'bahasa' yang berbeda. Hal ini termasuk standar metadata yang berbeda.

- Masing-masing lembaga memiliki prosedur yang berbeda. Risiko lain yang mungkin terjadi terhadap kemitraan dapat mencakup sikap yang menentang, kurangnya pengetahuan tentang peran masing-masing mitra, dan kurangnya tujuan organisasi. (ii)



**Siswantini Suryandari**

# **TANTANGAN KEARSIPAN PADA ERA REVOLUSI 4.0**

**S**ebberapa penting arsip itu? Pertanyaannya sederhana tapi terkadang sulit untuk diungkapkan. Bagi generasi milenial, apakah arsip masih perlu? Itu bagian dari pertanyaan lanjutannya. Berbicara arsip sama saja berbicara identitas. Baik itu identitas diri maupun identitas negara. Sebagai gambaran sederhana adalah ketika kita ditanya seseorang, kapan Anda lahir? Lalu Anda menjawab 1 Januari 1950. Buktinya apa kalau Anda lahir pada 1 Januari 1950? Buktinya akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Dalam akte kelahiran tercantum nama orang tua, nama anak yang lahir, tanggal berapa lahir, dan keterangan tempat kelahiran. Ini adalah bukti identitas kelahiran Anda dalam bentuk arsip.

Demikian juga dengan hari kemerdekaan RI. Jika ada yang menanyakan, kapan RI merdeka?

Jawabnya 17 Agustus 1945. Bagaimana bisa membuktikan bahwa Hari Kemerdekaan RI adalah 17 Agustus 1945? Kita dapat merujuk pada dokumen teks proklamasi yang ditulis Bung Karno. Dokumen negara tersebut menjadi arsip negara sebagai bukti bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945.

Arsip dapat menjadi bagian dari identitas seseorang, lembaga, negara dan bangsa. Oleh sebab itu arsip adalah sesuatu yang sangat penting. Pendokumenan apalagi menyangkut pemerintahan sangat vital. Namun tertib untuk mengarsipkan atau mendokumentasikan semua produk yang dikeluarkan oleh pemerintah, belum sepenuhnya.

Budaya mengarsipkan atau mendokumentasikan adalah budaya dari Barat. Masyarakat Indonesia

mengenal sistem kearsipan saat Belanda datang menjajah Indonesia. Di situlah terlebih mereka yang bersekolah dan bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda, mulai belajar untuk mendokumentasikan semua laporan menjadi sebuah arsip yang akan terus dipakai berkelanjutan.

Namun di Indonesia, budaya mendokumentasikan ini belum mendarah daging. Selain itu, pada saat Indonesia merdeka, masih sangat sedikit kaum intelektual. Namun seiring perkembangan zaman, sebagian besar penduduk Indonesia sudah mengenal pendidikan, maka budaya mendokumentasikan ini mulai berjalan, walau belum sepenuhnya tertib.

Di tingkat desa, belum sepenuhnya tertib arsip sehingga sering menimbulkan persoalan. Sebagai

contoh sengketa tanah antardesa sering memicu konflik karena mereka hanya mengesahkan tanah dengan cerita dari kakek-nenek moyang mereka. Tak hanya itu, ada dampak negatif lain yang juga berpotensi muncul. Akibat sengketa wilayah tanah adat atau tanah warisan, tidak sedikit meregang nyawa.

Kasus konflik tanah di Kabupaten Mesuji, Lampung yang telah terjadi sejak 2011. Kasus terakhir pada Juli 2019 yang menyebabkan lima orang tewas. Masalah intinya adalah perebutan tanah di sebuah register. Kawasan yang menjadi konflik adalah Kawasan transmigrasi. Kabupaten dari hasil pemekaran yang terbentuk pada 26 November 2008, dan lepas dari Kabupaten Tulang Bawang ini, mulai berhadapan dengan masalah sosial terkait dengan perebutan tanah. Penyebabnya tidak ada pendokumentasian tanah tersebut dengan baik. Sebab adanya dokumen tentang sejarah tanah itu dari waktu ke waktu yang tersimpan di kearsipan, maka saat terjadi perselisihan terhadap konflik sosial soal tanah, dokumen-dokumen itu bisa menjadi bukti di pengadilan. Sehingga tidak perlu sampai ada nyawa sebagai taruhan. Masalah tanah memang sangat sensitif. Sama saat Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang, rakyat Indonesia maju bertaruh nyawa mempertahankan Tanah Air. Konteks kekinian dari Perang Dunia II adalah mempertaruhkan nyawa demi tanah mereka.

Bahkan di tingkat negara, garis batas laut sering juga menimbulkan konflik dengan negara lain. Seperti wilayah perairan Natuna yang sebagian lautnya diklaim oleh Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian di perbatasan laut antara Nusa Tenggara Timur dengan Australia. Konflik-konflik batas wilayah inilah akan terus terjadi. Apalagi wilayah

Indonesia sangat luas, berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Konflik wilayah akan terus terjadi. Maka seperti disampaikan di atas, bila ingin menghancurkan negara maka hancurkan arsip-arsipnya. Inilah tantangan bagaimana arsip-arsip negara ini menjadi roh bagi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Amerika Serikat adalah negara dengan kesiapan arsip yang luar biasa. Bahkan di tingkat desa, selalu ada sejarawan yang bisa menjelaskan tentang desa dan semua peristiwa maupun aset wilayah itu berbasis pada arsip dan dokumen. Sehingga memudahkan orang mengetahui sejarah daerah tersebut. Bahkan setiap masuk ke kota-kota di Amerika selalu ada tulisan nama kota dan kapan kota ini berdiri. Seringkali melihat acara TV luar negeri, setiap kali melakukan investigasi, nara sumber adalah sejarawan lokal yang memiliki banyak keterangan tentang daerahnya. Bahkan tidak segan-segan sejarawan lokal ini menunjukkan arsip berupa berita klipangan koran pada abad lampau yang pernah terjadi di daerahnya.

Masalah arsip bukan masalah sepele. Bahkan arsip bisa menjadi objek yang bisa dihancurkan apabila ingin menghancurkan negara. Penghancuran arsip-arsip telah dilakukan oleh Nazi. Termasuk pembakaran buku-buku. Bagian dari aksi Hitler untuk menghapus jejaknya. Hingga kematiannya pun sampai sekarang tidak pernah diketahui. Pemburu fakta-fakta Hitler sampai berburu ke Amerika Selatan, diduga menjadi tempat persinggahan terakhir diktator itu. Pernah saya melihat acara *Hunting Hitler*, isinya sekumpulan ahli yang menganggap bahwa Hitler tidak mati di Jerman, tetapi ia sempat melarikan diri ke sejumlah negara di Amerika Selatan. Mereka berburu

bukti tentang kehadiran sosok Hitler pasca Perang Dunia II. Alasannya mengapa mereka berburu Hitler, karena di kearsipan tidak ditemukan kapan Hitler meninggal dan jasadnya ada dimana.

Saya pernah punya pengalaman pribadi saat berkunjung ke Bohunice, Slovakia. Di wilayah ini ada Bohunice Nuclear Power Plant, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir yang menjadi pemasok listrik untuk Slovakia. Di wilayah itu ada tiga PLTN, dua di antaranya sudah *shut down*, dan tinggal PLTN ketiga beroperasi. Kemudian ada rencana pembangunan PLTN keempat. Wilayahnya di perdesaan, dekat dengan ladang kentang dan sungai besar. Saat masuk ke desam bertemulah saya dengan lurah. Dia menjelaskan kondisi desanya dan sejarahnya. Di situ ia membawa seorang sejarawan. Lalu sorenya saya mendatangi sebuah museum kecil, sederhana. Sejarawan lokal yang tadinya bertemu di kantor kepala desa Bohunice menjelaskan lebih detail soal desanya. Menariknya dalam penjelasannya itu, ia menunjukkan lukisan seorang pria di bawah lampu penerangan jalan.

Lukisan tua ini banyak menyisakan cerita yang menjadi cikal bakal lahirnya PLTN di wilayah itu. Pria itu dengan suka rela berkeliling ke desa yang masih minim pencahayaan, memasang lampu-lampu dengan sukarela. Ia juga menggerakkan generator untuk menyalakan listrik di jalanan dengan sukarela. Catatan sejarah ini sangat penting bagi masa depan desa itu.

Sebelumnya Slovakia bergabung dengan Ceko, dan menjadi negara komunis serta mitra kental Uni Soviet. Namun dengan bubarnya Uni Soviet dan menjadi Rusia, negara-negara komunis di Eropa Timur menjadi negara sosialis. Dan salah satunya Ceko dan Slovakia memisahkan diri,

dan menjadi negara sosialis.

Lukisan bersejarah ini menjadi cikal bakal daerah itu memperjuangkan adanya listrik di wilayahnya. Dan berdirilah PLTN di wilayah Bohunice. Desa-desa yang berada di ring 1 PLTN mendapatkan gelontoran uang dari keuntungan penjualan listrik, paling banyak karena wilayah itu memiliki risiko paling besar bila ada efek buruk pada PLTN, misalnya kebocoran nuklir.

Adanya listrik, wilayah itu menjadi makmur bahkan menjadi desa terkaya di wilayah Slovakia. Kemakmuran itu juga ditandai dengan transportasi publik gratis, dan pendidikan gratis sampai jenjang perguruan tinggi.

"Kalau tidak ada dokumen ini, mungkin ceritanya berbeda," kata sejarawan itu.

Bayangkan sebuah lukisan tua yang tidak diketahui siapa pelukisnya, namun dijadikan dokumen dan diarsipkan bisa mengubah desa itu menjadi maju. Sebaliknya bila pendokumentasian buruk, maka bisa memicu lebih buruk lagi, seperti yang terjadi di Mesuji.

Di Indonesia hal itu belum menjadi tradisi. Masyarakat tidak pernah tahu kapan desa, kota bahkan kabupatennya dilahirkan. Setiap kali memasuki kota-kota atau kabupaten, tidak ada penanda itu. Bahkan daerah-daerah yang dilalui stasiun kereta api peninggalan Belanda, tidak semua tahu kapan stasiun itu dibangun. Bahkan banyak bangunan yang sudah hilang dan diganti bangunan baru.

### **Ketika Internet Sebagai Nadi Kehidupan**

Era millennial ditandai dengan lahirnya generasi yang lahir antara tahun 1980-an sampai 2000. Mereka terlahir di dunia modern yang ditandai dengan teknologi ponsel pintar atau smartphone. Millennial datang saat

industri hiburan mulai terpengaruh oleh internet dan perangkat seluler. Generasi millennial ini cukup kompleks. Selain keragaman etnis dan ras, juga di sektor pendidikan juga memengaruhi. Amerika Serikat mencatat hingga 2008 ada 39,6% generasi millennial berusia 18-24 tahun terdaftar di perguruan tinggi. Banyak yang mengansumiskan bahwa generasi millennial ini adalah generasi liberal, progresif, percaya diri, dan lebih terbuka. Bahkan disebutkan internet sebagai agama baru bagi mereka. Apapun yang mereka cari cukup buka mbah Google, urusan selesai. Mungkin banyak yang berkomentar generasi millennial ini generasi lebay, tapi mau tidak mau generasi ini mengantarkan kita mengenal era Revolusi Industri 4.0

Bila di masa lampau kita mengenal Revolusi Industri 1.0 yang akhirnya melahirkan negara-negara industri maju di Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan China, kini lahirlah Revolusi Industri 4.0. Kanselir Jerman Angela Merkel, sekaligus tokoh berpengaruh dalam Uni Eropa mengatakan Revolusi Industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional.

Jerman merupakan negara pencetus adanya Revolusi Industri 4.0, yang ditandai dengan strategi teknologi canggih pemerintah yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Revolusi 4.0 inilah yang sedang kita hadapi saat ini. Wikipedia menyebutkan Revolusi Industri 4.0 merupakan tren yang dikembangkan dengan tenaga manufaktur, sudah menjadi tren otomatisasi. Dan pertukaran data meliputi sistem cyber fisik, cognitive computing dan lainnya.

Revolusi Industri 4.0 adalah integrasi dari *Cyber Physical System*

dan *Internet of Things and Services* (IoT dan IoS) ke dalam proses industri meliputi manufaktur, logistik serta proses lainnya. Perubahan besar yang terjadi pada Revolusi Industri 4.0 adalah mengubah pola pikir dan kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk dunia kerja. Teknologi cerdas atau robot yang menggerakkan. Indonesia pun sudah memulai Revolusi Industri 4.0 dengan lahirnya bisnis start up yang digerakkan oleh kelompok millennial seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya merupakan bisnis online terbesar saat ini berbasis teknologi internet.

Jakarta sudah mulai dengan pergerakan teknologi internet dengan sistem pembayaran cashless pada transportasi publik. Dan kemudian merambah ke berbagai kehidupan manusia.

Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, sangat rentan terhadap bencana baik kebakaran, banjir, hingga wabah penyakit. Saya masih ingat saat banjir besar melanda Jakarta pada 2002 dan 2007, banyak kantor-kantor terendam air. Banjir pada 2007 itu menyebabkan banyak sekali dokumentasi ilmiah milik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terendam banjir. Maka sebagai langkah antisipasi, seluruh dokumentasi dan arsip di LIPI dipindahkan menjadi format digital dan disimpan dalam bentuk *compact disc* (CD).

Bahkan saat pandemi virus corona atau Covid-19 yang merebak di seluruh dunia sejak Januari 2020 telah mengubah tatanan sosial masyarakat. Masyarakat yang semula saling menyapa, bahkan saling bergerombol di terminal, stasiun kereta, bandara kini dibatasi pergerakannya. Semula para pekerja berduyun-duyun ke pabrik, karyawan menuju ke kantor di pusat kota untuk bekerja. Sejak terjadinya

wabah, semua harus mengunci diri di rumah. Bekerja dari rumah secara online. Industri-industri gulung tikar, took-toko merumahkan karyawan bahkan PHK akibat wabah penyakit ini. Maka pada peristiwa wabah ini, Internet of Things ini menjadi tantangan di masa-masa mendatang bagi kehidupan masyarakat Indonesia dan dunia.

Presiden Joko Widodo di awal pemerintahan kedua, sudah menyatakan bahwa Indonesia harus siap menyongsong Revolusi Industri 4.0. Artinya sumber daya manusia dan infrastruktur untuk memasuki Revolusi Industri 4.0 harus benar-benar disiapkan.

Di era Revolusi Industri 4.0, pemerintah pun sudah menegaskan bahwa saatnya semua lini layanan pemerintahan memasuki ranah digital. Termasuk kearsipan. Nah bagaimana dengan sektor kearsipan? Sejarah terus berubah mengikuti gerak waktu. Kearsipan berpacu dengan waktu. Di saat raksasa Google dan Wkipedia sudah memulai kearsipan digital, bagaimana dengan para arsiparis kita? Sanggupkah memulai dari sejak sekarang?

Sektor kearsipan memang harus berubah seiring dengan era Revolusi Industri 4.0. Bagaimana dunia arsip bisa akrab dengan anak milenial? Dan di tengah kepungan berita hoaks? Inilah tantangan bagi Arsip Nasional. Siap tidak siap, dunia kearsipan harus mengikuti trend dunia dan bisa memenuhi kebutuhan lintas generasi. Bagaimana menumbuhkan cinta anak milenial dengan kearsipan.

Salah satu cara dengan adaptasi perubahan yang terjadi di dunia. Untuk merangkul kelompok milenial, maka yang disuguhkan juga harus mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka. Tidak dipungkiri sekarang ini sumber

kebenaran sebuah informasi baik di masa lalu hingga masa kini bermuara di Google dan Wikipedia.

Masih ingat sosok Michael Stern Hart, seorang penulis Amerika, yang dikenal sebagai penemu buku elektronik (eBook) dan pendiri Proyek Gutenberg? Ia menggagas eBook sebelum internet ada. Gagasannya sangat sederhana. Sekitar tahun 1970 an, ia lagi belanja di supermarket, di tengah perayaan Kemerdekaan Amerika, banyak selebaran diselipkan di toko-toko berisi Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Dokumen penting yang menjadi pondasi negara Amerika Serikat sampai sekarang. Dari situlah, ia berpikir mengembangkan e-Book ini bisa dibaca orang banyak melalui internet. Ia tutup usia pada 2011, Proyek Gutenberg terus berlanjut sampai sekarang. Sudah lebih dari 36 ribu eBook yang diterbitkan, di luar buku-buku yang memiliki copyright.

Industri digital terbesar di dunia, Facebook juga menyisipkan soal kearsipan untuk merangkul semua golongan termasuk kalangan milenial. Setiap unduhan di Facebook akan tertera tanggal dan jam. Dan setahun atau tahun-tahun berikutnya, ada mesin lini waktu akan memunculkan lagi arsip kenangan Anda di masa lalu. Ini sebuah model kearsipan sederhana yang bisa dipahami banyak orang.

Dan di era Revolusi Industri 4.0 ini menjadi kesempatan baik bagi dunia kearsipan untuk mulai melebur di era digital. Termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya kearsipan ini. Di tengah wabah, di tengah bencana, ataupun saat perang, kearsipan dalam bentuk digital bisa lebih aman. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung digitalisasi kearsipan.

Di sektor pemerintahan, era digital

sekarang ini harus disikapi dengan positif. Dunia kearsipan akan kian berkembang bila ikut menyesuaikan perkembangan zaman. Kearsipan tidak hanya mengandalkan dokumen dalam bentuk fisik, tapi juga bisa lebih efisien dalam bentuk digital. Sebab semakin lama arsip dalam bentuk fisik akan semakin banyak. Sementara ruang simpan sangat terbatas. Ditambah arsip-arsip kuno yang membutuhkan perawatan juga sangat riskan dan gampang rusak. Kerusakan selain tidak terawat, juga bisa disebabkan oleh bencana alam misalnya banjir dan kebakaran yang umum dijumpai di Indonesia. Maka digital menjadi salah satu solusi karena efisien dan lebih aman. Lebih efisien baik dari segi biaya, tempat dan perawatan.

Perubahan dari arsip kertas menjadi bentuk digital memang harus sudah dimulai dari sekarang. Bahkan gerakan digitalisasi ini juga sudah merambah kemana-mana. Dan ini kesempatan baik untuk semakin menggerakkan kepedulian terhadap pentingnya arsip. Bahkan ini sebuah momentum merangkul kelompok milenial untuk diajak peduli terhadap kearsipan. Peduli terhadap pentingnya arsip tidak hanya tanggungjawab arsiparis, atau mereka yang berkecimpung di dunia kearsipan. Masyarakat juga sudah saatnya dilibatkan dengan menjadikan kebiasaan mendokumentasikan data, foto dan lainnya. Sebab manfaatnya akan terlihat sampai puluhan tahun ke depan. Sebab dengan adanya bukti-bukti arsip ini seperti kita belajar dari masa lalu dan merancang yang terbaik untuk masa depan lebih baik. Sekaligus sebagai pengingat agar kejadian serupa tidak terulang.

Ringga Arif Widi Harto

# MISTERI TELAGAARUM

**J**auh dari perkotaan di ujung timur Jawa, terdapat sebuah desa bernama Telagaarum. Di desa ini terdapat telaga yang airnya tak pernah kering meskipun kemarau mendera berkepanjangan. Konon, nama desa ini juga berasal dari keberadaan telaga yang kadang memunculkan bau harum. Bahkan, makam dan telaga yang dikeramatkan oleh penduduk desa masih sering dikunjungi orang-orang dari luar daerah untuk lelaku dan ngalap berkah. Aku dan temanku, Irawan, jauh-jauh datang dari Yogyakarta memang penasaran dengan cerita yang berkembang, bahwa dengan mandi kungkum disertai laku ritual dan tirakat di makam Raden Ronggo, keinginan orang tersebut akan terkabul. Ketika aku membaca sebuah buku di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, pernah ada penelitian sosial mengenai cerita tersebut. Bahkan saat aku membuka lembaran arsip koran tahun 1987, terdapat penemuan sebuah reruntuhan candi di petak sawah milik warga yang tidak jauh dari telaga Desa Telagaarum. Sebagai mahasiswa yang mengambil jurusan sosiologi, aku dan Irawan ingin mengetahui tentang mitos yang berkembang di tengah masyarakat Telagaarum.

\*\*\*

Dari penuturan Mbah Karso, sesepuh desa itu, makam yang berada di sebelah timur telaga adalah makam Raden Ronggo seorang kerabat Majapahit yang melarikan diri ke timur saat keruntuhan kerajaan pada abad ke-15.

“Raden Ronggo merupakan putra dari Tumenggung Ciptorososeorang keturunan Raden Wijaya, yang sejak kecil gemar laku prihatin, pengembaraan dan dekat dengan rakyat kecil,” tutur Mbah Karso di sebuah gubug pinggir sawah miliknya.

“Mbah, cerita tentang bau harum yang muncul dari telaga itu apakah benar?” sambil mengarahkan telunjukku ke arah telaga yang tak terlalu jauh dari gubug milik Mbah Karso.

“Iya nak, bau harum yang muncul itu dipercaya sebagai bau dari Dewi Sekarsari, istri Raden Ronggo. Dewi Sekarsari dan Raden Ronggo disertai beberapa pengikutnya dalam perjalanan ke timur, beristirahat di desa ini yang dahulunya adalah hutan belantara dan rombongan merasa sangat haus. Keris Nagasasra milik Raden Ronggo, dicabut dari warangka, lalu ditancapkanlah ke tanah. Setelah dicabut, mengucur air yang sangat

jernih, lama kelamaan menjadi telaga. Telaga ini juga memberi manfaat bagi warga, areal persawahan dapat terairi dan tanaman menjadi tumbuh subur,” pungkask Mbah Karso sambil menghisap kretek agak dalam.

\*\*\*

Langit sore yang indah, berubah menjadi gelap. Aku, Irawan serta Mbah Karso lantas berjalan menuju perkampungan sekitar lima ratus meter dari gubug tadi. Kami kemudian pamit kepada Mbah Karso, malam ini kami menginap di rumah Bagas, teman kampus yang sedang pulang kampung. Sambil menyantap makan malam, Pak Hadi bercerita banyak tentang desa ini mulai dari silsilah keluarganya, keberadaan telaga, kehidupan masyarakatnya, hingga pembangunan yang tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan.

“Raden Ronggo yang merupakan cikal bakal desa ini adalah leluhur kami, Bagas itu generasi ke-17. Bapak sedih kalau ada peziarah yang datang ke makam untuk meminta sesuatu, mengukultuskan almarhum Eyang Ronggo, seolah-olah Eyang Ronggo yang sudah meninggal bisa mewujudkan keinginan dan permintaan orang-orang tersebut,” pungkask Pak Hadi.

## CERITA KITA

Aku lantas bertanya tentang keberadaan telaga yang berbau harum. “Telaga tersebut juga digunakan untuk pengairan sawah, Pak? Kata orang-orang maupun Mbah Karso meskipun kemarau airnya tidak pernah habis?” tanyaku penasaran.

Sambil menyalakan kreteknya sehabis makan, Pak Hadi dengan tenang menjawabnya. “Iya, sejak Bapak kecil, telaga itu tidak pernah kering, dan mampu mengairi areal persawahan yang luas, sebenarnya bau harum itu berasal dari pohon yang terdapat di pinggir telaga. Jadi bukan karena air telaga itu yang harum, tapi pohon itu yang mengeluarkan bau harum pada hari tertentu. Ah...tapi biarlah itu menjadi kearifan lokal desa ini, dengan begitu masyarakat akan menjaga dan merawat keberadaan telaga dan lingkungan sekitarnya,” pekik Pak Hadi.

\*\*\*

Malam semakin larut, tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 23.45 WIB. Ditemani Bagas, kami diantar menuju kamar yang telah disiapkan, di sebuah kamar yang berada dekat ruang tengah. Rupanya Irawan yang begitu lelah langsung tertidur pulas, sementara aku masih klisikan belum dapat memejamkan mata. Aku teringat perkataan Bagas saat di kampus bahwa desanya belum pernah mengalami banjir, meskipun desa sebelahnya kebanjiran. Mungkin ini ada kaitannya dengan telaga tersebut, telaga yang cukup luas mampu menampung air hujan yang mengguyur, dan pepohonan yang masih lebat mampu menyerap air yang turun dari langit.

Sreett.. kubuka tas yang kutaruh di dekat almari, kuambil buku yang kubawa dari Yogyakarta, daripada hanya meleak-merem lebih baik kubaca buku, siapa tahu bisa tertidur setelah mata lelah membacanya, pikirku.

“Ton, Toni bangun sudah subuh, sembahyang tidak kamu?” kata Irawan membangunkanku. Dengan mata ngantuk, aku bergegas bangun keluar kamar untuk mengambil air wudu.

“Nak Toni, tempat wudunya di belakang rumah dekat kamar mandi,” ucap Bu Hadi sambil menunjuk ke arah pintu belakang.

Tempat wudunya berupa tempayan untuk menampung air, selesai wudu aku menimba air untuk mengisinya kembali. Saat akan masuk ke dalam rumah, tiba-tiba hidungku mencium bau wangi yang berasal dari arah barat, arah telaga itu. Baunya wangi sekali, seperti kasturi. Apakah ada bidadari yang lewat pikirku dalam hati, ataukah ini bau yang berasal dari telaga seperti yang dipercaya oleh warga, sempat termenung sejenak lantas aku pun masuk ke rumah untuk sembahyang.

Ketika sarapan pagi, aku tak melihat Pak Hadi di meja makan. Bagas yang duduk disebelahku, lantas kutanya dimana bapaknya kenapa tidak ikut makan bersama.

“Bapak sejak habis subuh sudah pergi untuk memimpin persiapan upacara adat merti desa, ya semacam acara perwujudan syukur kepada Tuhan atas limpahan hasil bumi berupa panen besar kali ini.” Bu Hadi menyambung perkataan Bagas, “Bapaknya Bagas merupakan pamong desa sekaligus tokoh masyarakat yang diberikan amanah untuk melestarikan tradisi turun temurun, peninggalan Eyang Ronggo. Kalau tidak diuri-uri tradisi semacam ini akan punah seiring zaman yang berubah,” ucapnya.

\*\*\*

Setelah sarapan, aku dan Irawan diajak oleh Bagas ke lokasi merti desa yang berada di sekitaran telaga dan makam. Tepat pukul sembilan pagi acara dimulai, Pak Hadi yang

merupakan keturunan Raden Ronggo, dengan menggunakan pakaian Jawa lengkap, memulai prosesi upacara tersebut. Diawali menabur bunga dan berdoa di makam Raden Ronggo, dilanjutkan dengan pembacaan doa untuk memohon kepada Tuhan bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Telagaarum sebelum kirab dilaksanakan. Bregada prajurit yang merupakan warga desa tampak gagah, melampahkan kakinya dengan mantap mengelilingi desa, mengusung gunung yang berisi hasil bumi, menggunakan pakaian adat Jawa lengkap dengan keris dan tombak. Suara gending gamelan pun, mengiri derap langkah para pelestari tradisi budaya ini.

Aku, Irawan dan Bagas bersemangat ikut berjalan di belakang para bregada yang tampak gagah dengan pakaian kebesarannya. Rupanya Mbah Karso, pria tua yang kami temui di gubug persawahan, adalah orang kepercayaan Pak Hadi, dia berada di sebelah kanan gunung mengenakan pakaian serba hitam dan ikat kepala hitam. Pak Hadi kemudian memimpin doa sebelum gunung itu diperebutkan oleh warga.

“Kalian tahu tidak mengapa warga desa ini bahkan warga yang datang dari luar desa sangat antusias berebut gunung itu?” tanya Bagas kepadaku dan Irawan. Tanpa memberi waktu berpikir, Bagas menjelaskannya, “Ya, mereka ini percaya bahwa gunung ini akan memberikan kebaikan pada diri mereka, bahkan ada yang tidak memakannya hanya disimpan saja. Adapula yang ditaruh di sawah sebagai penolak hama, dan banyak hal lainnya yang bagi kita terasa mungkin tidak masuk akal.”

“Gas, keris yang terselip di pinggang belakang bapakmu itu keris Nagasasra peninggalan Raden Ronggo, bukan?” tanya Irawan.

“Bapak pernah bilang kalau itu memang keris Nagasasra milik Eyang Ronggo yang diberikan secara turun temurun. Aku pernah melihat bilah keris itu, bapak menunjukkannya padaku. Pamornya sangat indah dan dipangkal bilahnya ada ukiran berbentuk naga. Warangkanya juga indah, ukirannya begitu halus,” kata Bagas.

Rupanya acara tak hanya sampai disitu saja, para ibu-ibu yang sebelumnya telah mempersiapkan makanan besar, kemudian menata makanan itu di atas tikar yang telah digelar. Pak Hadi kemudian menyerukan kepada warga untuk bersama-sama menikmati hidangan yang telah tersaji itu. Aku, Irawan dan Bagas juga turut larut bersama warga menikmati ayam ingkung, gubahan, dan aneka buah-buahan. Momentum ini juga kami pergunakan untuk berbincang dengan warga dan mencari tahu segala macam kearifan lokal di Desa Telagaarum ini.

Sebelum acara selesai, banyak warga yang dari rumah telah membawa botol plastik, kemudian mengambil air telaga yang dipercaya memiliki energi maupun khasiat. Irawan sempat bertanya pada ibu-ibu paruh baya yang sedang mengambil air. “Bu, kenapa banyak orang yang mengambil air ini dan membawanya pulang?” tanyanya. “Kami percaya bahwa melalui perantara air ini bisa menjadikan awet muda, lancar rejeki, menghilangkan penyakit, dan masih banyak khasiat lainnya. Makanya kami semua sangat menjaga lingkungan, bukan hanya telaga ini yang kami jaga, sungai, pepohonan, persawahan juga kami jaga kelestariannya. Warga masyarakat desa ini sangat menghormati alam dan bersahabat dengan alam, tidak seperti orang-orang kota yang seenaknya membuang

sampah, alih sawah menjadi gedung-gedung, menebang pepohonan dan mencemari udara,” tutur panjang Ibu itu.

“Benar juga Ton yang dikatakan Ibu itu, masyarakat Desa Telagaarum sangat mencintai dan membangun harmoni dengan lingkungan. Di kampus, kita banyak menerima teori tentang sosiologi lingkungan, tapi banyak juga teman-teman kita yang tak peduli terhadap lingkungan,” ucap Irawan padaku.

\*\*\*

Seluruh rangkaian upacara selesai sekitar jam 14.00 WIB, warga kembali ke rumahnya masing-masing. Hari ini bisa dikatakan sebagai hari yang istimewa bagi warga masyarakat Desa Telagaarum, karena hanya setiap setahun sekali berdasar penanggalan Jawa upacara ini digelar. Desa bisa menjadi guru dan teladan yang baik bagi masyarakat kota dalam menjaga lingkungan dan membangun harmoni dengan alam.

“Gas, kamu beruntung ya, masih dapat menyaksikan dan ikut serta menjaga tradisi seperti ini. Tidak seperti di daerahku yang sudah sumpek dengan lalu lalang kendaraan dan banyak pabrik, bahkan antartangga saja sudah tak saling mengenal,” kata Irawan.

Malam harinya, sekitar pukul 19.00 WIB, aku mengajak Irawan untuk berjalan-jalan melihat telaga. Entah kenapa, Irawan tidak mau kuajak, mungkin dia sedang asyik membaca novel Gajah Mada yang dibawanya. Karena tidak mau merepotkan Bagas, aku pergi sendiri. Sesampainya di tepi telaga, aku melihat ada orang yang sedang duduk memandang telaga itu.

“Kakek sedang apa disini?” tanyaku pada lelaki tua yang berpakaian putih

itu. Jenggotnya panjang, rambutnya panjang digelung, dan sorot matanya meneduhkan. Kakek itu menatapku dan menyuruhku untuk duduk di dekatnya. Dia bercerita panjang lebar peristiwa masa lampau era kerajaan Majapahit, termasuk juga yang berkaitan dengan Desa Telagaarum. Ketika kakek itu melanjutkan ceritanya, Bagas dari kejauhan sudah memanggil namaku. Rupanya Bagas dan Irawan mencariku. Aku pun segera berdiri dan menyahut serta mengangkat tangan untuk memberitahu keberadaanku di sini.

“Kamu sedang apa di sini, Ton?” tanya Bagas.

“Aku jalan-jalan melihat telaga. Irawan aku ajak tidak mau, aku juga tak mau merepotkan kamu, akhirnya aku pergi sendiri. Di pinggir telaga dari kejauhan terlihat seorang kakek yang berdiri sendirian, lantas aku menghampirinya. Kakek itu bercerita banyak hal. Ayo aku kenalkan pada kakek!”

“Kakek siapa, Ton?” tanya Irawan.

Saat aku berbalik badan untuk memperkenalkan kakek itu, ternyata tidak ada di tempat. Aku heran kemana perginya kakek itu. Rupanya malam sudah semakin larut, angin yang berhembus makin dingin menerpa tubuh. Aku, Bagas dan Irawan berjalan menjauhi telaga menuju rumah. Tanpa saling bercakap kami berjalan terus ke depan. Nampak Pak Hadi menunggu kedatangan kami di jalan depan pekarangan rumah, kami pun segera masuk ke dalam rumah. Pak Hadi tidak segera masuk, aku berbalik badan sebelum masuk ke rumah, kulihat kakek yang ada di pinggir telaga tadi seperti sedang berbincang dengan Pak Hadi. Telagaarum memang masih menyimpan misteri.

# ANRI SIAPKAN LAYANAN RESTORASI GRATIS UNTUK ARSIP KELUARGA TERDAMPAK BENCANA BANJIR



FOTO: DOK. ANRI



FOTO: DOK. ANRI

Petugas sedang merestorasi arsip milik masyarakat terdampak bencana banjir.

Jakarta, (01/01) - Curah hujan yang tinggi pada malam pergantian tahun 2020 telah mengakibatkan sejumlah area pemukiman di Wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi terkena bencana banjir. Salah satu dampak dari bencana banjir adalah adanya sejumlah Arsip Keluarga yang basah bahkan rusak terkena air. ANRI merespon situasi ini dengan membuka Posko Layanan Restorasi Arsip Keluarga secara gratis di Gedung ANRI, Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak, Jakarta Selatan mulai tanggal 2 Januari 2020 mulai pukul 07.30 s/d 15.30 WIB. Bagi masyarakat yang memiliki arsip keluarga yang terdampak bencana banjir dapat segera untuk mendatangi posko tersebut. **(am)**



FOTO: DOK. ANRI

Restorasi arsip yang dilaksanakan oleh Tim Laraska Arsip Nasional Republik Indonesia semakin diminati masyarakat.

# GERAK CEPAT PEMERINTAH INVENTARISASI ARSIP SERTIFIKAT TERDAMPAK BANJIR



FOTO: DOK. ANRI

Direktur Preservasi ANRI, Kandar melakukan peninjauan arsip terdampak banjir di Kantor Pertanahan Kota Bekasi (03/01/20).

Bekasi - 03/01, Bencana yang terjadi di pembuka tahun 2020 menyebabkan kerusakan di beberapa aspek, salah satunya arsip sertipikat seperti warkah dan buku tanah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bersinergi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sigap dalam menangani bencana banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek. Salah satu Kantor Pertanahan yang terdampak adalah Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang terkena banjir sehingga beberapa arsip ikut terendam.

“Banjir ini dikarenakan jebolnya tembok di sebelah kanan kantor Pertanahan Kota Bekasi. Sehingga Kementerian ATR/BPN bersama dengan ANRI memiliki semangat

yang sama, untuk tanggap dengan cepat terhadap bencana yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Karena banyak arsip sertipikat seperti warkah dan buku tanah yang terendam banjir dan harus segera diamankan,” kata Nurhadi Putra, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN saat memberikan pengarahan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Jumat (03/01/2020).

Nurhadi Putra menjelaskan tembok setinggi satu meter lebih merupakan pembatas lingkungan Kantor Pertanahan Kota Bekasi dengan saluran di kawasan Karang Kitri. Jebolnya tembok tersebut membuat air memenuhi area basemen yang terdapat gudang arsip pertanahan. “Banyak dokumen

yang basah akibat banjir. Sebagian sudah dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi,” ujar Nurhadi Putra. Terdapat beberapa arsip sertipikat yang terendam akibat banjir. “Untuk merestorasi ini, kami meminta bantuan ANRI,” lanjutnya.

“Diharapkan dengan adanya kejadian tersebut seluruh kantor pertanahan di Indonesia harus dengan cepat mendigitalisasikan seluruh arsipnya. Dengan begitu jika terjadi musibah serupa, seluruh data masyarakat dengan aman terselamatkan,” tambah Nurhadi Putra.

Pada kesempatan yang sama, Kandar, Direktur Preservasi ANRI yang ditemui saat melakukan peninjauan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi menjelaskan hal terpenting sebagai langkah awal yang akan dilakukan yaitu evakuasi terlebih dahulu. “Ada dua hal yang harus dilakukan saat ini dan sesegera mungkin. Pertama melakukan evakuasi arsip jangan sampai terkena sinar matahari, karena jika terkena maka akan hancur nantinya. Kemudian untuk arsip yang memiliki nilai guna tinggi akan diprioritaskan untuk diinventarisasikan terlebih dahulu,” ungkap Kandar.

Lebih lanjut, Kandar menghimbau kepada seluruh warga korban banjir agar merestorasi dokumen yang basah. “ANRI juga memberikan layanan restorasi/perawatan arsip keluarga (Laraska) secara gratis bagi masyarakat yang terkena musibah bencana banjir. Dapat langsung mendatangi kantor ANRI,” kata Kandar. (is)

# ANRI GELAR *SHARING KNOWLEDGE* PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LUAR NEGERI



FOTO: DOK. ANRI

Plt. Kepala ANRI, M. Taufik menyatakan bahwa masyarakat harus sejahtera melalui arsip. Ke depan, arsip bisa menjadi informasi yang di dalamnya terdapat *knowledge*. Peran serta seluruh pegawai sangat dibutuhkan khususnya dalam melayani masyarakat, peran dalam kesejahteraan masyarakat melalui arsip, dan peran dalam arsip menjadi *knowledge*.

Jakarta, (06/01) - *Sharing Knowledge* penyelenggaraan kearsipan digelar Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk menambah pengetahuan dan kemampuan para arsiparis di lingkungan ANRI. Acara yang berlangsung di Ruang Soemartini Gedung A ANRI, dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI M. Taufik, Sekretaris Utama Sumrahyadi, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Andi Kasman, dan Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Imam Gunarto.

Beberapa negara atau kegiatan yang menjadi acuan dalam *Sharing Knowledge* penyelenggaraan kearsipan di antaranya Konferensi Tahunan ICA yang mengangkat tema *Designing the Archives* menunjukkan perhatian dan peluang bagi arsiparis untuk dapat menggunakan pendekatan desain kearsipan yang

berpusat pada manusia untuk memastikan arsip memberikan manfaat bagi warga negara, pengguna, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

Kemudian *sharing knowledge* tentang Arsip Kepresidenan Korea Selatan, *sharing knowledge* tentang naskah *implementing arrangement* di Rusia, dan *sharing knowledge* tentang penyelenggaraan SIKN dan JIKN serta penggunaan AtoM di Inggris.

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum, Rini

Agustiani menyampaikan, kegiatan yang diselenggarakan di awal tahun tersebut, diharapkan dapat memacu semangat arsiparis di lingkungan ANRI.

Plt. Kepala ANRI, M. Taufik menyatakan bahwa masyarakat harus sejahtera melalui arsip. Ke depan, arsip bisa menjadi informasi yang di dalamnya terdapat *knowledge*. Peran serta seluruh pegawai sangat dibutuhkan khususnya dalam melayani masyarakat, peran dalam kesejahteraan masyarakat melalui arsip, dan peran dalam arsip menjadi *knowledge*. (pi&sa)



FOTO: DOK. ANRI

# ARSIP KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI MERAPAT DI ANRI



FOTO: DOK. ANRI



FOTO: DOK. ANRI

Petugas sedang menurunkan 96 boks berisi arsip pertanahan yang terdampak banjir pada awal tahun 2020.

Jakarta, (11/01) - Tim pengelola arsip Kantor Pertanahan Kota Bekasi mendatangi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), untuk menyerahkan 96 boks berisi arsip pertanahan yang terdampak banjir yang terjadi pada awal tahun 2020. Arsip Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari 8 kelurahan antara tahun 2017 - 2019.

Kepala Subdirektorat Penyimpanan Arsip ANRI, Dhani Sugiharto menyatakan sesuai dengan koordinasi yang telah dilakukan sebelumnya, ANRI akan membantu Kantor Pertanahan Kota Bekasi untuk melakukan penyelamatan arsip dengan metode standar restorasi arsip, di antaranya, pembersihan, menyelupkan pada alkohol dan khusus untuk pengeringan akan menggunakan mesin *dry chamber* yang tersedia di ANRI.

Pada kegiatan serah terima tersebut turut hadir, Kasubdit Penyimpanan ANRI, Koordinator Kegiatan Penyelamatan Arsip Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Kasubbag Urusan Umum dan Kepegawaian Kantor Pertanahan Kota Bekasi, arsiparis dan staf. (ws)



FOTO: DOK. ANRI

## VISITASI PERWAKILAN ERASMUS HUIS KE ANRI



Jakarta - 15/01, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), M.Taufik didampingi Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (Humas), M.Imam Mulyantono menerima kunjungan kerja Director Erasmus Huis, Yolande Melsertdi. Kunjungan kerja ini sekaligus memperkenalkan Yolande selaku Kepala Bagian Kebudayaan dan Komunikasi. Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala beserta Director Erasmus Huis turut membicarakan kerja sama antara kedua lembaga, khususnya di bidang kearsipan yang bisa dikembangkan pada masa mendatang. (md)

FOTO: DOK. ANRI

**Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), M.Taufik menerima kunjungan kerja Director Erasmus Huis, Yolande Melsertdi.**

# ANRI GELAR BIMBINGAN DAN KONSULTASI TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS



FOTO: DOK. ANRI

Bimbingan dan Konsultasi (Bimkos) Teknis Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional diikuti 30 peserta yang berasal dari 14 instansi bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang penilaian dalam pembimbingan dan konsultasi, serta menjamin mutu penyelenggaraan dan profesionalisme penilai.

Jakarta - 15/01, Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sertifikasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar Bimbingan dan Konsultasi (Bimkos) Teknis Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis di Ruang Serba Guna Soemartini, Gedung A Lantai 2 pada 15-17 Januari 2020. Bimkos yang diikuti 30 peserta yang berasal dari 14 instansi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang penilaian dalam pembimbingan dan konsultasi, serta menjamin mutu penyelenggaraan dan profesionalisme penilai. Hal ini sejalan dengan terciptanya SDM unggul di bidang kearsipan.

“Indonesia maju didukung oleh SDM unggul, salah satunya adalah SDM kearsipan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, M. Taufik saat membuka kegiatan tersebut. M. Taufik menambahkan, arsip harus menjadi industri dalam era informasi saat ini. Oleh karena itu, kegiatan mengolah data atau arsip menjadi

informasi menjadi tugas lembaga kearsipan. Dengan demikian, arsip dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat. M. Taufik pun berharap para peserta dapat bersinergi dengan ANRI.

Materi bimkos pada hari pertama diisi oleh Deputy Bidang Pembinaan Kearsipan, Andi Kasman yang

membahas kebijakan nasional SDM Kearsipan. Kemudian pembahasan mengenai kebijakan penilaian jabatan fungsional arsiparis oleh Direktur SDM Kearsipan dan Sertifikasi, Zita Asih Suprastiwi dan pembahasan tentang pelaksanaan tugas jabatan fungsional arsiparis oleh Arsiparis Madya ANRI, Siti Nurhayati. **(pi&sa)**



FOTO: DOK. ANRI

# PLT. KEPALA ANRI BERAUDENSI DENGAN KEPALA BKKBN

Jakarta, (22/1) - Dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah yakni Indonesia Maju dan Sejahtera, Plt. Kepala ANRI M. Taufik melakukan audiensi dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, di gedung BKKBN, Jakarta. Dalam audiensi tersebut M. Taufik menyampaikan bahwa ANRI ingin berperan aktif dalam meningkatkan program kebijakan pemerintah tersebut. Guna mewujudkan keluarga sejahtera melalui pemberdayaan masyarakat, di antaranya menyosialisasikan pentingnya arsip sebagai identitas dan menjamin hak-hak keperdataan masyarakat dalam keluarga sejahtera.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyambut baik dan berterima kasih atas kedatangan Plt. Kepala ANRI dan jajaran, Hasto mengatakan bahwa BKKBN sangat membutuhkan sistem pengarsipan yang bagus karena mengelola data keluarga di

seluruh Indonesia.

Audiensi juga dihadiri Erman Soeparno Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2005-2009), Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya di lingkungan ANRI serta BKKBN. (Inh)



Plt. Kepala ANRI M. Taufik menyerahkan cenderamata kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo pada acara audiensi antara ANRI dan BKKBN di gedung BKKBN, Jakarta.

# SESTAMA ANRI HARAPKAN *SHARING KNOWLEDGE* LAHIRKAN IDE DAN INOVASI



FOTO: DOK. ANRI

*Sharing knowledge* menampilkan 9 presenter yang telah mengikuti kegiatan di 8 negara dan dihadiri peserta sejumlah 70 orang yang terdiri dari arsiparis utama, madya dan widyaiswara madya. *Sharing knowledge* menampilkan pembahasan tentang kegiatan penandatanganan *Memory of Understanding* di Afrika Selatan, konsultasi kebijakan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pengelolaan arsip elektronik di Vietnam, hasil pertemuan konferensi SEAPAVAA 2019 di Kaledonia Baru, hasil pertemuan tahunan ICA di Australia, *executive board meeting* ke-22 SARBICA di Singapura, *benchmarking records center* Arsip Nasional Singapura, *capacity building for document heritage preservation and management* di Seongnam Korea Selatan, *short course winter school National Archives of the Netherlands* di Belanda dan *training wawancara sejarah lisan* di Malaysia.

Jakarta (27/1) - Sekretaris Utama (Sestama) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Sumrahyadi berharap sumber daya manusia (SDM) kearsipan, khususnya arsiparis di lingkungan ANRI mampu menyampaikan ide ataupun inovasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan nasional. Hal itu disampaikan Sumrahyadi saat menyampaikan arahan dan membuka acara *sharing knowledge* sesi II di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari.

Ditambahkan Sumrahyadi, ide atau inovasi tersebut bisa saja lahir setelah para peserta memperoleh pengetahuan dan informasi baru yang disampaikan perwakilan pegawai yang telah melaksanakan perjalanan dinas luar negeri, di mana informasinya disampaikan melalui *sharing knowledge* ini.

“Adanya inovasi ini pun diharapkan dapat memicu lembaga kearsipan daerah untuk juga melakukan inovasi. Saya juga berharap agar para arsiparis dapat mengikuti *call for paper* dalam berbagai *event* internasional yang bisa saja di dalamnya membahas hal-hal yang telah ANRI lakukan yang tidak kalah bagus dengan negara lain,” tambah Sumrahyadi.

Pada *sharing knowledge* sesi II kali ini menampilkan 9 presenter yang telah mengikuti kegiatan di 8 negara dan dihadiri peserta sejumlah 70 orang yang terdiri dari arsiparis utama, madya dan widyaiswara madya. *Sharing knowledge* sesi II menampilkan pembahasan tentang kegiatan penandatanganan *Memory of Understanding* di Afrika Selatan, konsultasi kebijakan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pengelolaan arsip elektronik di

Vietnam, hasil pertemuan konferensi SEAPAVAA 2019 di Kaledonia Baru, hasil pertemuan tahunan ICA di Australia, *executive board meeting* ke-22 SARBICA di Singapura, *benchmarking records center* Arsip Nasional Singapura, *capacity building for document heritage preservation and management* di Seongnam Korea Selatan, *short course winter school National Archives of the Netherlands* di Belanda dan *training wawancara sejarah lisan* di Malaysia.

Lebih lanjut Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum Rini Agustini menyampaikan bahwa *sharing knowledge* juga menjadi bagian pengembangan profesi bagi para pegawai, berbagi pengetahuan agar nilai-nilai positif dapat diterapkan di ANRI. *Sharing knowledge* ini selanjutnya akan menjadi program rutin tahunan bagi para pegawai di lingkungan ANRI. (tk/ns)

# BERI PERHATIAN SERIUS BIDANG KEARSIPAN KOMISI II DPR RI LAKSANAKAN RAPAT DENGAR PENDAPAT DI ANRI



FOTO: DOK. ANRI

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, Gedung C lantai 2, ANRI.

Jakarta, (03/02) - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, Gedung C lantai 2, ANRI. RDP ini menjadi bentuk perhatian serius jajaran Komisi II DPR RI karena yang secara khusus membahas bidang kearsipan dan secara langsung dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mohammad Arwani Thomafi. Ada beberapa fokus pembahasan dalam RDP kali ini yaitu, perlindungan dan penyelamatan arsip terdampak bencana, dukungan tambahan anggaran bagi ANRI, program dan kegiatan ANRI yang termasuk pada program prioritas nasional dan lembaga, penerapan e-arsip, konsep pengelolaan arsip di Ibu Kota Negara (IKN) baru dan pelayanan publik di lingkungan ANRI.

Menurut Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan bahwa RDP ini baru pertama kali dilaksanakan di luar ruangan kerja (pada periode anggota komisi 2019 – 2024). Ditambahkan olehnya, hal ini

dilakukan karena jajaran Komisi II DPR RI memberikan perhatian serius terhadap penyelenggaraan kearsipan. “Kami juga ingin melihat langsung penataan dan manajemen kearsipan yang dimiliki ANRI. Melalui rapat ini pun kami juga mendapatkan banyak informasi dan memang harus dibangun sebuah kesadaran yang besar tentang pentingnya arsip. Karena selama ini kami menilai masyarakat masih belum memahami benar akan pentingnya arsip. Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah, nah salah satu pembuktian sejarah itu dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen atau dengan kata lain adanya arsip. Jadi jika arsip kita lemah atau tidak ada, berarti artinya kita tidak menghargai sejarah. Jika kita sebagai masyarakat tidak menghargai sejarah, berarti kita tidak bisa menjadi bangsa yang besar,” jelas anggota DPR RI yang berasal dari Fraksi Partai Golongan Karya ini. Lebih lanjut beliau pun menegaskan bahwa konsep-konsep yang ditawarkan oleh ANRI untuk pengembangan sistem kearsipan di masa mendatang, pengelolaan arsip

berbasis teknologi, informasi dan komunikasi serta pengembangan kapasitas sdm harus didukung.

Pada RDP ini Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, M. Taufik juga menjelaskan berbagai hal yang ditanyakan oleh anggota Komisi II DPR RI, antara lain yang berkaitan dengan perlindungan dan penyelamatan arsip bencana, penerapan e-arsip yang terintegrasi dengan kementerian/lembaga lain, pemanfaatan media komunikasi dan informasi dalam peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang kearsipan kepada masyarakat, pentingnya keberadaan ANRI dan kearsipan dalam pembahasan IKN baru, penambahan anggaran, dan penyelenggaraan kearsipan di daerah. Selain anggota Komisi II DPR RI, RDP juga diikuti oleh jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan ANRI.

Usai pembahasan RDP, anggota Komisi II DPR RI pun berkesempatan melaksanakan peninjauan ke tempat pelayanan restorasi arsip yang terdampak bencana, tempat penyimpanan arsip (depot), ruang baca dan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa. (tk)

# KOMISI II DPR RI BERI APRESIASI LAYANAN RESTORASI ARSIP TERDAMPAK BENCANA



Anggota Komisi II DPR RI saat mengunjungi Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa yang terdapat di Gedung A Lantai 1 Arsip Nasional Republik Indonesia.

Jakarta, (03/02) - Usai melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) melaksanakan peninjauan ke ruang restorasi arsip yang terdampak bencana. Pada peninjauan tersebut, anggota DPR RI berkesempatan berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang sedang mengambil arsip yang telah direstorasi oleh ANRI.



Anggota Komisi II DPR RI saat mengunjungi tempat penyimpanan arsip (depot) didampingi Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia M.Taufik beserta jajarannya.

Menurut seorang warga, ia mengetahui layanan perbaikan arsip keluarga (laraska) dari media sosial dan kini ia tengah mengambil arsipnya kembali dalam keadaan bersih dan kering setelah sebelumnya penuh dengan lumpur akibat terendam banjir. Para anggota Komisi II DPR RI sangat antusias dan memberikan apresiasi kepada layanan yang telah diberikan ANRI, sehingga membantu masyarakat secara langsung untuk memperbaiki arsipnya tanpa pungutan biaya.

Selain mengunjungi tempat pelayanan restorasi arsip yang terdampak bencana jajaran Komisi II DPR RI juga mengunjungi tempat penyimpanan arsip (depot), ruang baca dan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa. (tk)

# PERINGATI 70 TAHUN HUBUNGAN DIPLOMATIK, INDONESIA - RUSIA GELAR PAMERAN ARSIP DAN LUKISAN



FOTO: DOK. ANRI

Pameran digelar pada 3-17 Februari 2020 dan dibuka oleh Duta Besar Federasi Rusia, Y.M. Lyudmila Vorobieva dan Plt. Direktur Jenderal Amerop, Plt Jubir Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah dan Plt. Kepala ANRI, M.Taufik. Pembukaan dihadiri sekitar 200 undangan yang terdiri dari pejabat Indonesia, Kedubes Federasi Rusia, tokoh masyarakat, media massa, dan masyarakat umum.

Jakarta - 03/02, Memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Rusia, kedua negara menggelar berbagai acara rangkaian kegiatan yang dibuka dengan Pameran Arsip Sejarah Hubungan Diplomatik Indonesia-Rusia dan Pameran Lukisan “Untaian Katulistiwa” di Galeri Nasional, Jakarta.

Pameran digelar pada 3-17 Februari 2020 dan dibuka oleh Duta Besar Federasi Rusia, Y.M. Lyudmila Vorobieva dan Plt. Direktur Jenderal Amerop, Plt Jubir Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah dan Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), M.Taufik. Pembukaan dihadiri sekitar 200 undangan yang terdiri dari pejabat Indonesia, Kedubes Federasi Rusia, tokoh masyarakat, media massa, dan masyarakat umum.

Pameran ini menampilkan Arsip Sejarah Hubungan Diplomatik Indonesia dan Rusia, khazanah ANRI dan Departemen Sejarah, serta dokumenter

Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia.

Arsip yang ditampilkan di antaranya menceritakan berbagai korespondensi Kementerian Luar Negeri Uni Soviet dengan Kementerian Luar Negeri RI tentang pengakuan Uni Soviet terhadap kedaulatan Republik Indonesia pada 3 Februari 1950, dokumen mengenai kerja sama pembangunan Indonesia dan Uni Soviet, seperti Stadion Gelora Bung Karno, Patung Tugu Tani, Rumah Sakit Persahabatan, yang menjadi bagian dari saksi bisu perjalanan panjang hubungan persahabatan kedua negara.

Berbagai film dokumenter koleksi ANRI juga ditampilkan, seperti penyerahan surat kepercayaan Duta Besar Uni Soviet, Nikolay Alexandrovich Mikhailov kepada Presiden Soekarno, kontingen Uni Soviet pada upacara penutupan GANEFO, hingga liputan berita pertandingan persahabatan Tim

Sepakbola Uni Soviet dengan Tim Sepakbola PSM Makassar.

Selain pameran arsip digelar pula pameran lukisan yang menampilkan sekitar 50 lukisan karya seniman terkemuka di Rusia yang dibuat dalam rentang waktu 20 tahun ini, menggambarkan keindahan alam dan Indonesia dari kacamata seniman Rusia.

Mengusung tema “Untaian khatulistiwa”, pameran ini menampilkan hasil karya seniman-seniman Rusia yang tergabung dalam *Bureau of Creative Expeditions* pimpinan Vladimir Nikolaevich Anisimov.

Lukisan-lukisan yang dipajang merupakan kaleidoskop perjalanan seniman Rusia dalam merekam kecantikan alam serta masyarakat pulau Jawa, Sumatera, Madura, Bali, Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi. (is)

# BENCANA BANJIR MENYADARKAN MASYARAKAT JABODETABEK



FOTO: DOK. ANRI

Agar program LARASKA dapat berjalan optimal dengan cakupan yang lebih luas, Plt. Kepala ANRI, M. Taufik, melakukan audiensi dengan tokoh-tokoh berpengaruh seperti Erman Suparno (Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Djarot Syaiful Hidayat (Mantan Gubernur DKI Jakarta), Hasto Wardoyo (Kepala BKKBN), dan Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).

Jabodetabek - 05/02/20, Jakarta, (05/02) – ANRI menyelenggarakan Program Layanan Restorasi Arsip Keluarga (LARASKA) secara gratis kepada masyarakat JABODETABEK yang terkena bencana banjir tanggal 1 Januari 2020. Hingga tanggal 31 Januari 2020, masyarakat yang hadir di ANRI sebagai pengguna layanan sebanyak 582 orang. Melalui Program LARASKA ini, ANRI telah membantu proses restorasi dan perawatan arsip melalui metode enkapsulasi, film oplas, dan laminasi dengan jumlah lebih dari 10.000 lembar arsip otentik yang terdiri dari akte kelahiran, ijazah, Kartu Keluarga, KTP, SIM, BPKB, paspor, surat nikah, sertifikat tanah, foto-foto aktifitas keluarga. Jumlah

tersebut belum termasuk penanganan jenis dokumen lainnya (fotokopi) melalui kegiatan pemisahan antar lembar dan pengeringan, dengan jumlah total lebih dari 29.100 lembar.

Melalui program ini, masyarakat sudah mulai memahami pentingnya arsip keluarga untuk perlindungan hak, identitas, bukti tingkat pendidikan, memori, dan sejarah keluarga. Selain penanganan arsip terdampak bencana, ANRI juga memberikan sosialisasi dan bimbingan singkat kepada masyarakat agar mereka mampu secara mandiri bagaimana cara menyimpan, merawat, melindungi, dan mampu melakukan tindakan darurat apabila terjadi

bencana. Selama 1 (satu) bulan berjalan, proses penanganan arsip keluarga terdampak bencana menarik perhatian publik seperti unsur media pers nasional, legislatif, dan instansi pemerintah lainnya.

Agar program ini dapat berjalan optimal dengan cakupan yang lebih luas, Plt. Kepala ANRI, M. Taufik, melakukan audiensi dengan tokoh-tokoh berpengaruh seperti Erman Suparno (Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Djarot Syaiful Hidayat (Mantan Gubernur DKI Jakarta), Hasto Wardoyo (Kepala BKKBN), dan Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). **(Preservasi ANRI & pa)**

# ANRI RILIS 14 SARANA BANTU PENEMUAN KEMBALI ARSIP STATIS



## FINDING AIDS 2019

### FINDING AIDS "Sarana Temu Balik Arsip"

#### TUJUAN

Meningkatkan  
Aksesibilitas  
Arsip Statis

#### BENTUK

##### DAFTAR ARSIP

Berisi uraian singkat arsip dan nomor panggil arsip;

##### INVENTARIS ARSIP

Berisi sejarah organisasi, riwayat arsip, pertanggungjawaban pengaturan, indeks uraian singkat arsip, nomor panggil arsip, dan lampiran;

##### GUIDE KHAZANAH ARSIP

Kumpulan dari beberapa finding aids yang berisi tentang sejarah ringkas setiap lembaga pencipta arsip yang ada, jumlah arsip, dan data arsipnya.

4  
9  
1

JUMLAH YANG DIBUAT DI 2019

GAMBAR: DOK. ANRI

Jakarta (10/2) - Setiap tahun, Direktorat Pengolahan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

menghasilkan sarana temu balik arsip atau biasa disebut *finding aids*. Hal ini bertujuan agar arsip yang telah diolah

dapat diakses oleh masyarakat. *Finding aids* ini merupakan hasil akhir dari proses pengolahan arsip yang

meliputi penataan informasi dan fisik arsip yang terdiri atas daftar arsip, inventaris arsip, dan *guide* (khazanah dan tematis).

Daftar arsip adalah *finding aids* berupa daftar yang berisi uraian singkat arsip dan nomor panggilnya. Berbeda dengan daftar arsip, selain terdiri dari uraian singkat dan nomor panggil arsip, inventaris arsip juga dilengkapi sejarah organisasi, riwayat arsip, pertanggungjawaban pengaturannya, indeks, serta lampiran yang mendukung dalam penataan arsip tersebut. Sedangkan *guide*, yaitu kumpulan dari beberapa *finding aids* yang berisi tentang sejarah ringkas setiap lembaga pencipta arsip yang ada, jumlah arsip, dan data arsipnya.

Pada tahun 2019 terdapat 14 *finding aids* yang telah dihasilkan. Berikut daftar *finding aids* pada tahun 2019:

#### **Guide Khazanah Arsip Lembaga Negara**

Pada tahun 2019 Direktorat Pengolahan ANRI membuat *guide* khazanah Lembaga Negara, yaitu *guide* yang menyediakan informasi mengenai sejarah ringkas, jumlah arsip, dan data arsip seluruh lembaga negara dari kementerian hingga lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang disimpan ANRI.

#### **Inventaris Sekretariat Negara Republik Indonesia: Asisten Menteri Urusan Hubungan Dengan Lembaga Tertinggi/Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Seri Pemantauan Organisasi Masyarakat Organisasi Politik 1970 - 1999**

Bermuatan informasi mengenai usaha pemantauan organisasi

masyarakat (ormas) dan organisasi politik (orpol) yang dilakukan Sekretariat Negara, melalui Asisten Menteri Urusan Hubungan Dengan Lembaga Tertinggi/Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. Informasi tersebut disajikan dalam 1.763 nomor arsip.

#### **Inventaris Sekretariat Negara RI: Seri Pidato Ibu Tien Soeharto 1968-1996**

Mengandung informasi berupa teks pidato Ibu Tien Soeharto selama menjadi Ibu Negara. Terdiri dari 1.316 nomor arsip dengan muatan informasi yang dapat menggambarkan pemikiran Ibu Tien Soeharto dalam menyikapi beberapa hal, seperti Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Papua Barat, relasi dengan organisasi masyarakat (ormas) perempuan, dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

#### **Inventaris Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil 1983-1999**

Arsip berupa korespondensi yang terdiri dari surat keputusan, laporan tahunan, kerja sama, dan perihal surat-menyurat lainnya yang berhubungan dengan internal departemen maupun fungsi departemen terhadap masyarakat. Terbagi dalam 1.127 nomor arsip yang menjadi rekam jejak usaha pengembangan koperasi dan usaha kecil di tanah air.

#### **Inventaris Arsip Departemen Agama Republik Indonesia 1950 – 1998**

Terdiri dari arsip tekstual, foto, dan rekaman suara yang memuat informasi mengenai surat-menyurat, laporan intelijen, laporan aduan masyarakat, pembinaan agama, madrasah, serta penyelenggaraan

umroh dan haji. Terurai dalam 7.910 nomor arsip yang terdiri dari subseri Kesekretariatan, Pengawasan, Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Haji dan Umroh, Bimas Kristen, Hindu, Budha, Kerukunan Umat Beragama, Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan.

#### **Inventaris Arsip Dewan Pertimbangan Presiden 2007 – 2014**

Memuat informasi berupa nasehat dan pertimbangan yang melandasi kebijakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, seperti konversi minyak tanah ke gas, *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), *reshuffle* kabinet, serta perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Terbagi dalam 267 nomor arsip, terdiri dari subseri Hubungan Internasional, Politik, Ekonomi, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertahanan dan Keamanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Hubungan Antar Agama, Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan dan Otonomi Daerah, Lingkungan Hidup, dan Pertanian. Dalam mengakses arsip ini diperlukan izin khusus dari Dewan Pertimbangan Presiden.

#### **Inventaris Arsip Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (1974-2005)**

Arsip departemen ini terdiri atas arsip tekstual dan beberapa jilid arsip berupa atlas serta gambar teknik dan kearsitekturan yang memiliki fisik besar sehingga tidak muat dimasukkan dalam boks arsip. Pembagian arsip berdasarkan fungsi (Hukum, Perencanaan dan

Pelaporan, Keuangan, Kepegawaian, Hubungan Masyarakat, Pengawasan, Kerja Sama Luar Negeri, serta Pembinaan Kebudayaan, Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi) diikuti dengan jenis kegiatan atau bentuk redaksi. Di dalamnya, arsip ditata secara kronologis dari kurun waktu tertua hingga termuda yang tertata dalam 1163 nomor arsip.

### **Inventaris Arsip PT Angkasa Pura I (1960-2011)**

Terdiri dari arsip tekstual dan arsip yang dari kegiatan hubungan masyarakat (humas) PT Angkasa Pura I berupa foto positif, foto *slide*, negatif foto, dan arsip video. Arsip dari bagian Humas ini memuat informasi mengenai kegiatan yang dilakukan di kantor pusat maupun di cabang, memuat informasi mengenai tokoh-tokoh yang tampak pada foto, dan juga memberikan informasi mengenai profil dari bandara-bandara yang berada di bawah naungan PT Angkasa Pura I (Persero). Arsip tekstual terdiri atas 884 nomor dengan kurun waktu 1960-2011. Arsip foto positif berjumlah 2248 foto positif. Arsip berbentuk *slide* berjumlah 298 *pieces*. Arsip foto negatif berjumlah 3410 dan arsip video berjumlah 28 judul.

### **Inventaris Arsip *Binnenlandsch Bestuur Afdeeling E***

*Binnenlandsch Bestuur* (BB) merupakan arsip Kementerian Dalam Negeri pada masa kolonial Hindia Belanda. Arsip ini berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan dalam negeri di pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Aksesibilitas sebagian arsip tersebut selama ini tersedia melalui jalan masuk pada masa dinamisnya yaitu index, agenda, dan klapper. Secara

keseluruhan total arsip *Binnenlandsch Bestuur* adalah 2.110 m. Pada tahun ini, arsip yang diolah adalah seri *Grote Bundel Afdeeling E* tahun (1835) 1860-1942 sebanyak 80 m dengan 2.132 nomor arsip.

### **Inventaris Arsip Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia**

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) adalah wadah konsultasi dan aksi bersama menuju persatuan secara spiritual yang memungkinkan komunitas Kristen di Indonesia untuk menghadapi krisis yang terjadi di Indonesia. Berisi informasi mengenai kiprah organisasi perhimpunan gereja-gereja kristen di Indonesia yang mewadahi keragaman latar belakang teologis, denominasi, suku, ras, tradisi budaya, dan tradisi gerejawi di seluruh Indonesia pada masa setelah kemerdekaan yang terurai atas 1.270 nomor arsip.

### **Daftar Arsip Foto Kementerian Penerangan Wilayah Jakarta Tahun 1953**

Berisi informasi visual yang berasal dari dokumentasi Kementerian Penerangan pada kegiatan-kegiatan di Jakarta tahun 1953 dan foto-foto dari hasil reproduksi foto yang merekam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang terurai ke dalam 6078 nomor arsip foto asli dan 555 foto duplikat.

### **Daftar Arsip Foto PPFN: Seri Foto Film Cerita**

Arsip Foto Pusat Produksi Film Negara (PPFN) merupakan hasil produksi PPFN dari tahun 1948 sampai dengan 1963. Direktorat pengolahan mengolah Arsip Foto PPFN: 1948-1963 dalam bentuk foto berbagai ukuran. Jumlah arsip

yang diolah sebanyak 4.349 lembar. Adapun foto-foto yang diolah berasal dari judul film diantaranya: Anggerek Bulan (1948), Aneka Warna (1949), Inspektur Rahman (1950), Si Pintjang (1951), Sajap Memanggil (1952), Belenggu Masyarakat (1953), Koprak Djono (1954), Djajaparna (1955), Kunang-kunang (1957), Ni Gowok (1958), Daun Emas (1963) dan lain-lain.

### **Daftar Arsip *Wees-en Boedelkamers Serie Grootboek***

*Wees en Boedelkamers* dibentuk pada 1 Oktober 1624 dan berkedudukan di Batavia dengan tujuan untuk mengurus harta-harta yang ditinggalkan oleh mereka yang mempunyai ahli waris yang berada di Nederland, anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Pada tahun 2019, arsip *Wees en Boedelkamers: Serie Grootboek* yang diolah adalah arsip dengan kurun waktu 1786-1934 dengan jumlah 620 jilid.

### **Daftar Arsip Foto KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)**

Dr. (H.C.) K. H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur adalah Presiden keempat Republik Indonesia dari tahun 1999 hingga 2001. ANRI menyimpan arsip foto Gus Dur sebanyak 180 album foto yang terdiri dari 14.116 lembar foto. Tahun ini diolah arsip foto berjumlah 2.350 lembar foto yang telah dibagi menjadi empat series, yaitu Pelantikan Kabinet Persatuan Nasional, Kunjungan Tamu Negara, Kunjungan Kerja Presiden, dan Acara Keluarga. Dengan terbitnya semua *finding aids* ini, maka masyarakat sudah bisa mengakses arsip melalui Ruang Baca, Gedung A, lantai 1 ANRI, jalan Ampera Raya nomor 7, Jakarta Selatan. (mthp)

# RAPAT PLENO MAJELIS PERTIMBANGAN AKREDITASI KEARSIPAN



FOTO: DOK. ANRI

Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan Rudi Anton, memimpin rapat pleno majelis pertimbangan akreditasi kearsipan kepada lembaga jasa penataan kearsipan PT. Indoraj Arsip Multiguna.



FOTO: DOK. ANRI

Jakarta, (05/02/2020) - Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan Rudi Anton, memimpin rapat pleno majelis pertimbangan akreditasi kearsipan kepada lembaga jasa penataan kearsipan PT. Indoraj Arsip Multiguna. Pada kesempatan ini, Direktur PT. Indoraj Arsip Multiguna, Fransicus Setyadji memaparkan mengenai penyelenggaraan kearsipan di PT. Indoraj Arsip Multiguna. Berdasarkan hasil rapat pleno, PT. Indoraj Arsip Multiguna mendapat penilaian : 78,14 dengan predikat "BAIK". Penilaian tersebut didasarkan pada kaidah-kaidah di bidang kearsipan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. **(md)**

# PERSIAPAN GNSTA, KEPALA BIG AUDIENSI DENGAN PLT. KEPALA ANRI

Jakarta - 07/02, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin beserta jajarannya melakukan kunjungan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kunjungan diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, M. Taufik beserta pejabat pimpinan tinggi madya ANRI. Kunjungan bertujuan untuk membahas mengenai Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di lingkungan BIG.

Pada kesempatan ini, Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin beserta jajarannya mengunjungi Ruang Penyimpanan Arsip, Restorasi Arsip, Layanan Arsip Statis dan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa. (is)



FOTO: DOK. ANRI

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin beserta jajarannya melakukan kunjungan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).



FOTO: DOK. ANRI

# PUSAT JASA KEARSIPAN SEPAKATI KERJA SAMA DENGAN PT. BPD BALI

Jakarta, (6/2)- Pusat Jasa Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Arsip dengan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali di Kantor Pusat Jasa Kearsipan Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Pada kesempatan tersebut, Plt. Kepala ANRI, M. Taufik mengatakan dengan komitmen jajaran dan cita-cita besar BPD Bali dalam hal pengelolaan perbankan, semoga menjadi perbankan yang *World Class*.

Kepala Pusat Jasa Kearsipan, Amieka mengatakan bahwa kerja sama Pusat Jasa dan PT. BPD Bali sudah sejak 2013. Pada tahun 2020 ini dilanjutkan kerja sama kembali untuk pembuatan Pedoman Kearsipan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Program Arsip Vital, Standar Operasional Prosedur (SOP) Arsip Elektronik, dan Pembuatan Aplikasi Sistem Kearsipan dengan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). Direktur Utama PT. BPD Bali, I Nyoman Sudharma berharap dengan kerjasama ini, tata kelola perbankan BPD Bali bisa lebih baik lagi. Menurutnya, jika pengelolaan



FOTO: DOK. ANRI

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PT. BPD Bali dan Pusat Jasa Kearsipan tentang Pembuatan Pedoman Kearsipan dan Program Aplikasi Sistem Kearsipan PT. BPD Bali, dilakukan oleh Kepala Pusat jasa Kearsipan, Amieka Hasraf dan I Nyoman Sudharma.

arsip tidak bagus secara materiil dan material, maka bisa menyebabkan kerugian lebih besar.

Pada acara tersebut dilakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara PT. BPD Bali dengan Pusat Jasa tentang Pengelolaan Arsip BPD Bali oleh Plt. Kepala ANRI M. Taufik dan Direktur (Dirut) Utama PT. BPD Bali, I Nyoman Sudharma. Penyerahan Persetujuan Kepala ANRI tentang Jadwal Retensi Arsip Bank BPD Bali, dilakukan oleh Deputi

Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI, Andi Kasman dan Dirut PT. BPD Bali I Nyoman Sudharma.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PT. BPD Bali dan Pusat Jasa Kearsipan tentang Pembuatan Pedoman Kearsipan dan Program Aplikasi Sistem Kearsipan PT. BPD Bali, dilakukan oleh Kepala Pusat jasa Kearsipan, Amieka Hasraf dan Dirut PT. BPD Bali I Nyoman Sudharma. (Inh)



FOTO: DOK. ANRI

# WUJUDKAN KOMITMEN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, BASARNAS CANANGKAN GNSTA



FOTO: DOK. ANRI

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) melakukan pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA).

Jakarta - 10/02/20, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) melakukan pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). Penganangan diwujudkan melalui penandatanganan komitmen GNSTA oleh seluruh pejabat tinggi madya Basarnas dengan disaksikan oleh Kepala Basarnas, Bagus Puruhito dan Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), M. Taufik. Acara pencanangan GNSTA dilaksanakan selepas acara Pembukaan Rapat Kerja Basarnas Tahun 2020 di Hotel Orchardz Industri, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, 10 Februari 2020.

Sebelum penandatanganan komitmen GNSTA, Kepala Basarnas, Bagus Puruhito membacakan dokumen komitmen GNSTA. Pada kesempatan ini, Bagus Puruhito menyampaikan beberapa poin

penting dalam komitmen mendukung Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip diantaranya :

1. Mendukung gerakan nasional sadar tertib arsip
2. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang2an yang berlaku
3. Mewujudkan tertib arsip sebagai program prioritas yang berkelanjutan
4. Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengelolaan arsip
5. Membangun kesadaran persamaan persepsi dan keterikatan seluruh pegawai pada unit kerja terhadap nilai guna dan manfaat arsip.

Sementara itu Plt. Kepala ANRI, M. Taufik dalam sambutannya memberikan apresiasi dan menilai pencanangan GNSTA sebagai langkah strategis dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Basarnas.

“Kami berharap dengan diselenggarakannya pencanangan GNSTA di lingkungan Basarnas dapat tercipta tertib arsip dinamis sebagai bukti akuntabilitas kinerja yang dapat mendukung pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Penggunaan APBN di lingkungan Basarnas, serta dapat menyelamatkan warisan budaya bangsa yang ada di Basarnas melalui penyerahan arsip statis (arsip kesejarahan) kepada ANRI sebagai memori kolektif bangsa”, ungkapnya. (is)

# PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI



FOTO: DOK. ANRI

Kegiatan bimbingan teknis kearsipan bagi arsiparis diikuti oleh 43 orang peserta, terdiri atas 19 orang arsiparis yang diangkat melalui *inpassing* dan 24 orang calon arsiparis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peserta berasal dari berbagai unit kerja, seperti Kantor Pusat Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit, Balai Pelatihan, Poltekkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia.

Jakarta (12/02/2020) - Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM kearsipan khususnya bagi arsiparis, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kearsipan Bagi Arsiparis yang diangkat melalui penyesuaian/*inpassing* dengan menggandeng Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selaku pembina kearsipan nasional melalui Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi, menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang kearsipan. Bimbingan teknis ini diselenggarakan tanggal 10-12 Februari 2020 di Ruang Monas 5 dan Monas 6 Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat.

Materi yang disampaikan antara lain Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis, Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional, Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Pejabat Fungsional Arsiparis, SKHK dalam

Pengelolaan Arsip Dinamis dan Pemberkasan Arsip (Teori dan Praktik), serta penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja Arsiparis (Teori dan Praktik).

Narasumber dalam kegiatan ini antara lain Zita Asih Suprastiwi, S.H., M.H. (Direktur SDM Kearsipan dan Sertifikasi), Drs. Bambang Parjono Widodo, M.Si. (Arsiparis Ahli Utama) dan Damaris Butar Butar (Arsiparis Ahli Madya).

Kegiatan bimbingan teknis ini diikuti oleh 43 orang peserta, terdiri atas 19 orang arsiparis yang diangkat melalui *inpassing* dan 24 orang calon arsiparis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peserta berasal dari berbagai unit kerja, seperti Kantor Pusat Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit, Balai Pelatihan, Poltekkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang tersebar di seluruh

Indonesia.

Selain itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menyelenggarakan Uji Kompetensi Kearsipan bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui *inpassing* bagi 24 orang calon arsiparis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 13-14 Februari 2020 di Hotel Aryaduta dengan menghadirkan Asesor Madya dari ANRI antara lain Widarno, S.H., M.H., Drs. Tamsir dan Abdullah Shobri, S.E, MAB.

Kegiatan uji kompetensi kearsipan berupa Ujian Tertulis berbasis TIK, Ujian Wawancara, Pengumpulan Makalah/Karya Tulis bagi calon arsiparis yang akan menduduki jenjang Arsiparis Ahli Muda dan Ahli Madya, serta Presentasi Makalah/ Karya Tulis bagi calon arsiparis yang akan menduduki jenjang jabatan Arsiparis Ahli Madya. **(rb)**

# PEMERINTAH KOTA SURAKARTA SUKSESKAN RAKORNAS PENGAWASAN KEARSIPAN 2020

Surakarta (12/2/2020) - Dalam rangka mengoordinasikan persiapan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Kearsipan 2020 yang akan dilaksanakan di Kota Surakarta, Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), M. Taufik melakukan kunjungan silaturahmi kepada Walikota Surakarta,



F.X. Hadi Rudyatmo didampingi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta, Ismi dan Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan, Rudi Anton.

Dalam kesempatan tersebut, F.X.Hadi Rudyatmo menyampaikan terima kasih atas kepercayaan ANRI untuk memilih Kota Surakarta sebagai tuan rumah Rakornas. F.X.Hadi Rudyatmo menyambut baik dan siap mendukung suksesnya acara Rakornas Pengawasan Kearsipan 2020 di Kota Surakarta. (it)

# SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS ANGKATAN XII TAHUN 2020



Kegiatan Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis Angkatan XII Tahun 2020 diikuti 41 orang arsiparis, terdiri dari 32 orang arsiparis yang akan naik jenjang jabatan dan 9 orang arsiparis yang mengikuti sertifikasi bidang pengelolaan arsip dinamis. Para arsiparis ini berasal dari berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia yang telah mengirimkan berkas portofolio permohonan sertifikasi dan telah dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Padang (11/02) - Dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kearsipan, khususnya arsiparis yang akan naik jenjang jabatan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis Angkatan XII Tahun 2020 di Tempat Uji Kompetensi (TUK) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Kegiatan sertifikasi dilaksanakan mulai tanggal 11 s.d 14 Februari 2020 di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumbar, jalan Raya Indarung km 12, Padang Besi, Lubuk Kilangan, Padang, Sumbar. Kegiatan ini diikuti 41 orang arsiparis, terdiri dari 32 orang arsiparis yang akan naik jenjang jabatan dan 9 orang arsiparis

yang mengikuti sertifikasi bidang pengelolaan arsip dinamis. Para arsiparis ini berasal dari berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia yang telah mengirimkan berkas portofolio permohonan sertifikasi dan telah dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari ini diawali dengan pembukaan yang dihadiri Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumbar, Wardarusmen dan Kepala BPSDM Provinsi Sumbar, Jefrinal Arifin. Acara dilanjutkan dengan pengarahan tentang Pembinaan SDM Kearsipan oleh Direktur SDM Kearsipan dan Sertifikasi, Zita Asih Suprastiwi.

Pada hari kedua, peserta sertifikasi memperoleh pembekalan materi bidang kearsipan, mencakup Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Pejabat Fungsional Arsiparis dan Sasaran Kinerja Pegawai yang disampaikan Arsiparis Madya, Siti Nurhayati dan Arsiparis Ahli Muda, Widya Wahyuni Setianingrum. Selanjutnya, ujian dilaksanakan pada hari ke tiga dan empat yang terdiri dari ujian tertulis, ujian praktek dan wawancara. Adapun asesor dalam kegiatan sertifikasi ini adalah Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI Andi Kasman, Direktur SDM Kearsipan dan Sertifikasi Zita Asih Suprastiwi, Kepala Subdirektorat Sertifikasi ANRI Aat Siti Mulyati dan Asesor Pratama Provinsi Sumbar Alfiandri. (rb)

# TINGKATKAN KUALITAS KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL DI ERA DIGITAL, ANRI SELENGGARAKAN RAPAT KOORDINASI INTERNAL



FOTO: DOK. ANRI

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, M. Taufik, menyampaikan bahwa acara ini bertujuan agar seluruh Pegawai ANRI tidak lelah untuk mengembangkan diri di era yang penuh perubahan ini dengan belajar kepada sosok-sosok yang berpengalaman dan memiliki kompetensi yang kredibel.

Jakarta, (18/02) - Untuk menghadapi arus perubahan yang begitu cepat akibat adanya transformasi di era digital, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Internal di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, Gedung C Lantai 2, ANRI yang dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta seluruh Pejabat Fungsional Tertentu di lingkungan ANRI. Dalam acara Rapat Koordinasi yang dihadiri tidak kurang dari 250 peserta, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, M. Taufik, menyampaikan bahwa acara ini bertujuan agar seluruh Pegawai ANRI tidak lelah untuk mengembangkan diri di era yang penuh perubahan ini dengan belajar kepada sosok-sosok yang berpengalaman dan memiliki kompetensi yang kredibel.

Salah satu sosok yang dapat memberikan inspirasi adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana yang hadir menjadi pembicara kunci pada Rapat Koordinasi Internal tersebut. Dalam pemaparannya, Bima Haria Wibisana, menyampaikan bahwa Pejabat Fungsional sebagai motor dalam dunia birokrasi harus memiliki *future dream* sehingga dapat mewujudkan inovasi yang memicu reformasi radikal dalam cara bekerja yang lebih efektif dan efisien, serta membawa manfaat yang lebih besar bagi

masyarakat. Tidak hanya berpikir untuk tahun ini atau untuk waktu dekat, tetapi juga harus memiliki gambaran untuk berpuluh tahun ke depan.

Bima Haria Wibisana juga menyampaikan mengenai penguasaan teknologi informasi yang tepat sasaran dapat membawa sebuah terobosan yang signifikan, sehingga keberadaan instansi pemerintah dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para Pejabat Fungsional di lingkungan ANRI dapat terus berkembang di era digital dan membawa perubahan yang lebih baik bagi (ANRI). (tp)



FOTO: DOK. ANRI

# KEPENGURUSAN DWP ANRI DIKUKUHKAN KETUM DWP PUSAT



FOTO: DOK. ANRI

Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah dikukuhkan oleh Ketua Umum DWP Pusat masa bhakti 2019-2024, Erni Guntarti Tjahjo Kumolo di Gedung DWP Pusat, jalan Pedurenan Masjid, Kuningan Jakarta Selatan. Pengukuhan ini berdasarkan Keputusan Ketua Umum DWP Pusat Nomor 26 Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengesahan Kepengurusan DWP ANRI.

Jakarta (19/2) – Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah dikukuhkan oleh Ketua Umum DWP Pusat masa bhakti 2019-2024, Erni Guntarti Tjahjo Kumolo di Gedung DWP Pusat, jalan Pedurenan Masjid, Kuningan Jakarta Selatan.

Pengukuhan ini berdasarkan Keputusan Ketua Umum DWP Pusat Nomor 26 Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengesahan Kepengurusan DWP ANRI. Kepengurusan DWP ANRI yang telah dikukuhkan saat ini diketuai oleh Prasetyaningih M. Taufik.

Selain DWP ANRI, pengukuhan juga dilaksanakan terhadap 9 (sembilan) kepengurusan DWP lainnya, yaitu DWP Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, DWP Kementerian Kesehatan, DWP Badan Kepegawaian Negara, DWP Dewan Ketahanan Nasional, DWP Badan Keamanan Laut, DWP Kementerian Sosial, DWP Badan Nasional Penanggulangan Bencana, DWP Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan DWP Provinsi DKI Jakarta.

Turut hadir dalam kegiatan ini Penasihat DWP Polhukam Zaizatun Mahfud M.D, Penasihat DWP Kementerian Kesehatan Ester Terawan Agus Putranto, Penasihat DWP BNPB Santi Doni Monardo, dan Penasihat DWP DKI Jakarta Fery Anies Baswedan. **(tk/nis)**



FOTO: DOK. ANRI

# KEMENDAGRI DAN ANRI SEPAKATI MOU PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI DAERAH



FOTO: DOK. ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mencapai kesepakatan untuk segera menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait peningkatan penyelenggaraan kearsipan di daerah.

Jakarta (20/02/20) - Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di daerah, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mencapai kesepakatan untuk segera menandatangani Memorandum of

Understanding (MoU) terkait peningkatan penyelenggaraan kearsipan di daerah. MoU ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan good governance dan clean government. Mewujudkan hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo secara langsung menerima Pelaksana Tugas

(Plt) Kepala ANRI M Taufik beserta jajaran di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Berkaca pada hasil pengawasan kearsipan terhadap pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia selama 3 (tiga) tahun terakhir, penyelenggaraan kearsipan di daerah masih menunjukkan hasil yang belum optimal. Dengan adanya MoU ini diharapkan akan menjadi upaya konkret yang akan mengatur mengenai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) kearsipan, pembinaan kearsipan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kearsipan (arsiparis) dan pendanaan kearsipan. Adanya MoU ini pun diharapkan permasalahan kearsipan di daerah dapat segera teratasi sehingga akan mendukung terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif serta terpadu antara pusat dan daerah. (itg)

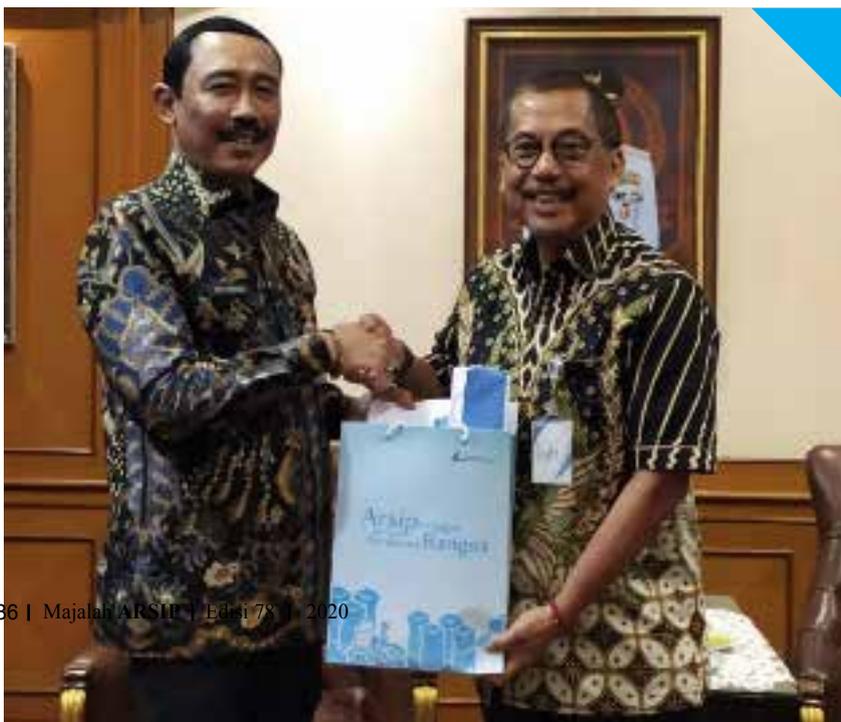


FOTO: DOK. ANRI

# PPID ANRI TEKANKAN PENTINGNYA ARSIP DALAM PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA FORUM PERTEMUAN PPID BADAN LITBANG KESEHATAN



FOTO: DOK. ANRI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), M. Imam Mulyantono memaparkan Strategi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam Upaya Mewujudkan *Open Governance* dan *Open Government* dalam forum Pertemuan PPID.

Bogor (24/2) - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), M. Imam Mulyantono memaparkan Strategi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam Upaya Mewujudkan *Open Governance* dan *Open Government* dalam forum Pertemuan PPID yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) di Hotel Royal Safari Garden, Cisarua, Puncak, Jawa Barat. M. Imam menekankan bahwa arsip memiliki keterkaitan erat dengan informasi publik.

“Arsip dapat menjadi sumber informasi publik yang akurat, tentunya jika arsip yang dikelola autentik, utuh dan terpercaya. Ini tak lain karena rekaman informasi terkait kinerja suatu Badan Publik, tidak dapat dilepaskan dari kearsipan, ini akan menjadi sumber informasi publik. Oleh karenanya dalam penyusunan Daftar Informasi Publik, pengecualian

informasi dan kegiatan layanan informasi publik lainnya, petugas layanan informasi, pranata humas atau pun fungsional umum lainnya juga berkoordinasi dengan arsiparis,” terang M. Imam.

Ditambahkan olehnya, dalam pengelolaan informasi publik PPID juga harus berkolaborasi dengan unit kearsipan yang ada di tiap Badan Publik. Ini pun tak lain karena Undang-Undang tentang Kearsipan memiliki keterkaitan yang erat dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi.

Pada forum yang sama, hadir pula Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, I Gede Narayana. Gede menekankan bahwa kekuatan utama saat ini adalah informasi, siapa yang menguasai informasi maka dapat menjadi yang terdepan, bahkan dapat berimplikasi serius bagi negara. Oleh karenanya, pengelolaan keterbukaan informasi harus menjadi perhatian serius bagi Badan Publik.

Pada kesempatan yang sama, Gede juga menyatakan bahwa memang pada beberapa hal kearsipan memiliki keterkaitan yang erat dengan keterbukaan informasi. Maka dari itu, pihaknya akan kembali memperbaharui kesepahaman bersama antar KI Pusat dan ANRI yang telah habis masa berlakunya, sehingga kerja sama antara KI Pusat dan ANRI dapat berjalan, khususnya yang berkaitan langsung dengan keterbukaan informasi publik.

Adapun forum ini mengangkat tema Tantangan Mengolah Informasi Publik dalam Mendukung Pelayanan Publik dan diikuti oleh pengelola PPID yang berasal dari satuan kerja Balitbangkes, perwakilan PPID Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan Badan Tenaga Nuklir Nasional. (tk)

# DUTA BESAR REPUBLIK TUNISIA LAKUKAN KUNJUNGAN RESMI KE ANRI



FOTO: DOK. ANRI

Kunjungan Duta Besar Republik Tunisia, Riadh Dridi dalam rangka peninjauan kerja sama di bidang kearsipan antar kedua negara, Indonesia - Republik Tunisia.



FOTO: DOK. ANRI

Jakarta - 24/02/20, Duta Besar Republik Tunisia untuk Republik Indonesia Riadh Dridi melakukan kunjungan resmi ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kunjungan Riadh Dridi diterima langsung oleh Plt. Kepala ANRI, M. Taufik beserta jajaran. Kunjungan Duta Besar Republik Tunisia, Riadh Dridi dalam rangka peninjauan kerja sama di bidang kearsipan antar kedua negara, Indonesia-Republik Tunisia. (is)

# ANRI SELENGGARAKAN TES SKD, PLT. KEPALA ANRI TINJAU LOKASI TES



FOTO: DUK. ANRI

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, M. Taufik hadir untuk melihat proses berlangsungnya tes tersebut. Dalam kunjungannya, M. Taufik diajak oleh tim BKN untuk melihat langsung ruangan tes dan ruangan *monitoring* pelaksanaan tes CAT.

Jakarta (24/02/2020) - Sebanyak 1829 peserta CPNS Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang lolos seleksi administrasi hadir di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melaksanakan tes Standar Kompetensi Dasar (SKD) berbasis *Computer Assisted Test* (CAT), Senin (24/02). Tes untuk lokasi Jakarta tersebut dibagi menjadi 5 sesi. Dengan perbandingan 1:28, persaingan antar peserta cukup ketat.

Dalam pelaksanaan tes SKD ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, M. Taufik hadir untuk melihat proses berlangsungnya tes tersebut. Dalam kunjungannya, M. Taufik diajak oleh tim BKN untuk melihat langsung ruangan tes dan ruangan *monitoring* pelaksanaan tes CAT kali ini.

Saat diwawancarai oleh tim BKN, M. Taufik bercerita tentang sedikit pengalamannya ketika melaksanakan tes CPNS pada masanya. Pelaksanaan tes cpns saat ini sudah jauh mengalami kemajuan dibanding dengan zaman dulu yang masih menggunakan cara tertulis. Metode yang telah terkomputerisasi, membuat pelaksanaan seleksi CPNS lebih *fair play*. Kemajuan ini menuntut semua peserta seleksi CPNS melalui proses yang panjang dan nantinya menelurkan SDM yang kompeten, serta dapat memperbaiki stigma negatif PNS di masyarakat.

M. Taufik juga berharap CPNS yang terpilih nanti memiliki kinerja yang luar biasa dan mutu SDM yang berkualitas, sehingga produk/

kinerja hasil pemerintahan dapat mewujudkan pemerintah yang lebih baik.

Terkait isu calo yang marak akhir-akhir ini, M. Taufik menyatakan bahwa isu tersebut sudah biasa dan percaya bahwa BKN akan profesional. M. Taufik mendukung sistem CAT serta upaya-upaya BKN dalam seleksi CPNS yang lebih baik. Dengan begitu, M. Taufik yakin para calo dalam penerimaan CPNS akan gugur/hilang dengan sendirinya.

Setelah tes SKD berakhir, peserta yang memenuhi *passing grade* akan melalui tahapan selanjutnya, yaitu tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Daftar nama yang lolos SKD akan diumumkan lebih lanjut di laman resmi ANRI. (**Inh&pi**)

# PROFESOR YOSHIMI NISHI DARI KYOTO UNIVERSITY JEPANG BERKUNJUNG KE ANRI



FOTO: DOK. ANRI

Kunjungan Profesor Yoshimi Nishi dari Kyoto University diterima oleh Deputy Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Imam Gunarto, Direktur Preservasi, Kandar, serta Kepala Subdirektorat Penyimpanan Arsip, Dhani Sugiharto. Prof. Yoshimi Nishi juga melakukan kunjungan ke Depo Penyimpanan, fasilitas Dry Chamber dan Restorasi.

Jakarta, 24/02/2020 - Menindaklanjuti kegiatan seminar dan *roundtable meeting* arsip tsunami di Aceh pada 5 November 2019 lalu, Profesor (Prof) Yoshimi Nishi dari Kyoto University Jepang melakukan kunjungan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Senin (24/02).

Kunjungan tersebut membahas tentang kebencanaan untuk selanjutnya dapat dilakukan kerja sama tentang pembentukan pusat studi kebencanaan, serta kerja sama dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana terhadap arsip.

Kunjungan dari Kyoto University tersebut diterima oleh Deputy Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Imam Gunarto, Direktur

Preservasi, Kandar, serta Kepala Subdirektorat Penyimpanan Arsip, Dhani Sugiharto. Prof. Yoshimi Nishi

juga melakukan kunjungan ke Depo Penyimpanan, fasilitas *Dry Chamber* dan Restorasi. (pn)



FOTO: DOK. ANRI

# KUNJUNGAN TIM KESEHATAN DOKTER KLINIK ANRI KE TIM RESTORASI ARSIP BPN KOTA BEKASI YANG TERDAMPAK BANJIR



FOTO: DOK. ANRI

Tim Kesehatan dari Klinik ANRI memberikan supervisi dan konsultasi kepada Tim yang dikoordinir oleh Kasubdit Penyimpanan Arsip Dhani Sugiharto dan Kasubdit laboratorium Yanah Suryanah, guna mendapatkan pencerahan mengenai resiko bekerja di ruangan yang tidak sehat.

Jakarta, (26/02)- Restorasi Arsip BPN Kota Bekasi sejumlah 96 kontainer boks yang terkena banjir pada tanggal 1 Januari 2020 silam dengan menggunakan Mesin *Vacuum Freeze Dry Chamber* di ANRI telah berlangsung sejak 8 Januari sampai saat ini, 25 Februari 2020. Pengerjaan restorasi ini diperkirakan mencapai 8 bulan sampai awal September. Tim Restorasi yang berjumlah kurang lebih 25 orang ini bekerja dengan penuh resiko kesehatan dengan kondisi yang berbau, pengap, berdebu, lembab dan dingin yang memungkinkan banyak bakteri. Bagi pegawai yang terlibat dalam tim sangat

beresiko terkena penyakit paru-paru, pernafasan, gatal-gatal, iritasi, alergi dan kemungkinan penyakit lainnya.

Untuk itulah Tim Kesehatan dari Klinik ANRI memberikan supervisi dan konsultasi kepada Tim yang dikoordinir oleh Kasubdit Penyimpanan Arsip Dhani Sugiharto dan Kasubdit laboratorium Yanah Suryanah, guna mendapatkan pencerahan mengenai resiko bekerja di ruangan yang tidak sehat. Untuk itu diberikan pengetahuan dan pembekalan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya resiko kesehatan tersebut, diantaranya:

1. Selalu menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat, fit dengan

makan dan minum bergizi dan seimbang

2. Menggunakan sarana pelindung diri berupa masker, sarung tangan, kacamata google dan jas laboratorium
3. Selalu membersihkan tangan sebelum dan sesudah bekerja dengan hand sanitizer untuk mencegah masuknya kuman dan bakteri ke dalam tubuh melalui tangan.
4. Diberikan vitamin kepada tim sebagai suplemen untuk menguatkan dan menjaga keseimbangan tubuh
5. Jika ada keluhan segera ke klinik untuk memeriksakan diri. **(ds)**

# ANRI DAN KEMENKEU BAHAS PENDALAMAN ISU DAN KEBIJAKAN PROGRAM ANRI DALAM RENSTRA 2020-2024



FOTO: DOK. ANRI

M. Imam menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi tantangan bagi ANRI di tengah keterbatasan sumber daya yang ada saat ini.

Jakarta - 26/02/20, Guna pembahasan lebih mendalam terkait isu dan kebijakan program Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam Rencana Strategis (renstra) 2020-2024, ANRI melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Keuangan Agus Budi Setiawan dan jajarannya serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan ANRI. Pada rapat koordinasi ini ada beberapa hal yang disampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat ANRI, M. Imam Mulyantono antara lain dasar

regulasi keberadaan ANRI, sanksi administratif yang berkaitan dengan kegiatan kearsipan, serta beberapa isu strategis yang menjadi tantangan bagi ANRI untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan nasional.

Pada paparannya, M. Imam menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi tantangan bagi ANRI di tengah keterbatasan sumber daya yang ada saat ini antara lain, pertama tingkat kepatuhan penyelenggara kearsipan masih rendah. Ini terlihat dari hasil pengawasan kearsipan yang telah dilakukan ANRI (per tahun 2018) yang menunjukkan masih

rendahnya tingkat kepatuhan para penyelenggara kearsipan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan kearsipan. Rendahnya kepatuhan tersebut berpengaruh terhadap kurang optimalnya kinerja penyelenggaraan kearsipan nasional yang pada akhirnya menyebabkan kualitas pelayanan publik kurang akuntabel dan transparan.

Kedua, perlindungan dan penyelamatan arsip belum optimal baik yang ada di dalam maupun luar negeri. Padahal ini dapat berdampak pada terancamnya ketahanan nasional dalam berbagai aspek. Ketiga, kurang baiknya



FOTO: DOK. ANRI

penyelenggaraan kearsipan secara nasional, sebagaimana tercermin dari hasil pengawasan kearsipan, berpotensi menjadikan Bangsa Indonesia mengalami amnesia sehingga kesulitan dalam menemukan jati dirinya. Keempat, kualitas pelayanan kearsipan kepada publik masih rendah, ini tak lain karena arsip hingga saat ini belum dimaknakan sebagai entitas yang dapat dilayankan kepada publik. Padahal di luar negeri, tidak hanya dilayankan, arsip dapat berpotensi menjadi destinasi wisata.

Menanggapi hal ini Agus menyatakan bahwa ANRI juga dapat menyampaikan capaian dan prestasi yang telah dilakukan saat ini, serta program-program strategis apa yang akan ditindaklanjuti. Ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengajuan penambahan sumber daya, khususnya terkait penganggaran. Agus pun menegaskan bahwa arsip itu penting

yang harus dijaga kebenaran, kelengkapan, dan kelangsungannya untuk generasi mendatang. Ini tak lain agar mereka tahu seperti apa jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya, di mana itu dapat terekam dalam arsip.

“Untuk ANRI juga tentunya diharapkan dapat terus berkembang, termasuk mencari arsip yang mungkin masih ada di masyarakat supaya menjadi koleksi milik negara. Meskipun berkaitan dengan

data atau informasi yang sifatnya menyenangkan atau menyakitkan bagi pihak tertentu, tapi itu bagian dari sejarah yang harus dirawat, supaya ini menjadi kekayaan bangsa Indonesia sendiri,” tambah Agus. Pada kesempatan yang sama, Agus beserta jajaran juga melaksanakan peninjauan lapangan ke tempat penyimpanan arsip statis (depot), ruang restorasi arsip, e-depot, Ruang Baca, dan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa. (tk/nis)



FOTO: DOK. ANRI

# ANRI GELAR RAKORNAS PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUN 2020



FOTO: DOK. ANRI

Sebagai upaya dalam membangun sinergi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam pengawasan kearsipan pada tahun ini, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Kearsipan Tahun 2020. Rakornas Pengawasan Kearsipan diselenggarakan sejak tanggal 25 s.d 28 Februari 2020 bertempat di The Sunan Hotel Solo, Kota Surakarta.

Solo - 26/02/20, Dalam rangka mendukung pelayanan publik yang prima diperlukan pengelolaan arsip yang tertib sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan kearsipan yang baik menjadi salah satu indikator kinerja setiap lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, dan mendorong tercapainya tertib arsip dan penyelamatan arsip sebagai memori kolektif dan jatidiri bangsa, ANRI melaksanakan pengawasan

kearsipan pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Sebagai upaya dalam membangun sinergi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam pengawasan kearsipan pada tahun ini, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Kearsipan Tahun 2020. Rakornas Pengawasan Kearsipan diselenggarakan sejak tanggal 25 s.d 28 Februari 2020 bertempat di The Sunan Hotel Solo, Kota Surakarta.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Rakornas Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 yakni, pertama, mendukung

kesiapan daerah untuk pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara nasional. Kedua, mendukung tata kelola kearsipan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju serta mempersiapkan sistem kearsipan di Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Selain itu, Rakornas Pengawasan Kearsipan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan kearsipan guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, terkait dengan tata kelola arsip

sebagai salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi. Rakornas juga bertujuan untuk memberikan sarana untuk saling berbagi informasi dan pengalaman dalam penerapan penyelenggaraan kearsipan yang baik.

Acara Rakornas Pengawasan Kearsipan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, Plt. Kepala ANRI, M. Taufik, Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo serta para praktisi profesional yang akan mengisi materi Rakornas. Hadir pada acara Rakornas sekitar 800 peserta dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota pada hajatan bergengsi tersebut.

“Mudah-mudahan sepulang dari sini (Rakornas Pengawasan) kepedulian kita terhadap pengelolaan arsipnya menjadi tinggi”, ujar Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Dalam kesempatan ini, disampaikan pula hasil pengawasan kearsipan yang dilakukan ANRI pada tahun 2019 terhadap Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta penghargaan terhadap instansi yang memperoleh penilaian atas hasil pengawasan kearsipan Tahun 2019 sebanyak 103 instansi.

“Berdasarkan data yang ada setiap tahunnya hasil pengawasan kearsipan menunjukkan tren kenaikan yang positif”, terang Plt. Kepala ANRI, M. Taufik.

Lebih lanjut M. Taufik menambahkan bahwa sebagian



FOTO: DOK. ANRI

besar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, memanfaatkan waktu yang ada untuk melaksanakan perbaikan berdasarkan rekomendasi pengawasan. “Hasilnya adalah rata-rata penyelenggaraan kearsipan sudah bergerak menuju kepada kondisi yang lebih baik. Walaupun masih ada sebagian besar instansi khususnya daerah yang masih berada di zona kurang baik”, imbuhnya.

“Apa yang dilaksanakan ANRI pada hari ini adalah hal yang baik

dan memang kita perlukan”, tutur Tjahjo Kumolo. Lebih lanjut Tjahjo menambahkan bahwa ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional agar mengerahkan segala upaya dalam melakukan pengawasan kearsipan kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. “ANRI harus memastikan bahwa kebijakan kearsipan selalu mutakhir, mengikuti perkembangan zaman dan teknologi”, ungkapnya. (is)



FOTO: DOK. ANRI

# PLT. KEPALA ANRI LANTIK 21 PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DAN 82 PNS



FOTO: DOK. ANRI

Sebanyak 21 orang pejabat fungsional tertentu dan 82 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diambil sumpah dan dilantik oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), M. Taufik di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, Gedung C, lantai 2.

Jakarta - 28/02/20, Jakarta - 28/02/20, Sebanyak 21 orang pejabat fungsional tertentu dan 82 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diambil sumpah dan dilantik oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), M. Taufik di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, Gedung C, lantai 2. Pada kesempatan ini, M. Taufik menyampaikan agar pegawai yang baru dilantik untuk berinovasi di tengah perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang begitu pesat. Apalagi, para pegawai

yang baru dilantik ini tergolong pada generasi milenial, maka semangat inovasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait patut untuk menjadi perhatian demi kemajuan penyelenggaraan kearsipan.

Tak hanya itu, M. Taufik juga menekankan agar para pegawai senantiasa menjunjung etika dan norma yang berlaku dalam bekerja. "Saya harap para generasi muda penerus ANRI ini terus semangat dan bangga menjadi bagian dari komunitas kearsipan Indonesia.

Karena arsip kini sudah mulai tidak dipandang sebelah mata. Banyak nilai yang dapat diangkat dari arsip ini," jelas M. Taufik.

Pada pelantikan ini turut hadir pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, administrator dan perwakilan pejabat fungsional tertentu di lingkungan ANRI. Adapun pejabat fungsional tertentu yang dilantik terdiri dari 2 orang perencana, 3 orang analis kepegawaian, 2 orang perancang peraturan perundang-undangan, dan 14 orang arsiparis. (tp)

# ANRI GELAR *WORKSHOP* SIKN DAN JIKN DI MANADO



FOTO: DOK. ANRI

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, M. Taufik hadir untuk melihat proses berlangsungnya tes tersebut. Dalam kunjungannya, M. Taufik diajak oleh tim BKN untuk melihat langsung ruangan tes dan ruangan *monitoring* pelaksanaan tes CAT.

Manado - 26/02/20, Manado - 26/02/2020. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Workshop Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Acara digelar pada tanggal 26–27 Februari 2020 di Hotel Aryaduta, Manado, dibuka oleh Asisten III Administrasi Umum Provinsi Sulawesi Utara Asiano Gemy Kawatu, SE, MSi dengan membacakan pidato sambutan Gubernur Sulawesi Utara, Oly Dondokambey, SE.

Dalam sambutan pembukaannya, Asiano Gemy menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada segenap pihak yang telah bersinergi dalam menyelenggarakan kegiatan Workshop SIKN dan JIKN yang bernilai penting serta strategis. Kemudian ditegaskan melalui kalimat: “kemajuan jangan dilawan, kemajuan harus menjadi kawan”. Yang dapat dimaknai sebagai ajakan untuk selalu terdepan dalam kemajuan terutama di

bidang teknologi untuk menjalankan tata kelola pemerintahan. Dalam salah satu poin pidatonya, juga disampaikan bahwa penyelamatan, pengamanan, penanganan dan pengelolaan kearsipan harus terus diupayakan dalam kerangka pembinaan tata kearsipan yang semakin berkualitas. Sebab arsip merupakan sumber informasi, sarana pengungkapan sejarah, penelitian maupaun sarana evaluasi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan.

Sebelum pembukaan, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI, Drs. Imam Gunarto, M.Hum menyampaikan laporan penyelenggaraan sekaligus memberikan dorongan kepada seluruh Lembaga Kearsipan baik tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun perguruan tinggi di wilayah provinsi Sulawesi Utara untuk segera bergabung menjadi simpul jaringan SIKN dan JIKN. Selanjutnya

diharapkan juga untuk selalu berperan aktif untuk mengisi konten-konter kearsipan ke dalam JIKN agar generasi mendatang tidak lupa sejarah tempat asalnya.

Di penghujung pidatonya, Imam Gunarto juga memaparkan hasil audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Edwin H. Silangen, SE, MS, pada tanggal 26 Februari 2020. Bahwasannya segenap pimpinan daerah mendukung penuh dalam pengembangan kegiatan kearsipan di wilayah provinsi Sulawesi Utara termasuk di dalamnya adalah implementasi SIKN dan JIKN.

Dalam kesempatan ini, Kepala Pusat Data dan Informasi, Widarno, SH, MH menyampaikan dua materi yang pertama melalui paparan Kepala Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, Dra. Desi Pratiwi, MIM terkait dengan Penyelenggaraan SIKN dan JIKN.

ARSIP NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA

# WORKSHOP

## SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN)

### TAHUN 2020

HOTEL ARYADUTA MANADO, SULAWESI UTARA | 26-27 FEBRUARI 2020



FOTO: DOK. ANRI

Kemudian materi kedua adalah tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bidang Kearsipan. Adapun aplikasi persuratan dan arsip dinamis yang awalnya dikenal sebagai SIKD akan bertransformasi sebagai aplikasi tunggal kearsipan yang telah dire-engineering untuk memenuhi berbagai standar fungsional sampai dengan keamanan. Hal ini senada dengan keberadaan aplikasi SIKN berbasis AtoM yang diinisiasi oleh ICA (Dewan Kearsipan Internasional) yang juga merupakan single aplikasi terstandar.

Dalam kesempatan lain, delegasi

ANRI melakukan beberapa kunjungan kerja, antara lain ke Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), yang diterima oleh wakil rektor Prof. Dr. Ir. Grevo S. Gerung, M.Sc. Kunjungan kerja ini menyatakan bahwa Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi (LKPT) di Unsrat sudah terbentuk, juga sudah memiliki beberapa arsiparis, memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA), dan pengelolaan arsip sudah dimulai walaupun belum maksimal.

Di akhir kegiatan Workshop SIKN dan JIKN, sesuai dengan arahan pidato Gubernur Sulawesi Utara bahwa kegiatan ini harus konsisten dilaksanakan oleh Lembaga

Kearsipan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara, juga diharapkan menghasilkan poin-poin rekomendasi terkait SIKN dan JIKN. Adapun poin rekomendasi tersebut antara lain: Pertama, yaitu menunjuk penanggung jawab di setiap LKD yang ada di Sulawesi Utara untuk mengawal penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Kedua, merencanakan program dan anggaran terkait dengan kegiatan penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Seperti, penyediaan sarana dan prasarana, penelusuran arsip, akuisisi arsip, launching dan ekspos data arsip kepada masyarakat luas. **(sa)**

# WORKSHOP SIKN DAN JIKN DI SUMATERA UTARA



FOTO: DOK. ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Workshop SIKN dan JIKN Tahun 2020 di wilayah Sumatera Utara, yang diikuti oleh 30 peserta dari lembaga kearsipan daerah provinsi dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota.

Sumatera Utara - 19/02/20, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Workshop SIKN dan JIKN Tahun 2020 di wilayah Sumatera Utara, yang diikuti oleh 30 peserta dari lembaga kearsipan daerah provinsi dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota, dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Medan serta dibuka secara resmi oleh Plt. Walikota Medan Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si pada tanggal

19 Februari 2020. Dalam kata sambutannya, Pelaksana Tugas Walikota Medan mengatakan bahwa Pemerintah Kota Medan terus meningkatkan kualitas tata kearsipan, karena itu acara Workshop SIKN dan JIKN sangat bermanfaat untuk layanan informasi kearsipan.

Dalam kesempatan pembukaan Workshop SIKN dan JIKN tersebut, Deputy Bidang Informasi dan

Pengembangan Sistem Kearsipan Drs. Imam Gunarto, M.Hum menyampaikan antara lain tentang maksud dan tujuan penyelenggaraan workshop, tranformasi digital, digitalisasi arsip, publikasi arsip, serta tertib arsip Pemerintah Kota Medan. Pelaksanaan workshop yang berjalan selama dua hari (19 s.d. 20 Februari 2020) diikuti secara antusias dan penuh perhatian dari seluruh peserta. **(tim jikn)**



# DORONG PENINGKATAN KUALITAS MANAJEMEN BPD BALI, PLT. KEPALA ANRI BAGIKAN INFORMASI KEARSIPAN



Denpasar - 02/03/20, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), M. Taufik memberikan informasi mengenai Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan Nasional kepada seluruh jajaran manajerial di lingkungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Kegiatan ini tidak terlepas dari upaya BPD Bali untuk meningkatkan kualitas manajemen dan administrasi yang sudah diterapkan. Kehadiran Plt. Kepala ANRI di kantor pusat BPD Bali merupakan bagian dari jalinan kerja sama antara Pusat Jasa Kearsipan dengan BPD Bali yang dimulai sejak awal tahun 2020. Pada pengarahannya, M. Taufik menyampaikan bahwa kesadaran kearsipan yang meningkat di lingkungan BPD Bali, akan mendorong kualitas manajemen dan administrasi sekaligus transformasi digital yang sedang dilaksanakan oleh BPD Bali. Pada kesempatan yang sama, Tim Pusat Jasa Kearsipan melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang akan menjadi bahan penyusunan sistem informasi kearsipan dinamis yang akan diterapkan di lingkungan BPD Bali. Diharapkan dengan adanya peningkatan kualitas manajemen dan administrasi, BPD Bali akan menjadi salah satu bank terkemuka yang siap merambah skala nasional dan mampu menjadi Badan Usaha Milik Daerah yang tangguh dengan kontribusi yang besar kepada Pemerintah Provinsi Bali. (am)

FOTO: DOK. ANRI

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), M. Taufik memberikan informasi mengenai Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan Nasional kepada seluruh jajaran manajerial di lingkungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

# ANRI DIGITALISASI ARSIP STATIS PURA MANGKUNEGARAN SURAKARTA



FOTO: DOK. ANRI

Kegiatan Digitalisasi Arsip Keraton Nusantara di Pura Mangkunegaran Surakarta dilakukan oleh tim digitalisasi dipimpin oleh Direktur Preservasi, Kandar. Kegiatan berlangsung di Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran dari tanggal 24 - 28 Februari 2020. Tim digitalisasi diterima oleh R. Ay. T. Th. Amani Pudjiastuti, sebagai Pelaksana Tugas Harian Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran.

Perpustakaan Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran Surakarta - 24/03/20, Surakarta (28/02) - Dalam rangka perlindungan, pengamanan, dan pelestarian arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai warisan budaya yang merupakan aset nasional dibidang budaya yang perlu dilestarikan sebagai bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara kepada generasi mendatang, ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional perlu mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan arsip warisan budaya dengan melakukan preservasi melalui kegiatan alihmedia (digitalisasi) arsip peninggalan Keraton Kerajaan Nusantara. Dalam pelaksanaan Kegiatan Digitalisasi Arsip Keraton Nusantara di Pura Mangkunegaran

Surakarta dilakukan oleh tim digitalisasi dipimpin oleh Direktur Preservasi, Kandar. Kegiatan berlangsung di Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran dari tanggal 24 - 28 Februari 2020. Tim digitalisasi diterima oleh R. Ay. T. Th. Amani Pudjiastuti, sebagai Pelaksana Tugas Harian Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran.

Pada kesempatan tersebut Direktur Preservasi juga menyampaikan betapa pentingnya penyelamatan dan pelestarian arsip warisan budaya kerajaan keraton nusantara untuk pengetahuan generasi mendatang. Adapun arsip yang didigitalisasi berupa Arsip Foto koleksi Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran dari tahun 1880 - 1990 sebanyak 567 lembar foto.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan penyerahan berita acara serah terima hasil kegiatan digitalisasi arsip antara Direktu Preservasi dengan Pelaksana Tugas Harian Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran.

Selain Kegiatan Digitalisasi Arsip Keraton Nusantara, tim membuka Stand LARASKA di Acara Rakomas Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 di The Sunan Hotel selama dua hari. Banyak peserta yang berantusias meng-enkapsulasi arsip keluarga.

Kegiatan Digitalisasi Arsip Keraton/Kerajaan Nusantara merupakan Program Kerja Direktorat Preservasi Arsip dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip warisan budaya yang dilakukan secara berkelanjutan. (rw)

# PLT KEPALA: ARSIP TAK AKAN NUMPUK JIKA PENYUSUTAN BERJALAN OPTIMAL



FOTO: DOK. ANRI

M. Taufik saat menyampaikan arahan kepada 25 orang peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis penyusutan arsip.

Jakarta - 03/03/20. Jika pengelolaan arsip di pencipta arsip (kementerian/ lembaga/daerah) masih belum berjalan optimal, maka diindikasikan masih ada sistem kearsipan yang belum berjalan efektif. Hal tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), M. Taufik saat menyampaikan arahan kepada 25 orang peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis penyusutan arsip di Ruang Serba Guna Soemartini, ANRI.

“Apabila siklus pengelolaan arsip berjalan optimal di pencipta arsip, maka arsip tidak akan menumpuk di unit kerja. Siklus pengelolaan arsip sama halnya dengan filosofi kehidupan, di mana ada arsip yang diciptakan, digunakan dan disusutkan,” papar M. Taufik.

Ditambahkan olehnya, Jadwal Retensi Arsip (JRA) memiliki peranan penting dalam kegiatan penyusutan arsip. JRA akan memberikan petunjuk untuk menentukan kapan suatu arsip di instansi masih bersifat aktif, inaktif, musnah atau permanen untuk diserahkan kepada lembaga kearsipan (ANRI, Lembaga Kearsipan Daerah atau Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi).

Menutup arahan, M. Taufik

juga berpesan bahwa kini insan kearsipan harus semangat berinovasi sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Apalagi ditambah dengan konsep pembangunan Ibu Kota Negara baru, diharapkan sumber daya manusia kearsipan yang unggul siap menjadi bagian untuk memajukan penyelenggaraan kearsipan di IKN baru. **(tk/nis)**



FOTO: DOK. ANRI

# WORKSHOP SIKN DAN JIKN DI SULAWESI TENGGARA



FOTO: DOK. ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan workshop SIKN dan JIKN Tahun 2020 di wilayah Sulawesi Tenggara. Workshop diikuti oleh 30 peserta dari lembaga kearsipan daerah provinsi, lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi negeri dilaksanakan di Hotel Carlo Kendari serta dibuka secara resmi oleh Deputy Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Drs. Imam Gunarto, M.Hum pada tanggal 4 Maret 2020.

Sulawesi Tenggara - 05/03/20, Kendari, 5 Maret 2020 - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan workshop SIKN dan JIKN Tahun 2020 di wilayah Sulawesi Tenggara. Workshop diikuti oleh 30 peserta dari lembaga kearsipan daerah provinsi, lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi negeri dilaksanakan di Hotel Carlo Kendari serta dibuka secara resmi oleh Deputy Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Drs. Imam Gunarto, M.Hum pada tanggal 4 Maret 2020.

Sebelum dibuka, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari Drs. H. Halili menyampaikan kata sambutan yang mengapresiasi kegiatan Workshop SIKN dan JIKN

di Kota Kendari untuk meningkatkan layanan informasi kearsipan.

Dalam kesempatan pelaksanaan kegiatan Workshop SIKN dan JIKN tersebut, Deputy Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Drs. Imam Gunarto, M.Hum yang didampingi oleh Kepala Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Desi Pratiwi melakukan audiensi kepada Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Prof.Dr. Muhammad Zamrun Firihu, S.Si, M.Si., M.Sc pada tanggal 4 Maret 2020 sekaligus melakukan peninjauan ke UPT Kearsipan Universitas UHO yang

telah melakukan pengelolaan arsip dengan baik.

Pada hari yang sama, kedua pejabat ANRI tersebut melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari. Keesokan harinya, pejabat ANRI berkesempatan untuk beraudiensi kepada Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Ibu Zanuriah tanggal 5 Maret 2020 untuk membahas komitmen dan dukungan pimpinan daerah terhadap penyelenggaraan kearsipan di wilayah provinsi tersebut. **(tim jikn)**

FOTO: DOK. ANRI



# ANRI SELENGGARAKAN BIMTEK PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DAN ARSIP ASET NASIONAL



FOTO: DOK. ANRI

Kegiatan Bimtek dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 6 Maret 2020 yang diselenggarakan di Hotel Grand Kemang, Jakarta dengan peserta sebanyak 120 orang dari 50 Instansi yang berasal dari Kementerian/Lembaga, BUMN dan Perguruan Tinggi Negeri.

Hotel Grand Kemang, Jakarta. - 04/03/20, Jakarta. (4/3)- Plt. Kepala ANRI M. Taufik didampingi Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Andi Kasman membuka secara resmi sekaligus memberikan arahan pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Nasional.

Dalam arahnya Plt Kepala ANRI menegaskan bahwa Negara secara khusus memberikan perlindungan dan penyelamatan arsip yang berkaitan dengan Kependudukan, Kewilayahan, Kepulauan, Perbatasan, Perjanjian Internasional, Kontak Karya dan Masalah-masalah Pemerintahan yang strategis.

Perlindungan dan Penyelamatan

Arsip tersebut sangat penting, karena arsip tersebut digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan publik dan Kesejahteraan rakyat.

Dan demi menjamin keberadaan dan kelangsungan kegiatan suatu organisasi perlu dilakukan Pengelolaan arsipnya secara terprogram terhadap arsip yang sangat penting sebagai bukti akuntabilitas, alat bukti hukum dan memori organisasi yang merupakan aset bagi suatu organisasi.

Untuk itulah ANRI melalui Direktorat Kearsipan Pusat Kedeputusan Bidang Pembinaan

Kearsipan menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Nasional.

Menurut Ketua Panitia Bimtek, Kasubdit Kearsipan Pusat III, Sulistyowati dalam Laporrannya mengatakan maksud dilaksanakan Kegiatan Bimtek ini adalah untuk memberikan Pemahaman mengenai Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Nasional, sedangkan tujuannya adalah untuk melakukan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset Nasional yang ada di instansinya sesuai dengan Peraturan Perundangan dan Kaidah Kearsipan.

Bimtek Hari Pertama diisi dengan Pemaparan materi dan diskusi tentang Kebijakan Kearsipan Nasional oleh Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI Andi Kasman, kemudian dilanjutkan oleh Direktur Kearsipan Pusat ANR, Azmi dengan membahas Kebijakan Pengelolaan Arsip Terjaga.

Bimtek Hari Kedua, Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan membahas tentang Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara dan Bukti Kepemilikannya. Dilanjutkan dengan diskusi kelompok.

Kegiatan Bimtek dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 6 Maret 2020 yang diselenggarakan di Hotel Grand Kemang, Jakarta dengan peserta sebanyak 120 orang dari 50 Instansi yang berasal dari Kementerian/ Lembaga, BUMN dan Perguruan Tinggi Negeri. (Inh)

# KOMITMEN TERHADAP PENYELENGGARAAN KEARSIPAN BIG CANANGKAN GNSTA



FOTO: DOK. ANRI

Pencanangan GNSTA diwujudkan melalui penandatanganan komitmen dokumen GNSTA oleh para pimpinan BIG disaksikan langsung oleh Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin, Plt. Kepala ANRI, M. Taufik, Sekretaris Utama BIG, Muhtadi Ganda Sutrisna. Turut hadir pada acara ini Deputi bidang Pembinaan Kearsipan, Andi Kasman, dan Deputi bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Imam Gunarto beserta pimpinan BIG.

Bogor - 06/03/20, Badan Informasi Geospasial (BIG) canangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di IPB *International Convention Center*, Bogor, Jawa Barat, 6 Maret 2020. Acara ini bertujuan untuk membangun kesadaran tertib arsip di lingkungan BIG.

Pencanangan GNSTA diwujudkan melalui penandatanganan komitmen dokumen GNSTA oleh para pimpinan BIG disaksikan langsung oleh Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI, M. Taufik, Sekretaris Utama BIG, Muhtadi Ganda Sutrisna. Turut hadir pada acara ini Deputi bidang Pembinaan Kearsipan, Andi Kasman, dan Deputi bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Imam Gunarto beserta pimpinan BIG.

Menurut Muhtadi arsip memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi. "Jadi ini (pengelolaan arsip) penting, bukan lagi sebuah paksaan," ungkapnya.

Sementara itu Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin menyampaikan bahwa informasi geospasial saat ini banyak berupa peta, baik cetak, digital dua dimensi maupun tiga dimensi. Arsip peta tersebut ada peta tematik dan non tematik. Menurut Hasanuddin arsip geospasial memiliki peranan yang sangat strategis dalam penentuan dan pengamanan batas negara.

"Pentingnya arsip geospasial salah satunya arsip peta batas wilayah. Akan sangat penting untuk penentuan batas negara dan pengamanan nasional," terangnya.

Hasanuddin berharap ke depan sumber daya manusia kearsipan menjadi arsiparis digital.

Pada kesempatan ini Plt. Kepala ANRI, M. Taufik sangat mengapresiasi kepada pimpinan dan pegawai BIG karena telah berkomitmen terhadap penyelenggaraan kearsipan khususnya di lingkungan BIG. Lebih lanjut M. Taufik memotivasi kepada seluruh para SDM Kearsipan yang hadir agar menjadi garda terdepan dalam menyajikan informasi yang autentik dan kredibel.

"Menjadi arsiparis jangan merasa terpinggirkan. Karena Arsiparis harus ada di garda depan dalam menyediakan informasi sesuai dengan pedoman akses arsip," terangnya. (is/wsb)

# PLT. KEPALA ANRI MEMBUKA DIKLAT FUNGSIONAL PENGANGKATAN DAN PENJENJANGAN ARSIPARIS ANRI TAHUN 2020



FOTO: DOK. ANRI

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar Diklat Fungsional Pengangkatan dan Penjenjangan Arsiparis ANRI Tahun 2020. Kegiatan diklat dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala ANRI, M. Taufik di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, Rabu (11/3).

Jakarta - 11/03/20, Jakarta (11/3) – Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar Diklat Fungsional Pengangkatan dan Penjenjangan Arsiparis ANRI Tahun 2020. Kegiatan diklat dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala ANRI, M. Taufik di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari.

Kepala Bidang Pelaksanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Rita Yuniati menyampaikan penyelenggaraan diklat kearsipan digelar sebagai bagian dari upaya meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keahlian SDM di bidang kearsipan secara profesional sebagai arsiparis di lingkungan ANRI.

“Diklat fungsional pengangkatan dan penjenjangan arsiparis ANRI diikuti oleh 36 orang calon peserta diklat fungsional pengangkatan

arsiparis ahli, 28 orang calon peserta diklat fungsional pengangkatan arsiparis terampil, dan 17 orang calon peserta diklat fungsional penjenjangan arsiparis tingkat terampil ke arsiparis tingkat ahli,” papar Rita Yuniati.

Plt. Kepala ANRI, M. Taufik dalam

sambutannya menjelaskan bahwa diklat kearsipan tersebut merupakan momentum maju atau tidaknya SDM kearsipan. M. Taufik berharap penyelenggaraan diklat kearsipan ke depan dapat kekinian dengan menyesuaikan era digital. **(Inh/sa)**



FOTO: DOK. ANRI

# ANRI DAN BADAN BAHASA BERKOLABORASI RESTORASI ARSIP TERDAMPAK BANJIR



FOTO: DOK. ANRI

Tim Restorasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkolaborasi dengan Biro Umum dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melaksanakan restorasi arsip yang terdampak banjir.

Jakarta - 11/03/20, Tim Restorasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkolaborasi dengan Biro Umum dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melaksanakan restorasi arsip yang terdampak banjir. Sebelumnya, pada 23 dan 25 Februari 2020 Kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud di jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun Jakarta Timur terdampak banjir dan mengakibatkan sejumlah arsip turut terendam. Merespons hal ini, jajaran Biro Umum dan Badan Bahasa Kemdikbud segera berkoordinasi dengan tim restorasi ANRI untuk menentukan langkah-langkah penyelamatan arsip yang terdampak banjir.

Menurut Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, M. Abdul Khak, ini menjadi kali pertama ruang kerja Badan

Bahasa terdampak banjir. Akibatnya, arsip yang disimpan di lantai 1 turut terkena banjir. "Kami dengan cepat berkoordinasi dengan Biro Umum untuk penanganan arsip tersebut. Kami pernah mendengar bahwa ANRI dapat merestorasi arsip. Memang ilmu seperti ini (restorasi arsip) sangat diperlukan, bahkan bukan hanya ketika terkena banjir. Tapi juga dari sisi aspek pencegahan, misalnya kondisi, tata ruangan agar tidak terkena banjir. Ke depannya kami juga berencana akan menaikkan tinggi bangunan dan mengalokasikan ruang khusus untuk penyimpanan arsip yang aman dari bencana, serta yang sesuai dengan NSPK yang ditetapkan ANRI," terang M. Abdul Khak. Beliau juga berharap agar ANRI lebih gencar menyampaikan informasi bahwa ANRI dapat berkolaborasi dengan instansi untuk perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana.

Lebih lanjut Kepala Subdirektorat

Restorasi Arsip ANRI, A.A. Gede Sumardika menyampaikan bahwa selama dua hari ini (11 s.d 12 Maret 2020) tim restorasi ANRI secara khusus akan memberikan pendampingan kepada tim restorasi arsip dari Biro Umum dan Badan Bahasa Kemdikbud. "Sebelumnya, kami tim restorasi ANRI telah berkoordinasi dan melakukan survei terhadap arsip yang terkena banjir di Badan Bahasa. Nantinya, selain memberikan pendampingan tentang tata cara merestorasi arsip terdampak banjir kepada tim dari Biro Umum dan Badan Bahasa, tim restorasi ANRI juga tetap akan memberikan asistensi dan *monitoring* kembali jika dibutuhkan penanganan lebih lanjut," jelas Agung.

Sebagai informasi, terdapat 5 langkah yang menjadi prinsip dasar penyelamatan arsip terdampak banjir. Pertama, pelaksanaan evakuasi. Petugas yang mengevakuasi arsip harus hati-hati sehingga tidak merusak arsip. Kedua, pembersihan arsip. Apabila arsip kotor dibersihkan dengan air mengalir sampai kotoran hilang, kemudian arsip disemprot alkohol agar tidak tumbuh jamur. Ketiga, pengeringan arsip. Arsip dikeringkan dengan membuka lembar per lembar secara hati-hati. Arsip dapat dikeringkan secara alami atau dengan bantuan kipas angin dan tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Keempat, untuk membantu pengeringan dapat dibantu dengan menggunakan gosokan (tidak langsung mengena pada arsip, tetapi harus dilapisi) dan *hair dryer*. Kelima, penyusunan arsip kembali sesuai dengan susunan awal. (tk)

# LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH BERKOMITMEN SUSUN PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL DAN DAFTAR ARSIP TERJAGA



FOTO: DOK. ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengadakan *Workshop* Pengelolaan Arsip Terjaga dan Aset Nasional untuk Lembaga Kearsipan Daerah dan Kabupaten/Kota di wilayah II (Jawa dan Sumatra).

Jakarta (11/03/20) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengadakan *Workshop* Pengelolaan Arsip Terjaga dan Aset Nasional untuk Lembaga Kearsipan Daerah dan Kabupaten/Kota di wilayah II (Jawa dan Sumatra). Acara tersebut membahas pengelolaan arsip aset nasional sebagai pendukung terselenggaranya pelayanan publik dan bertujuan untuk mengajak Kepala Lembaga Kearsipan Daerah berkomitmen dalam pengelolaan arsip vital, arsip terjaga dan arsip aset nasional.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala ANRI, M. Taufik memaparkan bahwa arsip terjaga merupakan arsip yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Arsip tersebut terdiri dari arsip kependudukan, kewilayahan, kehutanan, perbatasan, kontrak karya, perjanjian internasional, dan masalah pemerintahan strategis.

"ANRI berupaya untuk menyelamatkan arsip tersebut sejak awal terbentuknya lembaga ini. Mulai dengan alih media hingga pembentukan *task force* penanggulangan kerusakan arsip terdampak bencana," papar M. Taufik.

Terkait pemindahan ibu kota baru, M. Taufik menekankan bahwa diperlukan penyelamatan arsip Kementerian dan Lembaga sebelum proses pemindahan. Selanjutnya arsip akan diolah agar bisa menjadi media pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat.

Kearsipan menjadi pilar penting dalam menjaga budaya bangsa dan menjamin kualitas pelayanan publik. Direktur Aparatur Negara, Badan Perencana dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Tatang Mutaqqin menekankan bahwa SDM kearsipan harus unggul dan mengikuti perkembangan teknologi. Karena

dalam lingkup revolusi industri 4.0, aset tidak hanya berupa barang (*tangible*) tetapi juga aset *intangible* seperti *skill*, paten, dan kemampuan berkolaborasi. Selain itu arsip juga memiliki peranan penting dalam penanggulangan korupsi.

Kementerian Keuangan sedang menyusun prosedur penyimpanan arsip aset berbasis digital. Selain itu sedang dirumuskan prosedur penyimpanan arsip kepemilikan tanah milik pemerintah. Kepala Subdirektorat Barang Milik Negara, Tunggul Yunianto, berharap arsip tersebut bisa dikelola oleh ANRI. Dengan demikian, Kementerian dan Lembaga tidak perlu repot menyimpan arsip tersebut.

Hal lain yang dibahas dalam kegiatan tersebut, yakni akuisisi arsip aset. Salah satu yang menarik adalah di wilayah perbatasan, beberapa arsip dianggap sebagai benda keramat. Oleh karenanya, untuk mengakuisisi arsip tersebut si pemilik arsip mensyaratkan untuk diadakan upacara adat. Selain itu, untuk arsip aset budaya diperlukan pengakuan dari UNESCO, proses kurasinya harus diperagakan dan jurinya berasal dari 100 negara berbeda.

*Workshop* Pengelolaan Arsip Terjaga dan Aset Nasional ditutup dengan penandatanganan komitmen penyusunan *draft* pedoman pengelolaan arsip vital dan penyusunan daftar arsip terjaga yang ditandatangani oleh 3 perwakilan Lembaga Kearsipan Daerah wilayah dua, yang disaksikan oleh 50 perwakilan Lembaga Kearsipan Daerah. (ws)

# MENTERI PANRB LANTIK PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN ANRI



FOTO: DOK. ANRI

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo melantik dan mengambil Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Kantor ANRI Jalan Ampera Raya, Cilandak.

ANRI Jakarta - 13/03/20, Jakarta.- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo melantik dan mengambil Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Kantor ANRI Jalan Ampera Raya, Cilandak.

Menteri PANRB berpesan agar pejabat yang baru dilantik dapat bekerja untuk melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya dalam bidang kearsipan yang disesuaikan dengan Prioritas Pembangunan dari Presiden RI, Joko Widodo.

Pada kesempatan yang sama, ANRI juga melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* dengan sejumlah lembaga pemerintah dan swasta untuk peningkatan kinerja dan mutu penyelenggaraan kearsipan serta transformasi digital di bidang

kearsipan. Kerja sama kearsipan tersebut dilakukan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (Kemendes PDTT), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan PT. Inet Global Indo.

Hadir pada acara pelantikan, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo,

Ketua KPU Arief Budiman, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Mustari Irawan, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI. Sri Sumekar, Staf Ahli bidang Hubungan Antar Lembaga Kemendes PDTT Supradadi, Santoso Arif dari PT. Inet Global Indo serta pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator. **(Inh)**



FOTO: DOK. ANRI

ANRI melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding dengan sejumlah lembaga pemerintah dan swasta

# ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19, ANRI BERLAKUKAN *WORK FROM HOME* (WFH)



ARSIP NASIONAL  
ANRI REPUBLIK INDONESIA

Sehubungan dengan diberlakukan **Work From Home (WFH)**, maka tugas kedinasan dapat dilakukan melalui daring dengan memanfaatkan akses portal atau aplikasi sebagai berikut:

- <http://kepegawaian.anri.go.id>
- <http://sikd.anri.go.id>
- <http://sipanda.anri.go.id>
- <http://sipanda.anri.go.id/sinori>
- <https://anri.go.id/login> \*Uber Arsip
- <https://eppid.anri.go.id>
- <http://anri.sikn.go.id>
- <http://portal.anri.go.id:8585/moodle>  
\*e-learning untuk pusklat

**Work From Home**  
— KITA BISA —

**\*\*Upload "Arsip Hari ini" melalui website dan media sosial ANRI (FB, Instagram, Twitter)**

yang melaksanakan WFH, tetap melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang berlaku, tetap berada di tempat tinggal dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan rencana kerja yang disepakati dengan atasan langsung, serta melaporkan hasil pekerjaan setiap hari melalui sistem Aplikasi Catatan Kinerja Pegawai (Asli Cakep).

Penerapan WFH ini menjadi salah satu wujud responsif ANRI terhadap imbauan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang upaya pencegahan penularan Covid-19 di tempat kerja, penetapan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020

tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui penerapan WFH tersebut, diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir penyebaran Covid-19. Namun, tetap memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tidak terkendala, sehingga kinerja organisasi dapat berjalan efektif. (tk)

Jakarta, (18/03) - Sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran *corona virus disease* 2019 (Covid-19), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memberlakukan *Work From Home* (WFH) bagi jajaran pegawai sejak 16 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 dan selanjutnya akan kembali dilakukan evaluasi sesuai kebutuhan. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan

Penyebaran Covid-19 di Lingkungan ANRI yang selanjutnya dilakukan beberapa perubahan dalam Instruksi Kepala ANRI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Instruksi Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2020.

Meskipun demikian, Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Arsiparis Utama tetap bekerja di kantor. Sedangkan bagi pegawai

# CEGAH PENYEBARAN COVID-19, ANRI ALIHKAN LAYANAN TATAP MUKA MENJADI DARING

Jakarta - 19/03/20, Jakarta  
– Sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), terhitung sejak 16 Maret 2020 Arsip Nasional Republik Indonesia menutup sementara layanan secara tatap muka.

Adapun layanan tatap muka yang ditutup sementara meliputi, Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa, layanan informasi publik di Pusat Pelayanan Informasi PPIID ANRI, Layanan Restorasi Arsip Keluarga, Ruang Layanan Arsip, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan dan Gedung ANRI di jalan Gajah Mada Jakarta Barat.

Penutupan layanan ini berlangsung sampai 31 Maret 2020 dan akan dibuka sesuai dengan perkembangan situasi. Jika masyarakat membutuhkan informasi lebih lanjut, ANRI juga menyediakan whatsapp center di nomor 0811 1118 157.

Meskipun layanan tatap muka ditutup sementara, ANRI tetap memberikan pelayanan informasi kearsipan secara daring, antara lain melalui:

- Situs web : [anri.go.id](http://anri.go.id)
- Sertifikasi kearsipan : [sertifikasi.anri.go.id](http://sertifikasi.anri.go.id)
- Layanan Informasi Publik : [eppid.anri.go.id](http://eppid.anri.go.id)

**ARSIP NASIONAL ANRI REPUBLIK INDONESIA** #ARSIPNASIONALRI #TANGGAPCORONA #COVID19  
\*INSTRUKSI KEPALA ANRI NO.2 TAHUN 2020

Dengan memperhatikan situasi dan perkembangan penyebaran **Covid - 19**, maka sebagai langkah antisipasi sekaligus melindungi pegawai dan masyarakat, terhitung sejak tanggal **16** ▶ **31** **Maret 2020**

## ARSIP NASIONAL RI

memberlakukan *Work From Home (WFH)*.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami mempermaklumkan kepada khalayak pengguna layanan bahwa kami melaksanakan penutupan layanan yang bersifat tatap muka (offline), terhadap pelayanan sebagai berikut:

- Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa
- Layanan Informasi Publik
- Layanan Restorasi Arsip Keluarga
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan
- Pusat Jasa Kearsipan
- Gedung ANRI Gajah Mada
- Ruang Layanan Arsip

BAGI MASYARAKAT YANG INGIN MENDAPATKAN INFORMASI KEARSIPAN DAPAT MENGAKSES PORTAL SEBAGAI BERIKUT:

WEBSITE ANRI <a href="http://anri.go.id">anri.go.id</a>	PPID ANRI <a href="http://eppid.anri.go.id">eppid.anri.go.id</a>
SERTIFIKASI KEARSIPAN <a href="http://sertifikasi.anri.go.id">sertifikasi.anri.go.id</a>	JIKN ANRI <a href="http://jikn.anri.go.id">jikn.anri.go.id</a>
HELPDESK SIKN & JIKN <a href="http://helpdesk.sikn.go.id">helpdesk.sikn.go.id</a>	EMAIL SIKN & JIKN <a href="mailto:support@sikn.go.id">support@sikn.go.id</a>
E-LEARNING PUSDIKLAT <a href="http://portal.anri.go.id:8585/moodle">portal.anri.go.id:8585/moodle</a>	YOUTUBE PEMBELAJARAN • Arsip Nasional RI • Pusat SIKN dan JIKN • restorasiarsipanri
WHATSAPP CENTER <b>0811 1118 157</b>	

- JIKN ANRI : [jikn.anri.go.id](http://jikn.anri.go.id)
- Helpdesk SIKN dan JIKN : [helpdesk.sikn.go.id](http://helpdesk.sikn.go.id)
- Email SIKN dan JIKN : [support@sikn.go.id](mailto:support@sikn.go.id)
- E-learning diklat : [portal.anri.go.id:8585/moodle](http://portal.anri.go.id:8585/moodle)
- Youtube pembelajaran : Arsip Nasional RI, Pusat SIKN dan JIKN, restorasiarsipanri

Penutupan sementara layanan secara tatap muka ini resmi

dituangkan dalam Instruksi Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan ANRI yang selanjutnya dilakukan beberapa perubahan dalam Instruksi Kepala ANRI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Instruksi Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2020. Pada masa penutupan sementara ini, ANRI juga melaksanakan pembersihan dengan menggunakan desinfektan. (tk)

# PPID ANRI IKUTI PENDALAMAN PRESENTASI MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020



FOTO: DOK. ANRI

PPID ANRI mengikuti sesi I dengan panelis terdiri dari Komisioner KI Pusat Arif Adi Kushardono dan Romanus Ndaou, serta akademisi yakni peneliti LIPI, Prof. Siti Zuhro. Pada tahapan monev KIP ini sebelumnya telah dilaksanakan pengisian *Self Assesment Quitionare* secara daring dalam aplikasi [e-monev.komisiinformasi.go.id](http://e-monev.komisiinformasi.go.id) dan mengirimkan video presentasi PPID yang berfokus pada kolaborasi dan inovasi.

Jakarta - 05/10/20, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (Humas), Widarno yang juga sekaligus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengikuti pendalaman presentasi sebagai bagian dari tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2020 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat. Pendalaman presentasi dilaksanakan secara virtual menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting berlangsung mulai pukul 09.00 s.d 10.30 WIB.

PPID ANRI mengikuti sesi I

dengan panelis terdiri dari Komisioner KI Pusat Arif Adi Kushardono dan Romanus Ndaou, serta akademisi yakni peneliti LIPI, Prof. Siti Zuhro. Pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang didiskusikan dengan para panelis, antara lain inovasi Layanan Informasi Publik Tatap Muka Virtual ANRI (LIPTARI), kolaborasi dengan stakeholders internal dan eksternal dalam penyediaan dan peningkatan kualitas layanan informasi, sikap proaktif ANRI dalam menyampaikan informasi tentang pandemi flu Spanyol pada masa Hindia Belanda dengan memanfaatkan media sosial, dan testimoni dari pengguna mengenai

informasi yang disajikan ANRI dengan cara milenial dan kekinian, serta rencana pengembangan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional untuk menghimpun informasi kearsipan yang berasal dari simpul jaringan.

Sebagai informasi, sebelum sesi pendalaman materi, pada tahapan monev KIP ini sebelumnya telah dilaksanakan pengisian *Self Assesment Quitionare* secara daring dalam aplikasi [e-monev.komisiinformasi.go.id](http://e-monev.komisiinformasi.go.id) dan mengirimkan video presentasi PPID yang berfokus pada kolaborasi dan inovasi. (tp)

# Cara unduh Majalah ARSIP dalam format digital

1. Masuk ke [www.anri.go.id](http://www.anri.go.id)
2. Klik menu “Publikasi Kami”
3. Pilih “Majalah ARSIP”
4. Unduh “Majalah ARSIP”
5. Majalah ARSIP tersedia dalam Portable Document Format (PDF) dapat dibaca menggunakan Adobe Acrobat

